



# 2024

## LAPORAN KINERJA

### BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

---





**KEPALA BADAN NASIONAL Pencarian dan Pertolongan  
REPUBLIK INDONESIA**

**KATA PENGANTAR**

Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) menyusun laporan akuntabilitas kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang diemban dalam satu tahun anggaran. Laporan ini memberikan gambaran dalam upaya memenuhi setiap target kinerja dan pemakaian sumber daya yang digunakan.

Laporan akuntabilitas ini menggunakan metodologi penyusunan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini menyajikan analisis antara target dan realisasi atas Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan oleh Basarnas pada tahun 2024 dengan mengacu pada Rencana Strategis Basarnas Tahun 2020-2024.

Penyusunan laporan kinerja ini diharapkan dapat mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang baik sebagai salah satu prasyarat terciptanya pemerintahan yang bersih, terpercaya serta akuntabel sehingga tugas dan fungsi dapat berjalan secara efisien, efektif, transparan serta responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, 21 Februari 2025

Kepala Badan Nasional  
Pencarian dan Pertolongan,  
  
Khusworo, S.E., M.M.  
Marsekal Madya TNI

**BADAN NASIONAL Pencarian dan Pertolongan**  
Jalan Angkasa Blok B15 Kav. 2-3 Kemayoran Jakarta 10720  
Telp. (021) 6570 1116 / 6586 7510, Fax. (021) 6570 1152

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Salah satu prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah tersusunnya laporan kinerja pelaksanaan kegiatan untuk mewujudkan komitmen organisasi penyelenggara negara dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Basarnas terus berkomitmen untuk melakukan perbaikan manajemen, dan meningkatkan akuntabilitas kinerja guna meningkatkan pelayanan publik dan kepercayaan publik. Hal ini dicerminkan dengan upaya perbaikan atas setiap sistem manajemen yang dimiliki, antara lain pelatihan kepada masyarakat dengan harapan masyarakat lebih memahami, peduli dan sigap untuk melakukan upaya preventif terutama di daerah rawan terjadinya bencana, optimalisasi layanan call center 115, pelaksanaan program reformasi birokrasi, penyederhanaan organisasi, digitalisasi serta adaptasi terhadap teori/praktik terbaik dan terkini.

Pada tahun 2024 capaian kinerja Basarnas adalah 95,95%. Dari 7 (tujuh) indikator kinerja terdapat 2 (dua) indikator kinerja yang melebihi target, 4 (empat) indikator kinerja belum tercapai targetnya dan 1 (satu) indikator kinerja belum dapat dihitung capaiannya diakrenakan hasil penilaian belum dirilis dari Instansi terkait. Capaian kinerja Basarnas dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Capaian Kinerja Basarnas Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan Pencarian dan Pertolongan	Indeks kepuasan masyarakat	85,67	90,78	105,96%
2.	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan operasi Pencarian dan Pertolongan	Waktu tanggap Pencarian dan Pertolongan (menit)	25 menit	17,18 menit	131,28%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
		Persentase keberhasilan evakuasi korban pada pelaksanaan operasi Pencarian dan Pertolongan (%)	100%	98,76%	98,76%
3.	Meningkatnya keandalan sumber daya Pencarian dan Pertolongan	Tingkat pemenuhan kebutuhan minimum sumber daya Pencarian dan Pertolongan (%)	74,34%	34,02%	45,76%
		Tingkat kesiapan sarana prasarana serta sistem komunikasi Pencarian dan Pertolongan (%)	93,91%	91,70%	97,64%
		Persentase SDM Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan Potensi yang bersertifikat (%)	100%	96,29%	96,29%
4.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	76	N/A	N/A



## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Ikhtisar Eksekutif .....	ii
Daftar Isi .....	iv
Daftar Tabel .....	vi
Daftar Grafik .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi .....	2
1. Kedudukan .....	2
2. Tugas .....	2
3. Fungsi .....	2
4. Susunan Organisasi .....	3
C. Aspek Strategis .....	6
1. Sarana dan Prasarana serta Sistem Komunikasi .....	6
2. Sumber Daya Manusia .....	12
D. Isu Strategis .....	14
E. Sistematika Laporan .....	15
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b> .....	<b>17</b>
A. Rencana Strategis .....	17
1. Visi dan Misi .....	17
2. Tujuan dan Sasaran .....	18
3. <i>Cascading</i> .....	30
4. <i>Crosscutting</i> Kinerja .....	44
5. Program dan Sasaran Program .....	46
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 .....	49
C. Anggaran .....	50
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	<b>51</b>
A. Capaian Kinerja Basarnas .....	52
1. Sasaran Strategis “Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan Pencarian dan Pertolongan” .....	52
2. Sasaran Strategis “Meningkatnya efektivitas pelaksanaan operasi Pencarian dan Pertolongan” .....	54
3. Sasaran Strategis “Meningkatnya keandalan sumber daya Pencarian	

dan Pertolongan”.....	60
4. Sasaran Strategis “Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik ( <i>Good Governance</i> ) .....	78
B. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya .....	85
1. Sumber Daya Manusia .....	85
2. Anggaran .....	87
3. Sarana dan Prasarana .....	88
4. Peralatan Sistem Komunikasi .....	89
C. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja .....	90
1. Pengelolaan Operasi SAR .....	91
2. Pengelolaan Kesiapsiagaan .....	98
3. Pengelolaan Sistem Komunikasi .....	109
4. Pengelolaan Sarana dan Prasarana .....	113
5. Pembinaan Potensi SAR .....	114
6. Pembinaan Tenaga SAR .....	116
7. Diklat SAR .....	118
8. Penyusunan Produk Hukum dan Kerja Sama .....	121
9. Penyusunan Organisasi Tata Laksana Dan Pengelolaan Kepegawaian .....	128
D. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi .....	131
E. Realisasi Anggaran .....	133
F. Prestasi dan Capaian Kinerja Lainnya .....	138
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	141
A. Kesimpulan dan Upaya Perbaikan .....	142
B. Rekomendasi dan Tindak Lanjut .....	143

#### Lampiran

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2024
2. Pengukuran Kinerja Tahun 2024
3. Pernyataan Telah Direviu
4. Cascading

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Data Helikopter Basarnas .....	7
Tabel. 1.2.	Jumlah Sarana Pencarian dan pertolongan perairan.....	8
Tabel. 1.3.	Jumlah Sarana SAR Darat per Desember 2024 .....	9
Tabel 1.4.	Prasarana Laut dan Udara .....	11
Tabel 1.5.	Jumlah SDM yang dimiliki Basarnas .....	13
Tabel 2.1	Tujuan Strategis Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Basarnas .....	29
Tabel 2.2.	<i>Cascading</i> .....	32
Tabel 2.3.	Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Basarnas .....	51
Tabel 3.1.	Tabel Hasil Survei Kepuasan Masyarakat terhadap layanan pencarian dan pertolongan pada tahun 2024 .....	54
Tabel 3.2.	Membandingkan Target dengan Realisasi IKM Tahun 2024.....	55
Tabel 3.3.	Perbandingan Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2024 dengan tahun sebelumnya .....	55
Tabel 3. 4.	Waktu Tanggap pada Pencarian dan Pertolongan Tahun 2024.....	56
Tabel 3.5.	Perbandingan Target dengan Realisasi Waktu Tanggap Pencarian dan Pertolongan Tahun 2024 .....	58
Tabel 3.6.	Perbandingan Waktu Tanggap Pencarian dan Pertolongan Tahun 2024 dengan tahun sebelumnya .....	58
Tabel 3.7.	Jumlah korban yang terevakuasi selama penanganan operasi pencarian dan pertolongan selama Tahun 2024 .....	60
Tabel 3.8.	Perbandingan Target dengan Realisasi Persentase Keberhasilan Evakuasi Korban pada pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan Tahun 2023 .....	60
Tabel 3.9.	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja “Persentase keberhasilan evakuasi korban pada pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan” Tahun 2020-2023 .....	61
Tabel 3.10.	Kebutuhan Pegawai Basarnas Tahun 2020 – 2024 .....	62
Tabel 3.11.	Pemenuhan Sarana Pencarian dan Pertolongan Laut .....	63

Tabel 3.12.	Pemenuhan Sarana Pencarian dan Pertolongan Darat .....	64
Tabel 3.13.	Realisasi Pemenuhan Sarana Pencarian dan Pertolongan Udara .....	65
Tabel 3.14.	Pemenuhan Prasarana Pencarian dan Pertolongan .....	65
Tabel 3.15.	Pemenuhan Peralatan Sistem Komunikasi Pencarian dan Pertolongan .....	66
Tabel 3.16.	Persentase Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Minimum Sumber Daya Pencarian dan Pertolongan Tahun 2024 .....	68
Tabel 3.17.	Perbandingan Target dengan Realisasi Persentase Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Minimum Sumber Daya Pencarian dan Pertolongan Tahun 2024 .....	68
Tabel 3.18.	Perbandingan Target dengan Realisasi Persentase Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Minimum Sumber Daya Pencarian dan Pertolongan Tahun 2024 dengan tahun sebelumnya .....	68
Tabel 3.19.	Kesiapan sarana prasarana serta sistem komunikasi Pencarian dan Pertolongan sampai dengan Desember 2024 .....	70
Tabel 3.20.	Persentase kesiapan sarana prasarana serta sistem komunikasi Pencarian dan Pertolongan .....	72
Tabel 3.21.	Perbandingan Persentase kesiapan sarana prasarana serta sistem komunikasi Tahun 2024 dengan tahun sebelumnya .....	73
Tabel 3.22.	Pelatihan Potensi Pencarian dan Pertolongan selama Tahun 2024 .....	75
Tabel 3.23.	Persentase SDM Basarnas dan Potensi yang bersertifikat .....	77
Tabel 3.24.	Perbandingan Target dan Realisasi Persentase SDM Basarnas dan Potensi yang bersertifikat Tahun 2024 .....	78
Tabel 3.25.	Perbandingan Persentase SDM Basarnas dan Potensi yang bersertifikat Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya .....	78
Tabel. 3.26.	Perbandingan Target dan Realisasi Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2024 .....	80
Tabel 3.27.	Perbandingan Target dan Realisasi Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2024 dengan Tahun 2023 .....	81
Tabel 3.28	Realisasi Anggaran Kegiatan Pendukung.....	86

Tabel 3.29	Program/Kegiatan penunjang keberhasilan/kegagalan capaian Basarnas Tahun 2024 .....	88
Tabel 3.30	Lokasi Kegiatan Asistensi Dukungan Komunikasi .....	108
Tabel. 3.31.	Pelaksanaan Diklat SAR Tahun 2024 .....	117
Tabel 3.32.	Kerja Sama Dalam Negeri selama Tahun 2024 .....	120
Tabel 3.33.	<i>Perbandingan</i> Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah (Renstra Basarnas .....	108
Tabel. 3.34.	Realisasi Anggaran Basarnas Tahun 2024 .....	136
Tabel. 3.35.	Capaian Basarnas Tahun 2020-2024 .....	142

## DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1.	Perbandingan Jumlah Kebutuhan dan Pemenuhan SDM Basarnas Tahun 2024 .....	13
Grafik 3.1.	Perbandingan Persentase Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Minimum Sumber Daya Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020 - 2024 .....	67
Grafik 3.2.	Perbandingan Persentase Tingkat Kesiapan Sarana Prasarana Serta Sistem Komunikasi Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020 - 2024 .....	72
Grafik 3.3.	Perbandingan Persentase SDM Basarnas dan Potensi yang bersertifikat Tahun 2020-2024 .....	77
Grafik 3. 4.	Perbandingan Jumlah Kebutuhan dan Pemenuhan SDM .....	85
Grafik 3.5.	Sebaran Pegawai Basarnas.....	86
Grafik 3.6.	Pemenuhan Tenaga ABK dan <i>Rescuer</i> .....	86

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) dibentuk oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pencarian dan pertolongan sebagaimana disebutkan pada Pasal 47 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan. Selanjutnya Pasal 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2016 tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, menyebutkan bahwa Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dan dipimpin oleh Kepala Badan.

Dalam rangka memenuhi tuntutan pelayanan pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan (Operasi SAR), Basarnas memerlukan perencanaan dengan perspektif lebih luas, hal ini dikarenakan adanya berbagai masalah yang dihadapi baik yang menyangkut institusi, sumber daya manusia, maupun fasilitas pencarian dan pertolongan. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan perencanaan dan penanganan bertahap sehingga diharapkan setiap pelaksanaan Operasi SAR dapat berlangsung dengan cepat, handal dan aman.

Basarnas selaku instansi pemerintah berkewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja (LKj) sebagai laporan pertanggungjawaban dan upaya peningkatan kinerjanya sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Kementerian PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

## B. Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2016 tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, kedudukan, tugas dan fungsi Basarnas adalah sebagaimana dijelaskan di bawah ini.

### 1. Kedudukan

Dalam Pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa Basarnas adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

### 2. Tugas

Dalam Pasal 2 ayat (1), Basarnas mempunyai tugas:

- a. Menyusun dan menetapkan norma, standar, prosedur, kriteria, serta persyaratan dan prosedur perizinan dalam penyelenggaraan SAR;
- b. Memberikan pedoman dan pengarahan dalam penyelenggaraan SAR;
- c. Menetapkan standardisasi dan kebutuhan penyelenggaraan SAR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait;
- e. Menyelenggarakan sistem informasi dan komunikasi;
- f. Menyampaikan informasi penyelenggaraan SAR kepada masyarakat;
- g. Menyampaikan informasi penyelenggaraan operasi SAR secara berkala dan setiap saat pada masa penyelenggaraan operasi SAR kepada masyarakat;
- h. Melakukan pembinaan, pemantauan, dan evaluasi terhadap penyelenggaraan SAR; dan
- i. Melakukan pemasyarakatan SAR.

### 3. Fungsi

Basarnas menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan dan penetapan norma, standar, prosedur, kriteria, serta persyaratan dan prosedur perizinan dan/atau rekomendasi penyelenggaraan operasi SAR;

- b. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan operasi SAR, pembinaan tenaga dan potensi, sarana dan prasarana, dan sistem komunikasi;
- c. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan standardisasi siaga, latihan, dan pelaksanaan Operasi SAR;
- d. perumusan dan penetapan kebutuhan siaga, latihan, dan pelaksanaan operasi SAR;
- e. koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan Operasi SAR, pembinaan tenaga dan potensi, sarana dan prasarana, dan sistem komunikasi;
- f. pengembangan dan pelaksanaan sistem informasi dan komunikasi SAR;
- g. pelayanan informasi penyelenggaraan SAR;
- h. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang SAR;
- i. pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan bidang SAR;
- j. pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Basarnas;
- k. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Basarnas;
- l. pengawasan intern atas pelaksanaan tugas di bidangnya;
- m. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Basarnas

#### 4. Susunan Organisasi

Susunan organisasi Basarnas adalah sebagai berikut:

##### a. Kepala

Kepala mempunyai tugas memimpin dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi Basarnas.

##### b. Sekretariat Utama

Sekretariat Utama dipimpin oleh Sekretaris Utama yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala. Sekretariat Utama mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas,

pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Basarnas. Sekretariat Utama terdiri atas Biro Perencanaan dan Keuangan, Biro Humas dan Umum, Biro Hukum dan Kerja Sama, serta Biro Kepegawaian dan Ortala.

c. Kedeputian Bidang Operasi Pencarian dan Pertolongan, dan Kesiapsiagaan

Kedeputian Bidang Operasi Pencarian dan Pertolongan, dan Kesiapsiagaan dipimpin oleh Deputi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala. Kedeputian Bidang Operasi Pencarian dan Pertolongan, dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi pelaksanaan, perumusan kebutuhan, perumusan dan pelaksanaan standarisasi, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang operasi SAR, dan kesiapsiagaan serta perumusan norma, standar, prosedur, kriteria, serta persyaratan dan prosedur perizinan dan/atau rekomendasi dan pelayanan informasi penyelenggaraan SAR. Kedeputian Bidang Operasi Pencarian dan Pertolongan, dan Kesiapsiagaan terdiri atas Direktorat Operasi dan Direktorat Kesiapsiagaan.

d. Kedeputian Bidang Bina Tenaga dan Potensi Pencarian dan Pertolongan

Kedeputian Bidang Bina Tenaga dan Potensi Pencarian dan Pertolongan dipimpin oleh Deputi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala. Kedeputian Bidang Bina Tenaga dan Potensi Pencarian dan Pertolongan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi pelaksanaan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan serta bimbingan dan penyuluhan di bidang bina tenaga dan potensi SAR. Kedeputian Bidang Bina Tenaga dan Potensi Pencarian dan Pertolongan terdiri atas Direktorat Bina Tenaga dan Direktorat Bina Potensi.

e. Kedeputian Bidang Sarana dan Prasarana, dan Sistem Komunikasi Pencarian dan Pertolongan

Kedeputan Bidang Sarana dan Prasarana, dan Sistem Komunikasi Pencarian dan Pertolongan dipimpin oleh Deputi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala. Kedeputan Bidang Sarana dan Prasarana, dan Sistem Komunikasi Pencarian dan Pertolongan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi pelaksanaan, pengembangan dan pelaksanaan, dan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang sarana dan prasarana, dan sistem komunikasi SAR. Kedeputan Bidang Sarana dan Prasarana, dan Sistem Komunikasi Pencarian dan Pertolongan terdiri dari Direktorat Sarana dan Prasarana dan Direktorat Komunikasi.

f. Inspektorat

Inspektorat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala melalui Sekretaris Utama. Inspektorat dipimpin oleh Inspektur dan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Basarnas. Inspektorat terdiri atas Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional.

g. Pusat Data dan Informasi

Pusat Data dan Informasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala melalui Sekretaris Utama. Pusat Data dan Informasi dipimpin oleh Kepala Pusat dan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data dan informasi SAR. Pusat Data dan Informasi terdiri atas Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional.

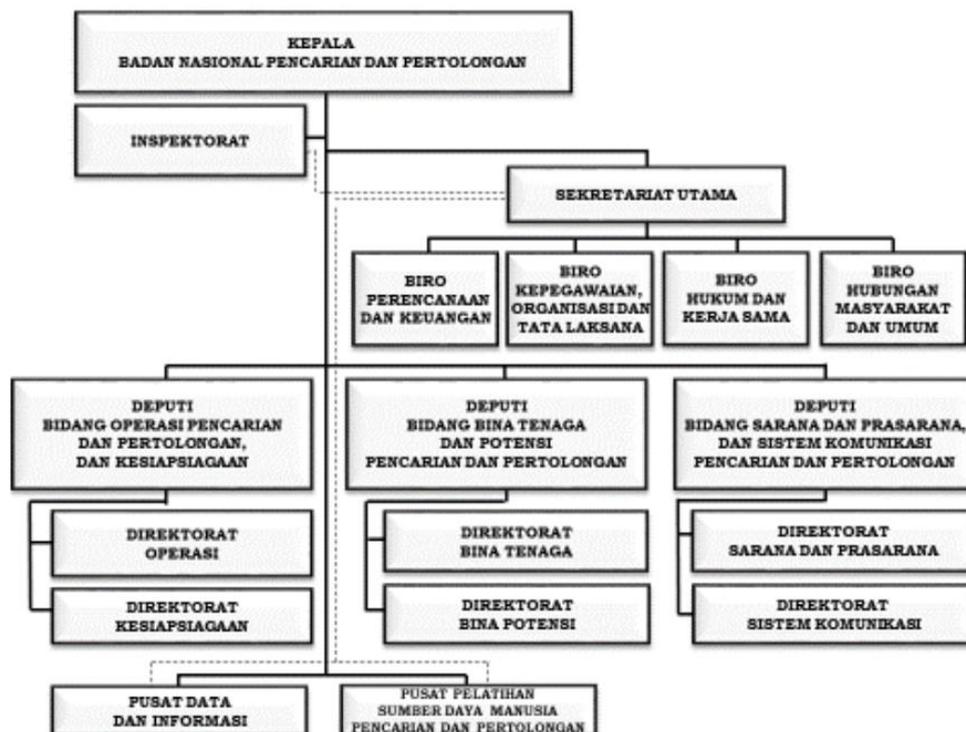
h. Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pencarian dan Pertolongan

Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pencarian dan Pertolongan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala melalui Sekretaris Utama. Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pencarian dan Pertolongan dipimpin oleh Kepala Pusat dan mempunyai tugas melaksanakan pelatihan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia pencarian dan pertolongan. Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pencarian dan Pertolongan terdiri atas Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional.

i. Unit Pelaksana Teknis

Unit Pelaksana Teknis berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Basarnas. Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh seorang Kepala UPT. Unit Pelaksana Teknis melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau teknis penunjang di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Unit Pelaksana Teknis terdiri atas Kantor Pencarian dan Pertolongan (Kansar) dan Balai Pendidikan dan Pelatihan Basarnas yang berganti nama menjadi Balai Pelatihan SDM Pencarian dan Pertolongan.

Struktur Organisasi Basarnas adalah sebagai berikut:



C. Aspek Strategis

1. Sarana dan Prasarana serta Sistem Komunikasi

Keberhasilan Basarnas dalam melaksanakan tugas ditentukan oleh sarana dan prasarana yang dimiliki. Sarana dan prasarana yang

memadai merupakan unsur pendukung keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan. Sarana dan prasarana dimaksud diantaranya:

a. Sarana SAR Udara

Tabel 1.1. Data Helikopter Basarnas

No	Type/ Registrasi	Tahun Pembuatan	Home Base	Keterangan
Helikopter BO-105				
1	HR-1517	1982	Lanud ATS	Lanud ATS
2	HR-1518	1982	Lanud ATS	Lanud ATS
3	HR-1519	1995	Lanud ATS	Lanud ATS
4	HR-1521	1984	Wing Udara 2, Lanudal Juanda	Wing Udara 2, Lanudal Juanda
5	HR-1522	1984	Wing Udara 1, Tj. Pinang	Wing Udara 1, Tj. Pinang
6	HR-1524	1984	Wing Udara 1, Tj. Pinang	Lanud ATS
Helikopter Dauphin AS365N3+				
7	HR-3601	2013	Wing Udara 2, Lanudal Juanda	Hanggar GNI Cibubur
8	HR-3603	2015	Wing Udara 2, Lanudal Juanda	Wing Udara 2, Lanudal Juanda
9	HR-3604	2015	Lanud ATS	Lanud ATS
10	HR-3605	2019	Lanud ATS	Lanud ATS
11	HR-3606	2019	Lanud ATS	Lanud ATS
Helikopter AW 139				
12	HR-1301	2015	Lanud ATS	Lanud ATS

Sumber data: Laporan Tahunan 2024 Direktorat Sarana dan Prasarana

b. Sarana Pencarian dan Pertolongan Perairan

Sarana Pencarian dan Pertolongan Perairan adalah sarana utama yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas / operasi SAR di wilayah perairan. Jumlah sarana pencarian dan pertolongan perairan yang dimiliki Basarnas adalah sebagai berikut :

Tabel. 1.2. Jumlah Sarana Pencarian dan pertolongan perairan

Per Desember 2024

No	Sarana	Jumlah	Keterangan
1.	<i>Rescue Boat</i>	81 Unit	Tersebar di 43 Kantor Pencarian dan Pertolongan dan kantor Pusat
2.	<i>Rigid Inflatable Boat</i>	154 Unit	Tersebar di 43 Kantor Pencarian dan Pertolongan
3.	<i>Rigid Bouyancy Boat</i>	26 Unit	Bengkulu, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Lampung, Jakarta, Palembang, Mataram, Kupang, Pontianak, Denpasar, Palu, Biak, Surabaya, Ambon, Merauke, Timika, Makassar, Palu, Sorong, Medan, Balikpapan, Gorontalo, Palangkaraya, Bandung, Jambi dan Tarakan.
4.	<i>Rubber Boat/Landing Craft/Rafting Boat</i>	764 Unit	Tersebar di 43 Kantor Pencarian dan Pertolongan, Balai Balai Pengembangan SDM PP dan Kantor Pusat
5.	<i>Rescue Water Craft</i>	49 Unit	Medan, Jakarta, Surabaya, Denpasar, Makassar, Tanjungpinang, Mataram, Kupang, Kendari, Manado, Ambon, Sorong, Pangkalpinang, Ternate, Gorontalo, Yogyakarta, Natuna, Mentawai, Banten, Maumere, Balai Pengembangan SDM PP, Nias, Cilacap, Bengkulu, Bandung, dan Banjarmasin.
6.	<i>Hovercraft</i>	2 Unit	Yogyakarta dan Kantor Pusat

No	Sarana	Jumlah	Keterangan
7.	<i>Double Stabilizer Boat</i>	27 Unit	Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Cilacap, Yogyakarta, Banten, Lampung, Biak, Timika, Palangkaraya dan Bandung.

Sumber data: Laporan Tahunan 2024 Direktorat Sarana dan Prasarana

c. Sarana Pencarian dan Pertolongan Darat

Sarana SAR darat adalah sarana utama yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas / operasi SAR di darat. Sarana SAR Darat (*Emergency Rescue Vehicle*) tersebut dibutuhkan dalam mendukung mobilisasi peralatan maupun tim rescue dalam operasi SAR. Peralatan yang disiapkan merupakan peralatan urban SAR yang digunakan dalam pertolongan terhadap korban yang terperangkap di kendaraan, pesawat, kereta api maupun reruntuhan gedung. Terdapat pula kendaraan yang didesain khusus untuk operasi SAR yaitu kendaraan yang dilengkapi dengan fasilitas dan peralatan pertolongan di darat, gedung dan jalan raya.

Tabel. 1.3. Jumlah Sarana SAR Darat per Desember 2024

No	Sarana	Jumlah	Keterangan
1.	<i>Rescue Truck Type I</i>	48 Unit	Kantor Pusat dan UPT
2.	<i>Rescue Truck Type II</i>	225 Unit	Kantor Pusat dan UPT
3.	<i>Multipurpose Logistik Vehicle</i>	7 Unit	Kantor Pusat (3 Unit), Kantor Pencarian dan Pertolongan Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Bandung
4.	<i>Mobil Refueler</i>	2 Unit	Kantor Pusat

No	Sarana	Jumlah	Keterangan
5.	Truck Angkut Sarana	30 Unit	Kantor Pencarian dan Pertolongan Medan, Jakarta, Surabaya, Denpasar, Makassar, Banda Aceh, Padang, Pekanbaru, Semarang, Palembang, Pontianak, Banjarmasin, Balikpapan, Kendari, Manado, Jambi, Bandung, Bengkulu, Lampung, Tanjung Pinang, Yogyakarta, Balai SDM PP, Kantor Pusat
6.	<i>Dissaster Support Tactical Equipment</i>	5 Unit	Kantor Pencarian dan Pertolongan Semarang, Surabaya, Bandung, Yogyakarta dan Kantor Pusat
7.	<i>Rescue Car Type I</i>	96 Unit	Kantor Pusat dan UPT
8.	<i>Rescue Car Type II (Rescue Car Double Cabin)</i>	223 unit	Kantor Pusat dan UPT
9.	<i>Rescue Car Type II (Rescue Carier Vehicle)</i>	101 unit	Kantor Pusat dan UPT
10.	<i>All Terrain Vehicle Type I</i>	21 Unit	Kantor Pencarian dan Pertolongan Merauke, Timika, Banjarmasin, Palembang, Jayapura, Sorong, Biak, Ambon, Manado, Kendari, Makassar, Pontianak, Balikpapan, Kupang, Mataram, Denpasar, Jakarta, Tanjung Pinang, Pekanbaru, Padang, Medan
11.	<i>All Terrain Vehicle Type II</i>	24 Unit	Kantor Pencarian dan Pertolongan Medan, Jakarta, Surabaya, Denpasar, Makassar, Banda Aceh, Padang, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Palembang, Semarang, Pontianak, Banjarmasin, Balikpapan, Kendari, Manado, Jambi, Bandung, Bengkulu, Lampung, Yogyakarta, Balai Pengembangan SDM PP, Kantor Pusat
12.	<i>Rescue Excavator</i>	7 Unit	Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar, Semarang, Bandung, Lampung, Yogyakarta, Banten
13.	<i>Rescue</i>	364 Unit	Kantor Pusat dan UPT

No	Sarana	Jumlah	Keterangan
	Motorcycle		

Sumber data: Laporan Tahunan 2024 Direktorat Sarana dan Prasarana

#### d. Prasarana

Prasarana adalah penunjang utama yang merupakan awal dari segala aktivitas mulai dari perencanaan, pengoordinasian, sampai evaluasi. Tersedianya gedung yang memadai akan menjadi salah satu unsur pemicu etos kerja sekaligus memberikan kemudahan bagi masyarakat pengguna jasa layanan pencarian dan pertolongan. Saat ini Basarnas memiliki 44 Unit Pelaksana Teknis (UPT) terdiri dari 1 Balai Pelatihan SDMPPP dan 43 Kantor Pencarian dan Pertolongan (Kantor SAR), 91 Pos Pencarian dan Pertolongan (Pos SAR), dan 71 Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan (Unit Siaga SAR). Selain gedung Basarnas juga memiliki prasarana lain yaitu tempat sandar kapal dan hangar helikopter.

Tabel 1.4. Prasarana Laut dan Udara

No	Prasarana	Jumlah	Keterangan
1.	<b>Prasarana Laut :</b> Tempat Sandar Kapal	7	KPP Banjarmasin, KPP Palembang, KPP Kendari, KPP Tanjung Pinang, KPP Pontianak, KPP Jayapura, KPP Timika.
2.	<b>Prasarana Udara:</b> Hanggar Helikopter Hanggar Portable	1 2	ATS Bogor Denpasar, Tanjung Pinang

Sumber data: Laporan Tahunan 2024 Direktorat Sarana dan Prasarana

e. Peralatan Pencarian dan Pertolongan

Peralatan pencarian dan pertolongan adalah alat bantu yang digunakan untuk mendukung dan merupakan bagian penting bagi rescuer dalam pelaksanaan tugas/operasi pencarian dan pertolongan, sehingga dapat meningkatkan persentasi keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan. Berikut ini klasifikasi peralatan pencarian dan pertolongan yaitu:

- 1) Peralatan Pencarian dan Pertolongan Perorangan
- 2) Peralatan Pencarian dan Pertolongan Beregu
- 3) Peralatan Pendukung
- 4) Peralatan Medis

f. Sistem Komunikasi

Salah satu fasilitas SAR yang memegang peranan utama dalam pelaksanaan kegiatan pencarian dan pertolongan adalah sistem komunikasi. Sistem komunikasi ini meliputi semua jenis peralatan komunikasi yang digunakan sebagai sarana pertukaran informasi baik berupa *voice* maupun data dalam kegiatan pencarian dan pertolongan.

2. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu komponen penting dalam penyelenggaraan operasi SAR. Penyiapan dan pengembangan SDM di bidang SAR bertujuan untuk mewujudkan SDM yang profesional, kompeten, disiplin, bertanggungjawab, dan memiliki integritas. Untuk mencapai tujuan tersebut, Basarnas telah melakukan perencanaan pemenuhan SDM, pendidikan dan pelatihan, pemeliharaan kompetensi, serta pengawasan, pemantauan, dan evaluasi.

SDM yang dimiliki Basarnas relatif masih kurang memadai dari segi kuantitas jika dibandingkan dengan luas wilayah cakupan NKRI. SDM yang dimiliki Basarnas sampai dengan Desember 2024 sebanyak 3.960 orang. Komposisi Jenis Jabatan, Jumlah Kebutuhan SDM, dan Jumlah

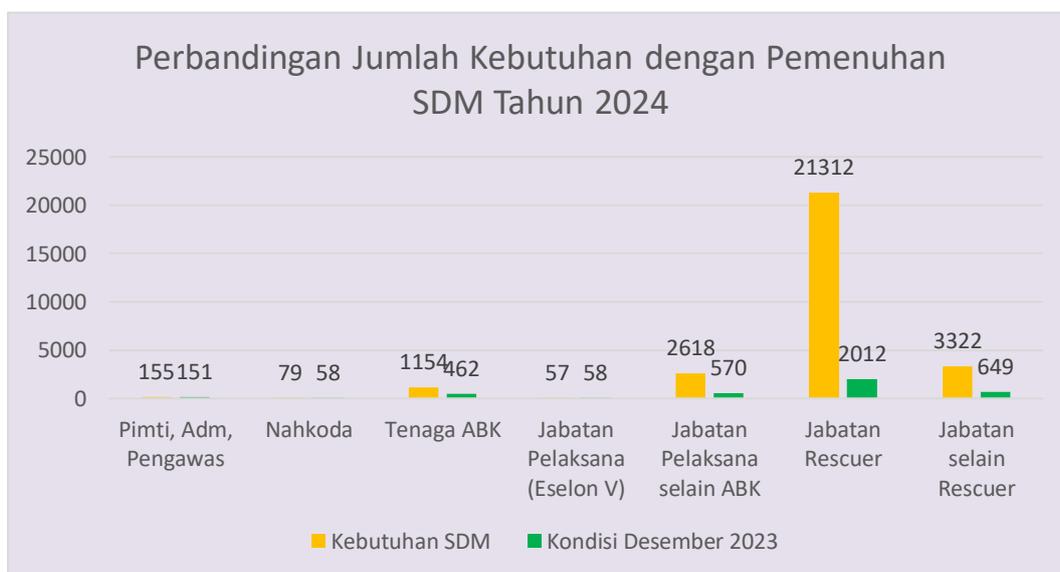
pegawai saat ini dapat dilihat pada Tabel 1.5., sedangkan perbandingan jumlah kebutuhan dan pemenuhan SDM Basarnas Tahun 2024 dapat dilihat pada Grafik 1.1.

Tabel 1.5. Jumlah SDM yang dimiliki Basarnas

No.	Jabatan	Kebutuhan SDM	Kondisi Desember 2024
1.	Jabatan Pimti, Administrator dan Pengawas	155	151
2.	Nahkoda Kapal	79	58
3.	Tenaga ABK	1.154	462
4.	Jabatan Pelaksana (Eselon V)	57	58
5.	Jabatan Pelaksana selain ABK	2.618	570
6.	Jabatan Fungsional Pranata Pencarian dan Pertolongan	21.312	2.012
7.	Jabatan Fungsional Lainnya selain Pranata Pencarian dan Pertolongan	3.322	649
<b>Jumlah</b>		<b>28.687</b>	<b>3.960</b>

Sumber data: Biro Kepegawaian dan Ortala

Grafik 1.1. Perbandingan Jumlah Kebutuhan dan Pemenuhan SDM Basarnas Tahun 2024



Sumber data: Biro Kepegawaian dan Ortala

#### D. Isu Strategis

Permasalahan dalam setiap aspek manajemen pada pencarian dan pertolongan dapat menjadi isu strategis. Berbagai isu strategis tersebut sangat berkaitan dengan aspek kinerja dan dampak pelayanan, penyediaan sarana dan prasarana, sumber daya manusia, pendanaan, kelembagaan, dan regulasi. Berikut isu strategis yang dihadapi oleh Basarnas antara lain:

1. Kurangnya SDM yang dimiliki Basarnas. Jumlah SDM Basarnas per Desember 2024 adalah sebanyak 3.960 orang atau sebesar 13,80 % dari total kebutuhan sebesar 28.687 orang
2. Kompetensi tenaga SAR dan tenaga administrasi yang ada saat ini sebagian besar belum memenuhi standar kompetensi jabatan yang diampu;
3. Meningkatnya keterlibatan potensi SAR dalam operasi SAR, namun masih diperlukan penyeragaman tindakan, dan koordinasi yang maksimal sehingga dapat meningkatkan pelayanan yang handal dan mengurangi dampak musibah;
4. Kurangnya jumlah dan kompetensi Petugas Siaga yang meliputi Kepala Siaga, Operator Komunikasi dan Rescuer pada Kantor Pencarain dan Pertolongan sehingga penugasan petugas siaga saat ini tidak sesuai dengan Peraturan Badan Nasional Pencarian Pertolongan no 8 tahun 2021 tentang Siaga Pencarian dan Pertolongan;
5. Pengembangan Jabatan Fungsional Rescuer baik di Pusat maupun Daerah perlu ditingkatkan melalui pembinaan karir, peningkatan kompetensi, pengembangan kompetensi kinerja, pengelolaan kinerja, pengisian jabatan dan mobilitas.
6. Keterbatasan fasilitasi dan sarana dalam rangka penyelenggaraan operasi SAR dan pembinaan tenaga SAR;
7. Modernisasi sarana dan prasarana Balai Pelatihan SDM Pencarian dan Pertolongan melalui penggunaan teknologi tinggi dalam meningkatkan kompetensi SDM Pencarian dan Pertolongan;
8. Perlu adanya pemisahan peralatan yang digunakan dalam operasi pencarian dan pertolongan dengan peralatan latihan;

9. Sejak tahun 2023 Basarnas merencanakan untuk meningkatkan klasifikasi Tim INASAR dari klasifikasi *Medium* ke *Heavy USAR Team*. Secara bersamaan, Basarnas membentuk tim *Urban SAR* di berbagai wilayah di Indonesia melalui program akreditasi nasional. Tujuan pembentukan tim tersebut adalah untuk meningkatkan kemampuan tim SAR di berbagai daerah dan mempercepat waktu tanggap serta kualitas pelaksanaan operasi SAR terutama di wilayah yang rawan bencana.

#### E. Sistematika Laporan

Sistematika Laporan Kinerja ini terdiri dari 4 Bab, yaitu:

1. Bab I Pendahuluan

memuat latar belakang, tugas dan fungsi, struktur organisasi, dan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

2. Bab II Perencanaan Strategis

memuat peta strategis Basarnas, ringkasan ikhtisar Renstra Basarnas, *cascading* sasaran strategis ke sasaran program, perjanjian kinerja.

3. Bab III Akuntabilitas Kinerja

Bab III Akuntabilitas Kinerja memuat:

- A. Capaian Kinerja Organisasi

pada sub bab ini disajikan capaian kinerja Basarnas untuk setiap pernyataan kinerja sasaran startegis Basarnas sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Basarnas.

- B. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pada sub ini disajikan terkait penggunaan sumber daya seperti SDM, anggaran, sarana dan prasarana serta peralatan siskom.

- C. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Pada sub ini disajikan Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan capaian kinerja Tahun 2024.

- D. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Pada sub ini disajikan perbandingan capaian Basarnas dari Tahun 2020 - 2024.

E. Realisasi Anggaran

pada sub bab ini disajikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan Perjanjian Kinerja serta adanya *Automatic Adjustment*.

F. Prestasi dan Kinerja Lainnya

pada sub bab ini disajikan prestasi dan kinerja lainnya yang telah dicapai oleh Basarnas selama Tahun 2024.

4. Bab IV Penutup

memuat simpulan umum atas capaian kinerja Basarnas serta langkah masa mendatang yang akan dilakukan Basarnas untuk meningkatkan kinerjanya. Rekomendasi dari Laporan Hasil Evaluasi Kementerian PANRB yang berisi penjelasan terhadap langkah-langkah serta tindak lanjut dari hasil rekomendasi Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun sebelumnya.

5. Lampiran memuat Perjanjian Kinerja Tahun 2024, Pengukuran Kinerja Tahun 2024, Pernyataan Telah Direviu

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### A. Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang mencakup visi, misi, tujuan dan sasaran Basarnas selama periode Tahun 2020-2024. Renstra 2020-2024 selain dapat menjadi ukuran pencapaian kinerja Basarnas selama lima tahun juga dapat menjadi pedoman penyelenggaraan seluruh program dan kegiatan dalam pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan melalui optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Renstra Basarnas digunakan sebagai landasan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP). Dokumen perencanaan tersebut disusun untuk kurun waktu selama 5 (lima) tahun untuk pencapaian target kinerja dan anggaran yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Badan Nasional Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024.

#### 1. Visi dan Misi

Sebagai bentuk dukungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dalam perwujudan Visi Presiden dan Wakil Presiden 2020-2024, khususnya di bidang pencarian dan pertolongan, maka Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan memiliki visi untuk periode pembangunan nasional 2020-2024 sebagai berikut:

“TERWUJUDNYA PENCARIAN DAN PERTOLONGAN YANG ANDAL DAN EFEKTIF DALAM MENDUKUNG PENCAPAIAN VISI DAN MISI PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN: “INDONESIA YANG MAJU, BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG”.

Mengacu pada tugas, fungsi dan wewenang yang telah dimandatkan oleh peraturan perundang-undangan kepada Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan serta penjabaran dari Misi Presiden dan Wakil Presiden 2020-2024, terutama Misi ke-7 Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga, serta dalam mendukung pelaksanaan Misi ke-2 Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing dan Misi ke-3 Pembangunan yang merata dan berkeadilan, maka ditetapkan Misi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan 2020-2024 sebagai berikut:

- M.1. Menyelenggarakan operasi pencarian dan pertolongan yang efektif, terintegrasi dan berstandar internasional dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh warga dalam bertransportasi maupun dalam menghadapi kejadian yang membahayakan manusia.
- M.2. Memperkuat sistem penyelenggaraan pencarian dan pertolongan melalui pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta sistem komunikasi, pengintegrasian seluruh potensi pencarian dan pertolongan, serta penguatan kerangka regulasi dan kelembagaan.

## 2. Tujuan dan Sasaran Strategis

Dalam rangka menjabarkan Visi dan Misi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan 2020-2024 tersebut di atas, maka perumusan tujuan (T) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dilakukan menggunakan pendekatan *Balanced Scorecard* (BSC) seperti pada Gambar 2.1. Pada BSC tersebut, terdapat 8 tujuan (T) yang terbagi ke dalam 3 kelompok/jenis tujuan sebagai berikut:

- TN            Memperkuat pelayanan dasar keselamatan dan keamanan transportasi nasional

- TS.1 Terselenggaranya layanan operasi pencarian dan pertolongan nasional yang andal dan profesional
- TS.2 Terselenggaranya keandalan sumber daya dan kualitas pencarian dan pertolongan
- TP.1 Terselenggaranya peningkatan kesiapsiagaan dan kinerja pencarian dan pertolongan
- TP.2 Terciptanya kualitas SDM Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan Potensi yang andal dan profesional
- TP.3 Tersedianya sarana prasarana dan sistem komunikasi yang andal
- TP.4 Terwujudnya kemampuan manajerial dan sumber daya yang berkualitas
- TP.5 Terwujudnya regulasi dan kelembagaan yang berkualitas

Tujuan Nasional (TN) merupakan tujuan skala nasional untuk bidang pencarian dan pertolongan, yang di dalam RPJMN Tahun 2020-2024 (Sub Bab 2.1.2 pada Tabel 2.1) termasuk ke dalam PN5 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar pada PP1 Infrastruktur Pelayanan Dasar terutama dalam KP4 Keselamatan dan Keamanan Transportasi. Pelaksanaan Tujuan Nasional (TN) ini merupakan konsentrasi dari Pemerintah secara keseluruhan (dalam hal ini dikoordinir oleh Presiden dengan melibatkan K/L terkait, termasuk Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, Kemenhub, Kemen PUPR, dan K/L terkait lainnya) dalam memperkuat pelayanan dasar guna menciptakan keselamatan dan keamanan transportasi nasional.

Tujuan Strategis (TS) merupakan tujuan pada level K/L, dalam hal ini tujuan strategis dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang diembankan oleh Presiden melalui Perpres Nomor 83 Tahun 2016 yakni dalam menyelenggarakan bidang pencarian dan pertolongan. Pelaksanaan Tujuan Strategis (TS) ini merupakan konsentrasi dari kelembagaan Badan Nasional Pencarian dan

Pertolongan yakni dalam menyelenggarakan pemenuhan dan keandalan sumber daya pencarian dan pertolongan dan dalam menyelenggarakan layanan operasi pencarian dan pertolongan nasional yang andal dan profesional. Hal ini mencakup aspek meningkatnya ketersediaan dan keandalan sumber daya (SDM tenaga dan potensi, sarana, prasarana, dan sistem komunikasi), meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan pencarian dan pertolongan serta meningkatnya efektivitas pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan (waktu tanggap dan tingkat keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan).

Tujuan Program (TP) merupakan tujuan pada level Unit Eselon I dalam melaksanakan program-program di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sesuai tugas dan fungsi masing-masing Unit Eselon I yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Indonesia No. 8 Tahun 2017. Dalam hal ini terdapat 5 tujuan program (TP), yakni: TP.1 untuk Kedeputian Bidang Operasi dan Kesiapsiagaan; TP.2 untuk Kedeputian Bidang Bina Tenaga dan Bina Potensi; TP.3 untuk Kedeputian Sarana dan Prasarana, dan Sistem Komunikasi; sedangkan TP.4 dan TP.5 untuk Sekretariat Utama.

Memperhatikan struktur dari tujuan pada *Balanced Scorecard* (BSC) pada Gambar 2.2, maka tujuan yang akan diupayakan pencapaiannya pada level Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan adalah Tujuan Strategis yakni (1) TS1 Terselenggaranya Layanan Operasi pencarian dan pertolongan nasional yang Andal dan Profesional, serta (2) TS2 Terselenggaranya Keandalan sumber daya dan kualitas Lembaga pencarian dan pertolongan. Adapun Tujuan Nasional (TN) akan diupayakan pencapaiannya pada level Nasional (oleh Presiden beserta K/L terkait termasuk didukung oleh pencapaian TS dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan). Sedangkan Tujuan Program (Indonesia) akan diupayakan pencapaiannya pada level Unit Eselon I di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (untuk mendukung pencapaian TS Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan).

Sesuai pasal 1 (17) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, sasaran (target) didefinisikan sebagai hasil yang diharapkan dari suatu program dan keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan. Lebih lanjut, dalam Permen PPN/Ka Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 tentang tata cara penyusunan renstra yang menyebutkan 3 (tiga) nomenklatur sasaran, yakni:

- a. Sasaran Strategis (SS) Kementerian/Lembaga (K/L) adalah kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh K/L yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil satu atau beberapa program.
- b. Sasaran Program (SP) adalah hasil yang akan dicapai dari suatu program dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis K/L yang mencerminkan berfungsinya keluaran.
- c. Sasaran Kegiatan (SK) adalah keluaran yang dihasilkan oleh suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan yang dapat berupa barang atau jasa.

Adapun dalam Permen PAN-RB Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN serta Permen PAN Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, membagi strategi pencapaian hasil kerja menjadi 3 (tiga) kategori yakni *outcome*, *output*, dan layanan. Penyusunan strategi pencapaian hasil kerja dapat dilakukan dengan metode cascading langsung (*direct cascading*) atau cascading tidak langsung (*non-direct cascading*).

Rumusan SS dan SP untuk Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dilakukan dengan pendekatan *Balanced Scorecard* (BSC) sebagaimana disampaikan pada Gambar 2.2. Sedangkan rumusan tentang SK disampaikan secara terpisah di dalam Lampiran. Dengan menggunakan pendekatan BSC, maka penjelasan dan rumusan tentang susunan

sasaran dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan adalah sebagai berikut:

a. *Stakeholder Perspective*

Pada level *stakeholder perspectives*, maka level sasaran pada peta strategi BSC Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan adalah yang mewakili perspektif pemberi mandat bidang pencarian dan pertolongan kepada Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya UU No. 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan Nasional. Pemberi mandat tertinggi adalah masyarakat yang pada periode pemerintahan 2020-2024 memberikan mandat kepada Presiden-Wakil Presiden 2020-2024 untuk mengkoordinir seluruh K/L untuk mewujudkan sasaran nasional yang diperjanjikan di dalam RPJMN Tahun 2020-2024.

Dalam konteks ini, maka Sasaran Strategis (SS) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan pada level *stakeholder perspectives* merepresentasikan pencapaian Sasaran Nasional (SN) dalam dokumen RPJMN Tahun 2020-2024 yang ditugaskan oleh Presiden kepada Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan untuk mewujudkannya. Sesuai dengan dokumen RPJMN Tahun 2020-2024 (Perpres No. 18 Tahun 2020), maka Sasaran Nasional (SN) terkait dengan bidang pencarian dan pertolongan (seperti yang telah dirangkum pada Tabel 2.1) adalah:

SN Meningkatkan kinerja layanan pencarian dan pertolongan

b. *Customer Perspective*

Dalam konsep *Balanced Scorecard* (BSC), perspektif *Customer Perspectives* (CP) mewakili kepentingan para pengguna jasa layanan pencarian dan pertolongan, yakni masyarakat pengguna dan pelaku jasa transportasi laut dan udara, serta masyarakat luas dalam konteks kejadian yang membahayakan manusia. Secara spesifik, perwujudan tujuan dan sasaran pada level *Customer Perspectives* (CP) menjadi *concern* utama dari Lembaga Badan Nasional Pencarian dan

Pertolongan dalam menyediakan layanan publik berupa operasi pencarian dan pertolongan yang mampu memenuhi harapan masyarakat.

Dalam hal ini, kepentingan pengguna jasa (*customers*) terkait layanan (*service*) pencarian pertolongan terdiri dari hal pokok, yakni: (1) ketersediaan layanan (*service availability*) ditunjukkan melalui penyediaan sumber daya pencarian dan pertolongan (yang mencakup: SDM, sarana dan prasarana, serta sistem komunikasi) yang memadai (cukup dan andal, sesuai kebutuhan minimal) sehingga menjangkau kejadian di seluruh wilayah NKRI, (2) kinerja layanan (*service performance*) yang ditunjukkan melalui efektivitas dari kegiatan operasi pencarian dan pertolongan yang dilakukan, yang ditandai oleh: (i) waktu tanggap (*response time* yang cepat) dan (ii) keberhasilan evakuasi yang tinggi, serta pada ujungnya (3) meningkatnya kepuasan masyarakat (*public satisfaction level*) terhadap layanan pencarian dan pertolongan. Oleh karena itu, di dalam BSC Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan untuk periode 2020-2024 ditetapkan beberapa Sasaran Strategis (SS) sebagai berikut:

- SS.1 Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan pencarian dan pertolongan
- SS.2 Meningkatkan efektivitas pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan
- SS.3 Meningkatkan keandalan sumber daya terhadap layanan pencarian dan pertolongan
- SS.4 Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*)

c. *Internal Business Process*

Pada *Balanced Scorecard* (BSC), perspektif *Internal Business Process* (IBP) ini merepresentasikan perspektif internal dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dalam menjalankan tugas dan

fungsinya (khususnya tugas dan fungsi teknis) di bidang pencarian dan pertolongan. Hal ini akan diwakili oleh pelaksanaan program/kegiatan teknis yang dilakukan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sesuai dengan struktur organisasi kedeputian yang juga menggambarkan aspek teknis dari penyelenggaraan bidang Pencarian dan Pertolongan, yakni berkaitan dengan: (1) pengembangan SDM tenaga dan potensi pencarian dan pertolongan, (2) penyediaan sarana dan prasarana, serta sistem komunikasi pencarian dan pertolongan, serta (3) pelaksanaan siaga dan operasi pencarian dan pertolongan. Oleh karena itu, perspektif IBP ini merupakan concern dari masing-masing Kedeputian di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan untuk mewujudkan kinerja masing-masing sesuai program yang dilaksanakan oleh setiap bidang deputi (Sasaran Program (SP)). Sehingga dalam perspektif *Internal Business Process* (IBP) ini ditetapkan sejumlah Sasaran Program (SP) yang menjadi tanggung jawab dari masing-masing Kedeputian di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, yaitu:

- SP1 Meningkatnya kinerja pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan
- SP2 Meningkatnya kesiapsiagaan pencarian dan pertolongan
- SP3 Meningkatnya kualitas SDM tenaga Pencarian dan Pertolongan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
- SP4 Meningkatnya kualitas SDM Potensi Pencarian dan Pertolongan
- SP5 Meningkatnya keandalan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan
- SP6 Meningkatnya keandalan sistem komunikasi pencarian dan pertolongan

SP1 dan SP2 merupakan konsentrasi dari Kedeputian Bidang Operasi Pencarian dan Pertolongan dan Kesiapsiagaan, sedangkan SP3 dan SP4 merupakan konsentrasi dari Kedeputian Bidang Bina Tenaga dan

Potensi Pencarian dan Pertolongan, adapun SP5 dan SP6 akan menjadi konsentrasi dari Kedeputan Bidang Sarana dan Prasarana, dan Sistem Komunikasi Pencarian dan Pertolongan.

d. Learning and Growth Perspective

Sesuai konsep *Balanced Scorecard* (BSC), perspektif *Learning and Growth* (LGP) merepresentasikan kebutuhan pemenuhan modal dasar dari organisasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan untuk dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik (efisien dan efektif). Dukungan modal dasar organisasi ini umumnya berupa penyediaan SDM aparatur, keuangan, data dan informasi, sarana dan prasarana pendukung, serta sistem regulasi dan kelembagaan yang dilaksanakan melalui program dukungan yang dikoordinir pelaksanaannya oleh Sekretariat Utama. Dalam hal ini sasaran program (SP) yang ditetapkan untuk perspektif *Learning and Growth* (LGP) mencakup:

- SP7 Meningkatkan profesionalitas ASN Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
- SP8 Meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
- SP9 Meningkatkan kualitas teknologi informasi, pengelolaan data dan informasi publik Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
- SP10 Meningkatkan efektivitas regulasi dan kerja sama di bidang pencarian dan pertolongan
- SP11 Meningkatkan kualitas kelembagaan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
- SP12 Meningkatkan pengawasan sesuai standar audit intern pemerintah (SAIPI).

Pada Tabel 2.1 disampaikan daftar Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) untuk setiap Sasaran Strategis (SS) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Adapun daftar Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) secara detail ada pada *Manual Indikator Kinerja Basarnas* yang terdapat pada halaman Lampiran IKU Basarnas dan telah dilegalkan pada Nomor: SK.KBSN-78/PR.02.02/II/BSN-2022. Pada Tahun 2023 direviu dan disahkan SK.KBSN-202/PR.02.02/XI/BSN-2023 Sedangkan pada Gambar 2.1 adalah Peta Strategis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sebagaimana telah dijelaskan di atas.

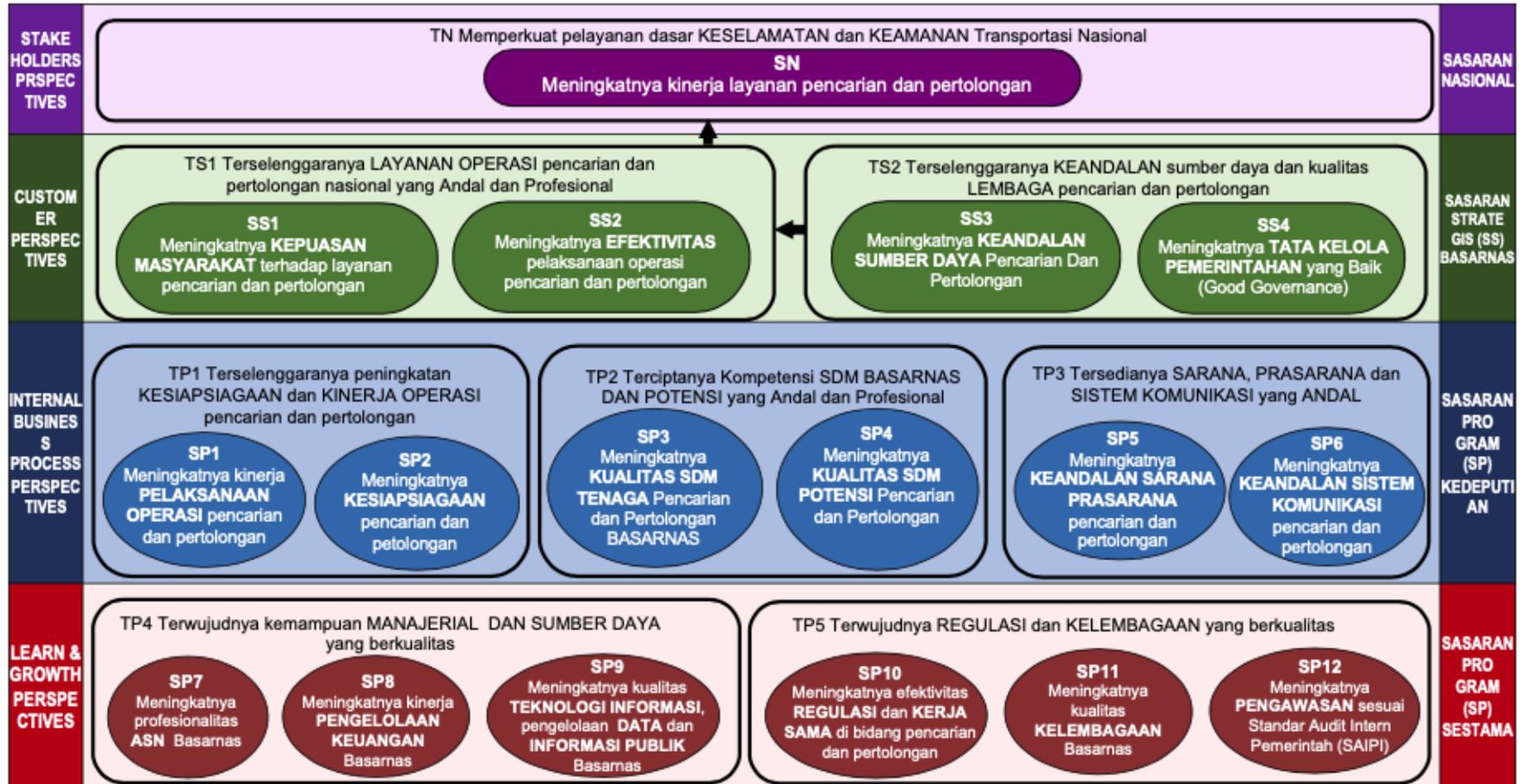
Tabel 2.1 Tujuan Strategis Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Basarnas Tahun 2020-2024

Tujuan Strategis		Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Satuan	Rumusan
TS1	Terselenggaranya layanan operasi pencarian dan pertolongan nasional yang andal dan profesional	SS1	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan pencarian dan pertolongan	IKSS.1	Indeks kepuasan masyarakat	Nilai	Rata-rata indeks kepuasan masyarakat terhadap unit layanan operasi, unit layanan registrasi alat pemancar sinyal marabahaya dan unit layanan pembinaan potensi
		SS2	Meningkatnya efektifitas pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan	IKSS.2	Waktu tanggap pencarian dan pertolongan	Menit	Waktu semenjak berita diterima hingga unit pencarian dan pertolongan siap diberangkatkan
				IKSS.3	Persentase keberhasilan evakuasi korban pada pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan	%	Persentase korban kecelakaan pesawat udara, kapal, kondisi membahayakan manusia, bencana dan penanganan khusus yang berhasil dievakuasi
TS2	Terselenggaranya Keandalan sumber daya dan kualitas Lembaga Pencarian dan Pertolongan	SS3	Meningkatnya keandalan sumber daya pencarian dan pertolongan	IKSS.4	Tingkat pemenuhan kebutuhan minimum sumber daya pencarian dan pertolongan	%	Rata-rata persentase pemenuhan kebutuhan minimal tenaga pencarian dan pertolongan, sarana dan prasarana, serta sistem komunikasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

Tujuan Strategis		Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Satuan	Rumusan
				IKSS.5	Tingkat kesiapan sarana prasarana serta sistem komunikasi pencarian dan pertolongan	%	Rata-rata tingkat kesiapan sarana dan prasarana serta perangkat dan peralatan komunikasi dalam menunjang keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan
				IKSS.6	Persentase SDM Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan Potensi yang bersertifikat	%	Persentase tenaga ABK, jabatan pelaksana selain ABK, rescuer dan Potensi yang telah memiliki sertifikat.
		SS4	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik ( <i>good government</i> )	IKSS.7	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang dikeluarkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Gambar 2.1. Peta Strategis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan 2020-2024

## TUJUAN DAN SASARAN BASARNAS 2020-2024



Sumber data: Reviu Rensrta Basarnas 2020-2024

### 3. Cascading

Tabel *Cascading* dapat dilihat pada Tabel 2.2. Tabel tersebut adalah tabel Penjenjangan Sasaran Strategis sampai dengan Sasaran Kegiatan berikut dengan Indikator Kinerjanya (Indikator Kinerja sasaran / IKSS dan Indikator Kinerja Program IKSP). Penggunaan Program yang dipakai adalah Program Teknis yaitu Program pengelolaan Pencarian dan Pertolongan.

Sasaran Strategis cascading ke Sasaran Program sebagai berikut:

Tabel 2.2. Cascading Basarnas

Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja (IKSS)	Sasaran Program (SP)	Indikator Kinerja (IKSP)	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja (IKSS)
SS.1 Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan Pencarian dan Pertolongan	IKSS.1 Indeks kepuasan masyarakat	SP.1 Meningkatnya kinerja pelaksanaan operasi Pencarian dan Pertolongan	IKSP.1.1 Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan operasi pencarian dan pertolongan	SK.1.1.1 Meningkatnya kepuasan masyarakat pada layanan operasi pencarian dan pertolongan	IKSK.1.1.1.a Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan operasi pencarian dan pertolongan
		SP.4 Meningkatnya kualitas SDM potensi Pencarian dan Pertolongan	IKSP.4.2 Indeks kepuasan masyarakat terhadap pemberdayaan masyarakat Pencarian dan Pertolongan	SK.4.1.1 Meningkatnya peran serta SDM Potensi dalam penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan	IKSK.4.1.1.a Indeks kepuasan masyarakat terhadap pemberdayaan masyarakat pencarian dan pertolongan
		SP.6 Meningkatnya keandalan sistem komunikasi Pencarian dan Pertolongan	IKSP.6.4 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan registrasi alat pemancar sinyal marabahaya (Beacon)	SK.6.4.1 Meningkatnya kepuasan masyarakat pada layanan registrasi alat pemancar sinyal marabahaya (Beacon)	IKSK.6.4.1.a Indeks kepuasan masyarakat pada layanan registrasi alat pemancar sinyal marabahaya (Beacon)

Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja (IKSS)	Sasaran Program (SP)	Indikator Kinerja (IKSP)	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja (IKSS)
SS.2 Meningkatnya efektivitas pelaksanaan operasi Pencarian dan Pertolongan	IKSS.2 Waktu tanggap Pencarian dan Pertolongan	SP.2 Meningkatnya kesiapsiagaan Pencarian dan Pertolongan	IKSP.2.3 Waktu tanggap (response time) pada penanganan operasi pencarian dan pertolongan	SK.2.1.1 Terwujudnya pelaksanaan siaga dan latihan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan	IKSK.2.1.1.b Waktu tanggap (response time) pada penanganan operasi pencarian dan pertolongan
					IKSK.2.2.1.b Persentase dokumen rencana pengembangan dan evaluasi siaga dan latihan yang sudah terlaksana
			IKSP.2.1 Indeks siaga pencarian dan pertolongan	SK.2.1.1 Terwujudnya pelaksanaan siaga dan latihan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan	IKSK.2.1.1.c Indeks pelaksanaan latihan pencarian dan pertolongan
	IKSS.3 Persentase keberhasilan evakuasi korban pada pelaksanaan operasi Pencarian dan Pertolongan	SP.1 Meningkatnya kinerja pelaksanaan operasi Pencarian dan Pertolongan	IKSP.1.3 Persentase keberhasilan evakuasi korban pada pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan	SK.1.2.2 Terwujudnya keterlibatan potensi pencarian dan Pertolongan dalam pelaksanaan operasi Pencarian dan Pertolongan	IKSK.1.2.2.a Persentase pelibatan potensi pencarian dan pertolongan dalam pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan
SK.1.3.1 Terwujudnya keberhasilan evakuasi korban pada pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan				IKSK.1.3.1.a Persentase keberhasilan evakuasi korban pada pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan	
				IKSK.1.3.1.b Persentase keselamatan petugas pencarian dan pertolongan dalam pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan	
					IKSK.1.3.1.c Nilai uji pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan pada kantor pencarian dan pertolongan

Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja (IKSS)	Sasaran Program (SP)	Indikator Kinerja (IKSP)	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja (IKSS)
					IKSK.1.3.1.d Persentase pemenuhan dukungan operasi pencarian dan pertolongan
					IKSK.1.3.1.e Persentase penyusunan dokumen rencana, pengembangan dan evaluasi di bidang operasi pencarian dan pertolongan
					IKSK.1.3.1.f Persentase penyusunan rancangan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang operasi pencarian dan pertolongan
				SK.1.3.2. Meningkatkan Evaluasi Kinerja dan Pengelolaan Kearsipan yang Andal	IKSK.1.3.2.a Nilai SAKIP oleh APIP
					IKSK.1.3.2.b Hasil pengawasan kearsipan internal
			IKSP.1.2 Waktu tempuh (deployment time) pada penanganan operasi pencarian dan pertolongan	SK.1.2.1 Tercapainya waktu tempuh (deployment time) pada penanganan operasi Pencarian dan Pertolongan	IKSK.1.2.1.a Waktu tempuh (deployment time) pada penanganan operasi pencarian dan pertolongan (menit)
SS.3 Meningkatnya keandalan sumber daya Pencarian dan Pertolongan	IKSS.4 Tingkat pemenuhan kebutuhan minimum sumber daya Pencarian dan Pertolongan	SP.5 Meningkatnya keandalan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan	IKSP.5.1 Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan yang sesuai perencanaan dan standar	SK.5.1.1 Meningkatnya perencanaan dan standarisasi sarana dan prasarana yang berkualitas	IKSK.5.1.1.a Persentase pemenuhan sarana pencarian dan pertolongan darat
					IKSK.5.1.1.b Persentase pemenuhan sarana

Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja (IKSS)	Sasaran Program (SP)	Indikator Kinerja (IKSP)	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja (IKSS)
					<p>pencarian dan pertolongan laut</p> <p>IKSK.5.1.1.c Persentase pemenuhan sarana pencarian dan pertolongan udara</p>
					IKSK.5.1.1.d Persentase pemenuhan peralatan pencarian dan pertolongan
					<p>IKSK.5.1.1.e Persentase pemenuhan prasarana pencarian dan pertolongan</p> <p>IKSK.5.1.1.f Jumlah dokumen rencana pengembangan sarana dan prasarana</p> <p>IKSK.5.1.1.g Jumlah norma/ standar/ prosedur sarana dan prasarana yang telah disahkan</p>
			IKSP.5.2 Persentase pemenuhan dukungan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan dalam menunjang operasi Pencarian dan Pertolongan	SK.5.2.1 Meningkatnya kualitas dukungan sarana dan prasarana	<p>IKSK.5.2.1.a Persentase pemenuhan dukungan sarana dan prasarana</p> <p>IKSK.5.2.1.b Persentase penerapan materi pembinaan teknis</p> <p>IKSK.5.2.1.c Jumlah pelaksanaan pengujian sarana</p> <p>IKSK.5.2.1.d Persentase pemenuhan dukungan perbekalan</p>

Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja (IKSS)	Sasaran Program (SP)	Indikator Kinerja (IKSP)	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja (IKSS)
		SP.6 Meningkatnya keandalan sistem komunikasi Pencarian dan Pertolongan	IKSP.6.1 Persentase pemenuhan sistem komunikasi pencarian dan pertolongan yang sesuai perencanaan dan standar	SK.6.1.1 Meningkatnya penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, rencana dan pengembangan serta pemantauan, penilaian, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang sistem komunikasi	IKSK.6.1.1.a Persentase Pemenuhan Peralatan Komunikasi
					IKSK.6.1.1.b Persentase dokumen rencana pengembangan, realisasi dan ketersediaan suku cadang Sistem Komunikasi
					IKSK.6.1.1.c Persentase norma standar prosedur dan petunjuk teknis yang telah disahkan
					IKSK.6.1.1.d Nilai Audit Kearsipan Direktorat Sistem Komunikasi
					IKSK.6.1.1.e Nilai SAKIP oleh APIP
			IKSP.6.2 Persentase pemenuhan dukungan sistem komunikasi pencarian dan pertolongan serta pemenuhan pelaksanaan sertifikasi pemancar sinyal marabahaya dalam menunjang operasi pencarian dan pertolongan	SK.6.2.1 Tercapainya kebijakan dan kegiatan di bidang sistem komunikasi, koordinasi, dan pelaksanaan dukungan komunikasi serta pelaksanaan sertifikasi pemancar sinyal marabahaya	IKSK.6.2.1.a Persentase pemenuhan dukungan sistem komunikasi dalam pelaksanaan kegiatan pencarian dan pertolongan
					IKSK.6.2.1.b Persentase nilai false alert berdasarkan hasil pendeteksian LUT MCC

Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja (IKSS)	Sasaran Program (SP)	Indikator Kinerja (IKSP)	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja (IKSS)
					IKSK.6.2.1.c Jumlah data registrasi dan sertifikasi sinyal marabahaya
	IKSS.5 Tingkat kesiapan sarana prasarana serta sistem komunikasi Pencarian dan Pertolongan	SP.5 Meningkatnya keandalan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan	IKSP.5.3 Persentase kesiapan sarana dan prasarana dalam menunjang keberhasilan tugas Pencarian dan Pertolongan	SK.5.3.1 Meningkatnya keakuratan data inventarisasi dan kualitas pemeliharaan	IKSK.5.3.1.a Persentase kesiapan sarana pencarian dan pertolongan darat
					IKSK.5.3.1.b Persentase kesiapan sarana pencarian dan pertolongan laut
					IKSK.5.3.1.c Persentase kesiapan sarana pencarian dan pertolongan udara
					IKSK.5.3.1.d Persentase kesiapan peralatan pencarian dan pertolongan
					IKSK.5.3.1.e Persentase kesiapan prasarana pencarian dan pertolongan
					IKSK.5.3.1.f Persentase pemutakhiran data inventarisasi sarana dan prasarana
		SP.6 Meningkatnya keandalan sistem komunikasi Pencarian dan Pertolongan	IKSP.6.3 Persentase kesiapan perangkat dan peralatan komunikasi dalam menunjang keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan	SK.6.3.1 Tercapainya kesiapan dan akurasi inventarisasi peralatan komunikasi	IKSK. 6.3.1.a Persentase kualitas pemeliharaan peralatan komunikasi
					IKSK. 6.3.1.b Persentase keakuratan data peralatan komunikasi

Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja (IKSS)	Sasaran Program (SP)	Indikator Kinerja (IKSP)	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja (IKSS)
	IKSS.6 Persentase SDM Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan Potensi yang bersertifikat	SP.3 Meningkatnya kualitas SDM Tenaga Pencarian dan Pertolongan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	IKSP.3.1 Persentase peningkatan pembinaan tenaga, sertifikasi, dan pengelolaan jabatan fungsional	SK.3.1.1 Terwujudnya peningkatan pembinaan tenaga, sertifikasi dan pengelolaan jabatan fungsional	IKSK.3.1.1.a Persentase Tenaga Pencarian dan Pertolongan yang terbina
					IKSK.3.1.1.b Persentase Petugas Pencarian dan Pertolongan yang kompeten dan tersertifikasi
					IKSK.3.1.1.c Indeks Kepuasan Layanan Pengelolaan Jabatan Fungsional Pencarian dan Pertolongan
				SK.3.2.1 Terwujudnya peningkatan pengembangan dan standarisasi tenaga teknis pencarian dan pertolongan	IKSK.3.2.1.a Persentase norma, standar, prosedur dan kriteria tenaga yang ditetapkan
					IKSK.3.2.1.b Persentase dokumen rencana, pengembangan dan evaluasi tenaga pencarian dan pertolongan yang disahkan
		SP.4 Meningkatnya kualitas SDM potensi Pencarian dan Pertolongan	IKSP.4.1 Persentase kenaikan jumlah potensi pencarian dan pertolongan yang terlibat dalam operasi pencarian dan pertolongan	SK.4.1.1 Meningkatnya peran serta SDM Potensi dalam penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan	IKSK.4.1.1.b Persentase kenaikan jumlah potensi yang terlibat dalam operasi pencarian dan pertolongan
				SK.4.2.1 Meningkatnya kualitas norma, standar, kriteria, dan prosedur	IKSK.4.2.1.a Persentase norma, standar, prosedur dan kriteria rencana dan

Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja (IKSS)	Sasaran Program (SP)	Indikator Kinerja (IKSP)	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja (IKSS)
				pemberdayaan masyarakat pencarian dan pertolongan	pengembangan potensi yang tersusun
				SK.4.3.1 Meningkatnya jumlah masyarakat yang antusias terhadap keselamatan diri	IKSK.4.3.1.a Tingkat partisipasi masyarakat yang mengikuti penyuluhan, pemberdayaan masyarakat pencarian dan pertolongan
				SK.3.3.1. Meningkatnya kompetensi teknis ASN serta kompetensi teknis potensi Pencarian dan Pertolongan	IKSK. 3.3.1.a Persentase peserta yang lulus pelatihan peningkatan kompetensi teknis ASN serta kompetensi teknis potensi pencarian dan pertolongan
					IKSK. 3.3.1.b Indeks kepuasan peserta pelatihan terhadap layanan pengelolaan pelatihan peningkatan kompetensi teknis ASN serta kompetensi teknis potensi pencarian dan pertolongan
				SK.3.3.2. Tersedianya norma, standar, prosedur dan kriteria bidang pelatihan kompetensi teknis dan Manajerial ASN serta kompetensi teknis potensi pencarian dan pertolongan	IKSK. 3.3.2.a Persentase dokumen norma, standar, prosedur dan kriteria bidang pelatihan kompetensi teknis dan Manajerial ASN serta kompetensi teknis potensi pencarian dan pertolongan
SS 4 Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)	IKSS.7 Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	SP.7 Meningkatnya profesionalitas ASN Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	IKSP.7.1 Indeks Sistem Merit Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	SK.7.1.1 Meningkatnya kualitas dan kinerja pegawai	IKSK.7.1.1.a Indeks Sistem Merit

Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja (IKSS)	Sasaran Program (SP)	Indikator Kinerja (IKSP)	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja (IKSS)
					IKSK.7.1.1.b Persentase kepuasan pegawai terhadap layanan kepegawaian
				SK.7.1.1. Meningkatnya kompetensi manajerial ASN Pencarian dan Pertolongan	IKSK. 7.1.1.a Persentase peserta yang lulus pelatihan peningkatan kompetensi manajerial ASN pencarian dan pertolongan
					IKSK. 7.1.1.b Indeks kepuasan peserta pelatihan terhadap layanan pengelolaan pelatihan peningkatan kompetensi manajerial ASN pencarian dan pertolongan
		SP.8 Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	IKSP.8.1 Tingkat pemenuhan BMN sesuai RKBMN (%)	SK.8.1.1 Terwujudnya pengelolaan BMN dan pengelolaan kerumahtanggaan yang akuntabel	IKSK.8.1.1.a Persentase kepuasan layanan kesehatan dan layanan umum
					IKSK.8.1.1.b Persentase pengelolaan Barang Milik Negara sesuai peraturan
					IKSK.8.1.1.c Persentase realisasi layanan operasional dan pemeliharaan kantor
					IKSK.8.1.1.d Persentase kepuasan layanan keprotokoleran dan tata usaha pimpinan
				SK.8.2.1 Terwujudnya kualitas layanan	IKSK.8.2.1.a Persentase penyelesaian proses

Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja (IKSS)	Sasaran Program (SP)	Indikator Kinerja (IKSP)	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja (IKSS)
				pengadaan barang/jasa yang profesional	pengadaan barang/jasa sesuai peraturan
				SK.8.1.1 Terwujudnya pengelolaan BMN dan pengelolaan kerumaha tanggaan yang akuntabel	IKSK.8.1.1.e Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur
			IKSP.8.2 Opini BPK-RI atas laporan keuangan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	SK.8.2.2 Terwujudnya pengelolaan keuangan yang akuntabel	IKSK.8.2.2.a Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK-RI dan hasil Audit APIP
					IKSK.8.2.2.b Nilai IKPA Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
					IKSK.8.2.2.c Persentase Penerimaan Negara sesuai dengan peraturan PNPB
					IKSK.8.2.2.d Opini BPK RI atas laporan keuangan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
		SP.9 Meningkatnya kualitas teknologi informasi, pengelolaan data, dan informasi publik Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	IKSP.9.1 Skor Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	SK.9.1.1 Meningkatnya kualitas layanan informasi Pencarian dan Pertolongan	IKSK.9.1.1.a Persentase pelaksanaan kegiatan kehumasan
					IKSK.9.1.1.b Persentase kepuasan terhadap layanan publikasi informasi Pencarian dan Pertolongan
					IKSK.9.1.1.c Skor Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Badan

Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja (IKSS)	Sasaran Program (SP)	Indikator Kinerja (IKSP)	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja (IKSS)
					Nasional Pencarian dan Pertolongan
			IKSP.9.2 Indeks SPBE Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	SK.9.2.1 Tersedianya data dan informasi yang akurat	IKSK.9.2.1.a Persentase pemenuhan data sesuai kesepakatan Forum satu data
					IKSK.9.2.1.b Persentase tersedianya data hasil survei kepuasan masyarakat atas layanan yang akurat
				SK.9.2.2. Meningkatnya ketersediaan teknologi informasi untuk mendukung operasi Pencarian dan Pertolongan	IKSK. 9.2.2.a Nilai Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
					IKSK. 9.2.2.b Persentase kesiapan teknologi informasi dalam mendukung kegiatan operasional
					IKSK. 9.2.2.c Persentase pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung kegiatan operasional
					IKSK. 9.2.2.d Persentase terpenuhinya SDM yang berkualitas
				SK.9.2.3 Meningkatkan kualitas Ketatausahaan Pusdatin	IKSK. 9.2.3.a Persentase pelaksanaan ketatausahaan yang efisien dan akuntabel
		SP.10 Meningkatkan efektivitas regulasi	IKSP.10.1 Persentase Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) bidang	SK.10.1.1 Terwujudnya produk hukum yang berkualitas	IKSK10.1.1.a Persentase NSPK yang ditetapkan

Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja (IKSS)	Sasaran Program (SP)	Indikator Kinerja (IKSP)	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja (IKSS)
		di bidang Pencarian dan Pertolongan	Pencarian dan Pertolongan yang ditetapkan		IKSK10.1.1.b Indeks Kepuasan terhadap layanan produk hukum
			IKSP.10.2 Persentase koordinasi dan perjanjian kerja sama dalam negeri dan luar negeri di bidang pencarian dan pertolongan	SK10.2.1 Meningkatnya kerja sama di bidang Pencarian dan Pertolongan	IKSK.10.2.1.a Persentase kerja sama di bidang pencarian dan pertolongan
					IKSK.10.2.1.b Persentase kerja sama di bidang pencarian dan pertolongan yang ditindaklanjuti
		SP.11 Meningkatnya kualitas kelembagaan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	IKSP.11.1 Nilai SAKIP Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	SK.11.1.1 Meningkatnya evaluasi kelembagaan dalam pengelolaan kinerja dan keuangan	IKSK.11.1.1.a Persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan program dan anggaran pada seluruh Unit Kerja dan UPT di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
					IKSK.11.1.1.b Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan untuk komponen perencanaan kinerja, pengukuran dan pelaporan kinerja
					IKSK.11.1.1.c Nilai atas evaluasi kinerja anggaran
				SK.11.2.1 Meningkatnya kualitas perencanaan lembaga	IKSK.11.2.1.a Persentase anggaran yang masih tercantum dalam catatan halaman IV DIPA (blokir)

Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja (IKSS)	Sasaran Program (SP)	Indikator Kinerja (IKSP)	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja (IKSS)
					IKSK.11.2.1.b Persentase ketepatan waktu pada seluruh Unit Kerja dan UPT dalam menyampaikan dokumen usulan rencana dan program
					IKSP.11.2 Nilai Indeks Reformasi Birokrasi
				SK.8.2.1 Terwujudnya organisasi dan tata laksana yang efektif dan efisien	IKSK8.2.1.a Indeks Kesesuaian Organisasi yang tepat struktur
					IKSK8.2.1.b Persentase Peta Proses Bisnis dengan SOP yang disahkan
					IKSK8.2.1.c Indeks Kepuasan Layanan Fasilitas Reformasi Birokrasi
			IKSP.11.3 Indeks Audit Kearsipan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	SK.11.3.1 Terwujudnya administrasi dan kearsipan yang handal	IKSK.11.3.1.a Persentase unit kerja berpredikat "Baik" dalam pengawasan kearsipan internal
		SP.12 Meningkatnya kualitas pengawasan intern	IKSP.12.1 Tingkat Kapabilitas APIP	SK.12.1.1 Meningkatnya kualitas pengawasan intern	IKSK.12.1.1.a Tingkat kapabilitas APIP
				SK.13.1.1 Meningkatnya sistem pengawasan internal dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif, dan efisien	IKSK.13.1.1.a Persentase rekomendasi APIP yang ditindaklanjuti
					IKSK.13.1.1. b Persentase pendampingan tindak lanjut BPK-RI

Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja (IKSS)	Sasaran Program (SP)	Indikator Kinerja (IKSP)	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja (IKSS)
					IKSK.13.1.1.c Persentase unit kerja dalam mengidentifikasi risiko
					IKSK.13.1.1.d Pendampingan unit kerja dalam pembangunan zona integritas
					IKSK.13.1.1.e Persentase pelaporan wajib lapor LHKPN dan LHKASN
				SK.14.1.1 Meningkatnya dukungan pengawasan intern	IKSK.14.1.1.a Nilai hasil pengawasan kearsipan Inspektorat

#### 4. *Crosscutting* kinerja

*Crosscutting* kinerja merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan kemampuan seseorang atau sebuah unit kerja atau organisasi dalam menjalankan tugas-tugas yang terkait dengan berbagai bidang atau fungsi yang berbeda. Dalam konteks bisnis, *crosscutting* kinerja merujuk pada kemampuan suatu unit kerja atau organisasi dalam mengintegrasikan kegiatan-kegiatan operasionalnya secara efektif dan efisien, sehingga dapat mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. *Crosscutting* kinerja juga penting dalam instansi pemerintah, terutama dalam konteks pengambilan keputusan yang efektif dan pengelolaan sumber daya publik yang lebih baik.

Beberapa contoh *crosscutting* kinerja yang relevan dalam instansi pemerintah meliputi:

##### a. Koordinasi antar lembaga

Instansi pemerintah terdiri dari berbagai lembaga atau departemen yang masing-masing memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda. Namun, seringkali tugas dan tanggung jawab tersebut saling terkait. Oleh karena itu, *crosscutting* kinerja dapat membantu dalam koordinasi antar lembaga dan memastikan bahwa tujuan dan program pemerintah terintegrasi dengan baik.

##### b. Pelaksanaan kebijakan

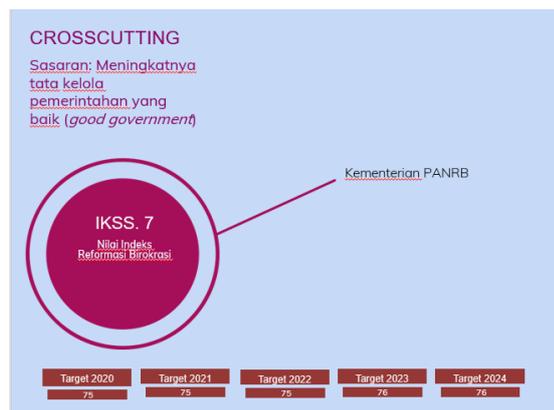
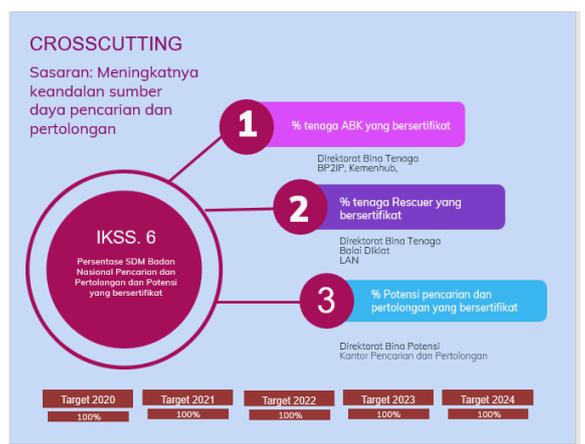
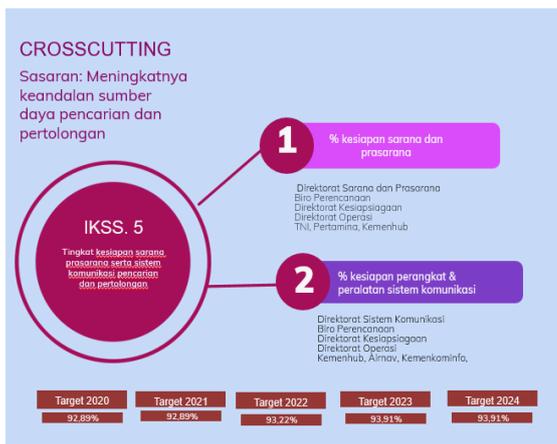
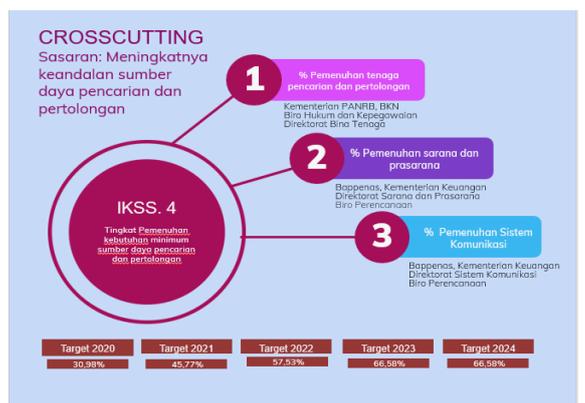
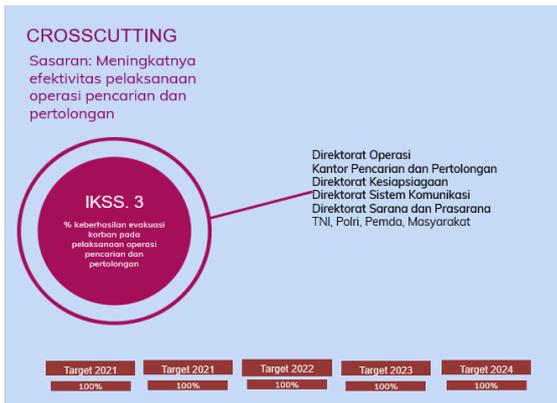
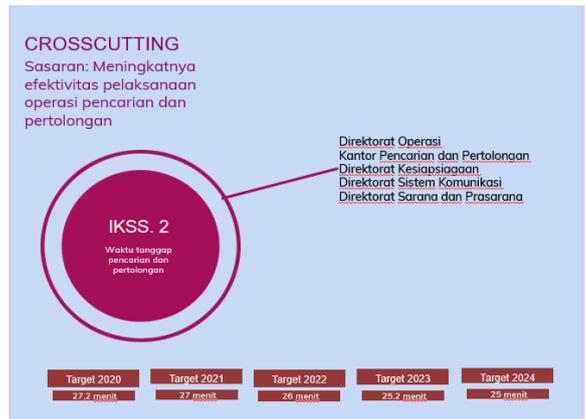
*Crosscutting* kinerja juga penting dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah. Hal ini melibatkan koordinasi antar lembaga, perencanaan yang terintegrasi, dan pengelolaan risiko yang baik.

##### c. Evaluasi kinerja

Evaluasi kinerja adalah proses untuk mengevaluasi pencapaian tujuan pemerintah. *Crosscutting* kinerja dapat membantu untuk memastikan bahwa evaluasi kinerja dilakukan secara holistik dan terintegrasi, sehingga hasilnya dapat memberikan pandangan yang lebih lengkap dan akurat.

Dengan adopsi *crosscutting* kinerja, instansi pemerintah dapat bekerja lebih efektif dan efisien dalam mencapai tujuan mereka, mengelola sumber daya publik yang lebih baik, dan meningkatkan pelayanan publik

kepada masyarakat. Contoh dari *crosscutting* kinerja di yang sudah diterapkan di Basarnas:



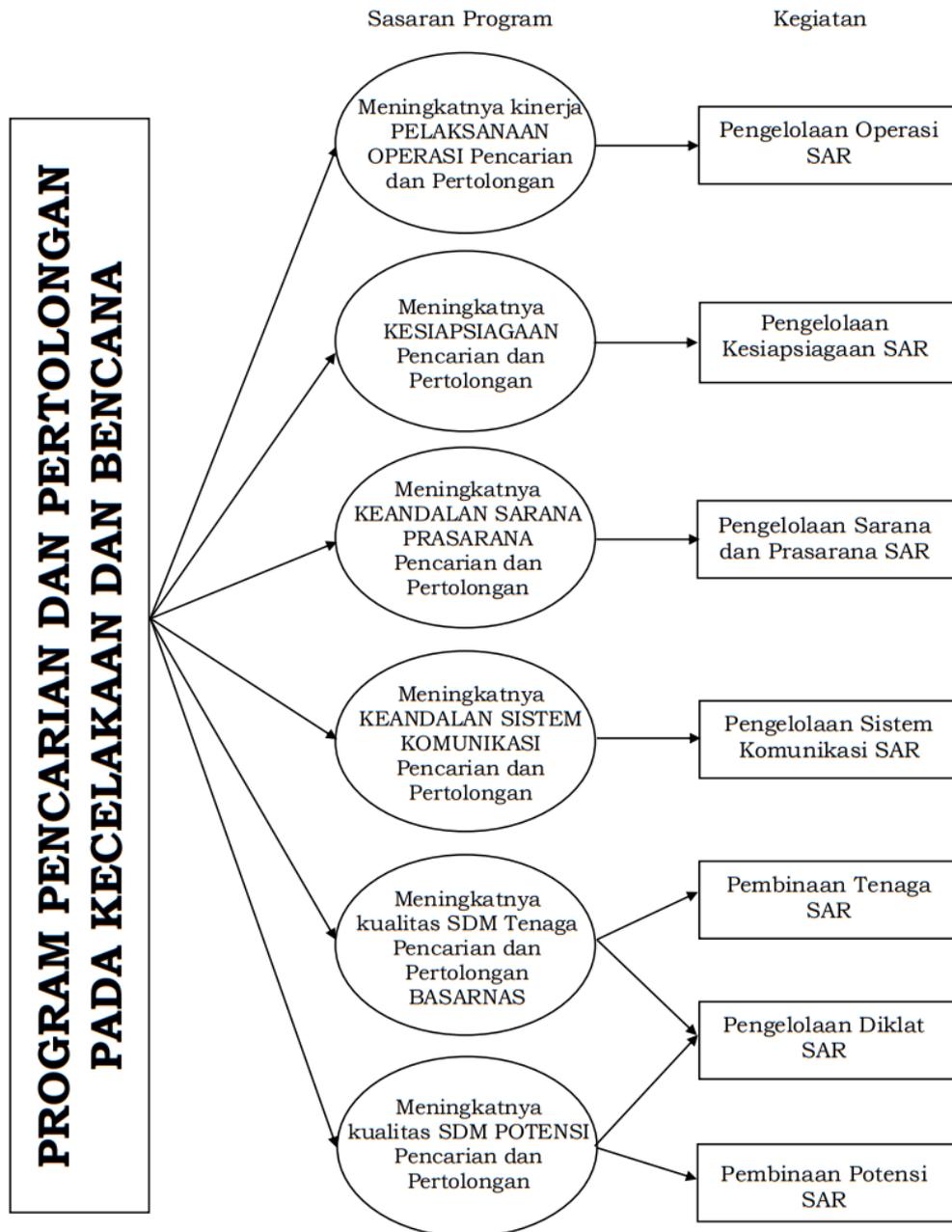
## 5. Program dan Sasaran Program

Untuk memenuhi Sasaran Strategis, Basarnas didukung oleh 2 Program yaitu Program Dukungan Manajemen serta Program Pencarian dan Pertolongan pada kecelakaan bencana. Selanjutnya Basarnas membagi Program tersebut ke dalam Kegiatan. Keterkaitan Program, Sasaran Program dan Kegiatan pada Program Pencarian dan Pertolongan pada Kecelakaan dan Bencana dapat dilihat pada Gambar 2.2. dan untuk Keterkaitan Program, Sasaran Program dan Kegiatan pada Program Dukungan Manajemen. Selanjutnya untuk lebih dalam lagi yaitu Sasaran Kegiatan, Indikator Kegiatan sampai dengan Aktifitas dan Anggaran detail dapat dilihat pada Dokumen SAKIP:

- a. Dokumen-dokumen SAKIP Unit Kerja Eselon 1 (4 Dokumen)
- b. Dokumen-dokumen SAKIP Unit Kerja Eselon 2 (13 Dokumen)
- c. Dokumen-dokumen SAKIP UPT (43 Dokumen)
- d. Dokumen-dokumen SAKIP Balai Pelatihan SDM Pencarian dan Pertolongan (1 Dokumen)

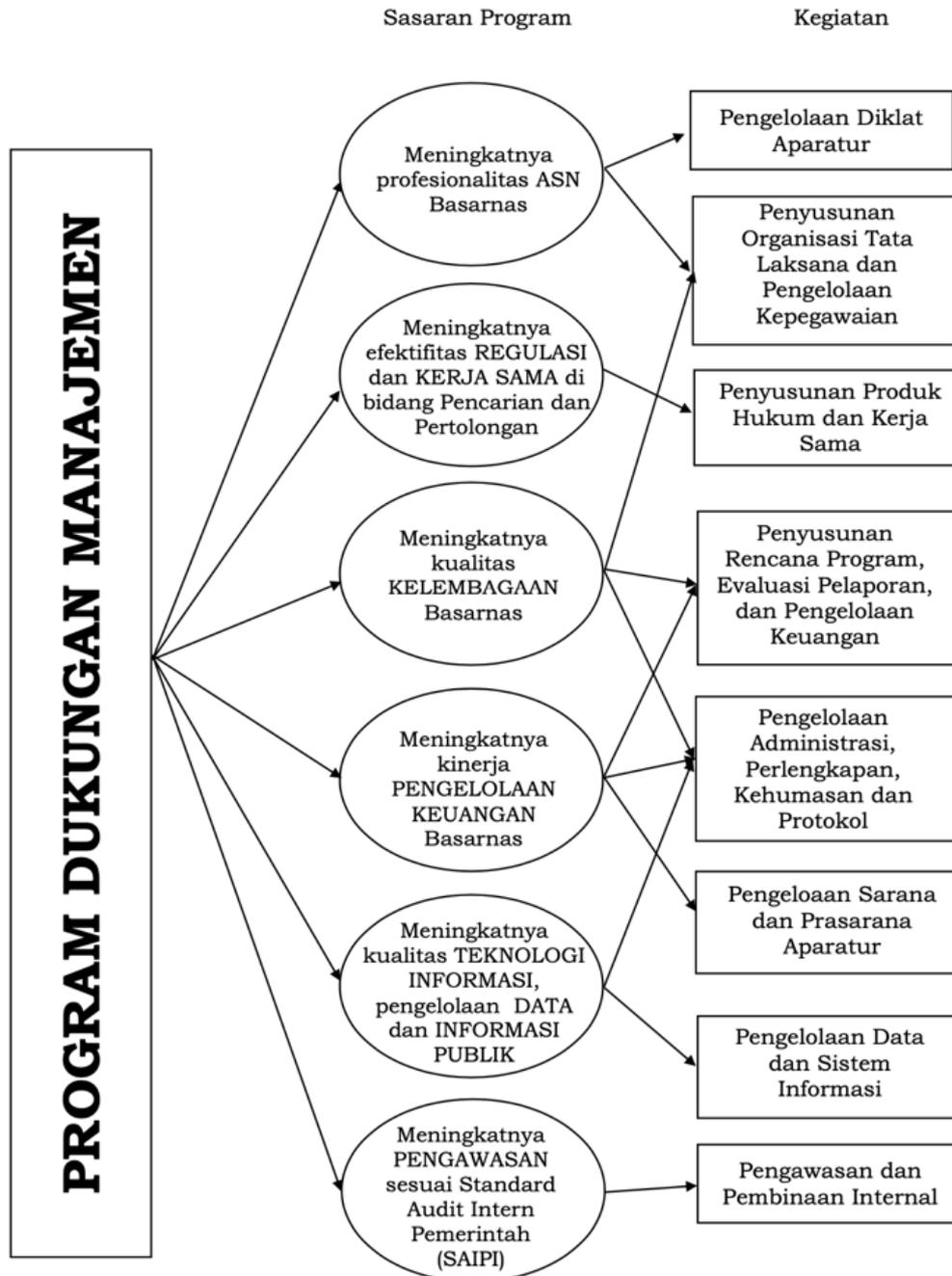
Dokumen SAKIP tersebut akan di *upload* melalui aplikasi Kementerian PANRB <https://esr.menpan.go.id> sesuai tanggal dan waktu yang telah ditetapkan.

Gambar 2.2. Keterkaitan Program, Sasaran Program dan Kegiatan pada Program Pencarian dan Pertolongan pada Kecelakaan dan Bencana



Sumber data: Reviu Rensrta Basarnas 2020-2024

Gambar 2.3. Keterkaitan Program, Sasaran Program dan Kegiatan pada Program Dukungan Manajemen



Sumber data: Reviu Rensrta Basarnas 2020-2024

## B. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Tabel 2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Basarnas

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan Pencarian dan Pertolongan	Indeks kepuasan masyarakat	85,67
2.	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan operasi Pencarian dan Pertolongan	Waktu tanggap Pencarian dan Pertolongan (menit)	25 menit
		Persentase keberhasilan evakuasi korban pada pelaksanaan operasi Pencarian dan Pertolongan (%)	100%
3.	Meningkatnya keandalan sumber daya Pencarian dan Pertolongan	Tingkat pemenuhan kebutuhan minimum sumber daya Pencarian dan Pertolongan (%)	74,34%
		Tingkat kesiapan sarana prasarana serta sistem komunikasi Pencarian dan Pertolongan (%)	93,91%
		Persentase SDM Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan Potensi yang bersertifikat (%)	100%
4.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	76

1. Perjanjian kinerja Kepala Basarnas ini akan diturunkan ke unit kerja di bawahnya mulai dari tingkat Unit Eselon I, Eselon II, Kepala UPT hingga ke JFT/JFU/Pelaksana melalui dialog kinerja. Dialog kinerja diatur oleh masing-masing unit kerja dan UPT. Dialog kinerja ini diharapkan dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja organisasi dan individu, membangun budaya kerja organisasi, mendorong interaksi positif antara atasan dan bawahan, mengidentifikasi potensi/kompetensi pegawai sebagai salah satu alat perencanaan pengembangan pegawai.
2. Perjanjian Kinerja antara para Eselon 1 (para Deputi dan Sestama) dengan Kepala Basarnas sesuai dengan Sasaran Program dan Indikator Program sesuai dengan Rentrasa Basarnas 2020-2024 dapat di lihat pada dokumen SAKIP pada masing masing Unit Kerja di lingkungan Basarnas.
3. Perjanjian Kinerja antara para Eselon 2 (para Direktur dan para Kepala Biro) dengan para Eselon 1 (para Deputi dan Sestama) di atasnya dapat di lihat pada dokumen SAKIP pada masing masing Unit Kerja di lingkungan Basarnas.
4. Perjanjian Kinerja antara para Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan dengan Kepala Basarnas dapat di lihat pada dokumen SAKIP pada masing-masing Kantor Pencarian dan Pertolongan.
5. Perjanjian Kinerja antara Kepala Balai Pelatihan SDM Pencarian dan Pertolongan dengan Kepala Pusat Pelatihan SDM Pencarian dan Pertolongan dapat di lihat pada dokumen SAKIP Kepala Balai Pelatihan SDM Pencarian dan Pertolongan.

### C. Anggaran

Anggaran Tahun 2024 masing-masing program sebagai berikut:

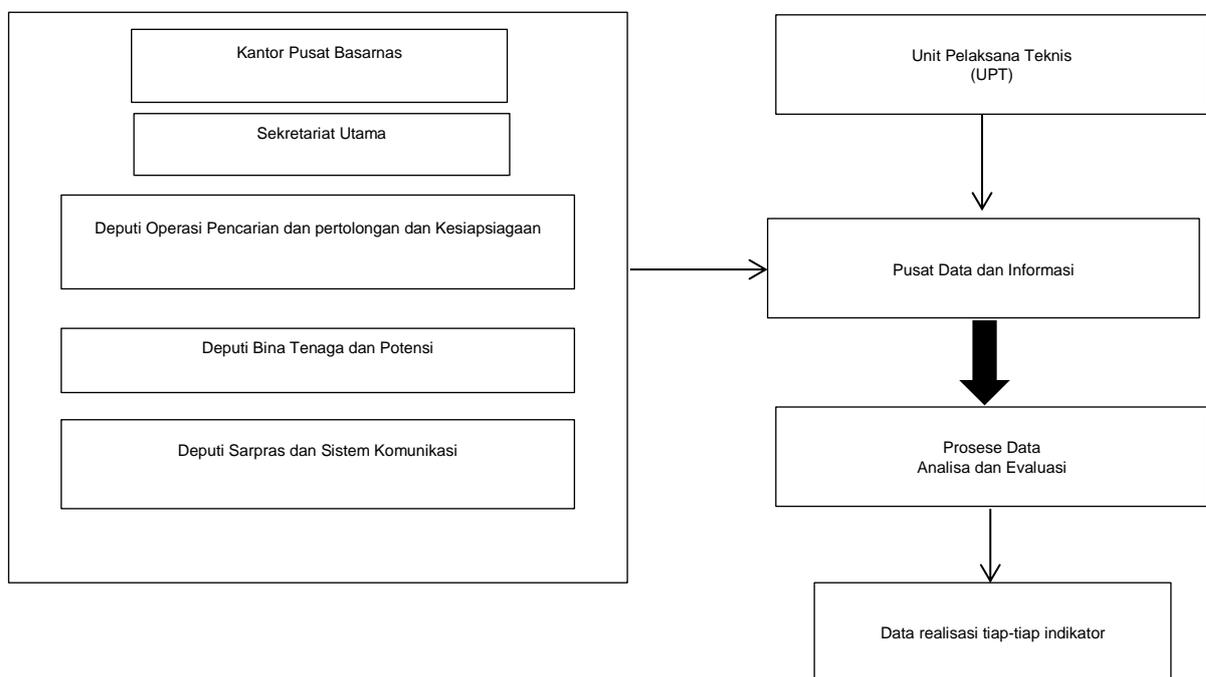
1. Program Dukungan manajemen	Rp912.636.767.000,-
2. Program pencarian, pertolongan pada kecelakaan dan bencana	Rp1.188.736.260.000,-
<b>Total</b>	<b>Rp2.101.373.027.000,-</b>

### BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA

Pada Bab ini dijabarkan capaian kinerja Basarnas Tahun 2024. Pelaporan kinerja ini menyajikan pengukuran kinerja atas perencanaan kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Pengukuran capaian kinerja Basarnas Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara Target (rencana) dan Realisasi dari tiap-tiap indikator. Pencatatan dan pengumpulan data diperoleh dari seluruh Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Basarnas, baik data administratif maupun data teknis. Data-data tersebut kemudian dianalisa dan dievaluasi sehingga didapatkan data realisasi dari indikator yang telah ditetapkan. Berikut adalah mekanisme pengumpulan data kinerja Basarnas.

Gambar 3.1. Mekanisme Pengumpulan Data Kinerja Basarnas



## A. Capaian Kinerja Basarnas

Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, disebutkan bahwa setiap pernyataan kinerja sasaran dilakukan analisis sebagai berikut:

### 1. Sasaran Strategis “Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan Pencarian dan Pertolongan”

Sasaran Strategis “Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan Pencarian dan Pertolongan” didukung oleh satu indikator kinerja yaitu **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**. Indikator ini dihitung untuk menilai tingkat kualitas layanan pencarian dan pertolongan, layanan pembinaan potensi, dan layanan registrasi alat pemancar sinyal mara bahaya (*beacon*). Pada Tabel 3.1. dapat dilihat hasil survei kepuasan masyarakat terhadap layanan pencarian dan pertolongan selama tahun 2024. Tabel 3.2 menyajikan perbandingan target dan realisasi IKM pada tahun 2024, dan Tabel 3.3. menyajikan perbandingan IKM tahun 2024 dengan tahun sebelumnya.

Tabel 3.1. Tabel Hasil Survei Kepuasan Masyarakat terhadap layanan pencarian dan pertolongan pada tahun 2024

Survei Kepuasan	Nilai IKM
Layanan operasi pencarian dan pertolongan	92,22
Layanan pembinaan potensi pencarian dan pertolongan	88,61
Registrasi alat pemancar sinyal mara bahaya (Beacon)	90,76
<b>Nilai IKM terhadap layanan pencarian dan pertolongan Tahun 2024</b>	<b>90,78</b>

Sumber data: Pusdatin, Direktorat Operasi, Direktorat Bina Potensi, dan Direktorat Siskom

Tabel 3.2. Membandingkan Target dengan Realisasi IKM Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan Pencarian dan Pertolongan	Indeks kepuasan masyarakat	85,67	90,78	105,96%

Tabel 3.3. Perbandingan Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2024 dengan tahun sebelumnya

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)
Indeks Kepuasan Masyarakat	2021	83,67	88,12	105,31%
	2022	84,67	88,76	104,83%
	2023	85,33	89,23	104,57%
	2024	85,67	90,78	105,96%

Sumber data: Laporan Kinerja Basarnas 2023

Dari uraian di atas dapat dilihat capaian indikator kinerja pendukung Sasaran Strategis "Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan pencarian dan pertolongan" dapat dilihat mengalami peningkatan capaian kinerjanya apabila dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan adanya kegiatan yang mendukung tercapainya target indikator diantaranya yaitu:

- a. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;
- b. Pelaksanaan pelatihan Potensi SAR;
- c. Pelaksanaan layanan registrasi *beacon*;

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Peraturan Menteri PANRB) Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), disebutkan kategori IKM yaitu:

- a. 76,61 – 100,00 : Sangat Baik
- b. 62,51 – 76,60 : Baik
- c. 50,00 – 62,50 : Kurang Baik
- d. 25,00 – 49,99 : Tidak Baik

Pada Tabel 3.2. dapat dilihat realisasi indikator kinerja “Indeks kepuasan masyarakat” apabila dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan oleh Kementerian PANRB maka memiliki kategori “Sangat Baik”.

## 2. Sasaran Strategis “Meningkatnya Efektivitas Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan”

Sasaran Strategis “Meningkatnya Efektivitas Pelaksanaan operasi Pencarian dan Pertolongan” didukung oleh 2 indikator kinerja yaitu:

- a. Waktu Tanggap Pencarian dan Pertolongan.

Indikator kinerja ini menghitung waktu yang diperlukan dari terima berita dinyatakan valid sampai dengan *Search and Rescue Unit* (SRU) siap berangkat menuju lokasi (waktu berangkat dikurangi dengan waktu terima berita dinyatakan valid). Berikut ini rumus capaian waktu tanggap:

$$\% \text{ capaian waktu tanggap} = \frac{(2 \times \text{Target}) - \text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

“Semakin tinggi realisasi (waktu) menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah, atau sebaliknya jika realisasi

Adapun waktu tanggap pencarian dan pertolongan dari seluruh Kantor SAR pada 5 jenis kecelakaan dapat dilihat pada Tabel 3.4. di bawah ini.

Tabel 3. 4. Waktu Tanggap Pencarian dan Pertolongan Tahun 2024

NO	KANTOR SAR	PESAWAT UDARA			KAPAL			BENCANA			KONDISI MEMBAHAYAKAN MANUSIA			LAKA PENANGANAN KHUSUS (KPK)			TOTAL		
		OPS SAR	TOTAL RESPON TIME	RATA-RATA RESPON TIME	OPS SAR	TOTAL RESPON TIME	RATA-RATA RESPON TIME	OPS SAR	TOTAL RESPON TIME	RATA-RATA RESPON TIME	OPS SAR	TOTAL RESPON TIME	RATA-RATA RESPON TIME	OPS SAR	TOTAL RESPON TIME	RATA-RATA RESPON TIME	OPS SAR	TOTAL RESPON TIME	RATA-RATA RESPON TIME
1	BANDA ACEH	-	-	-	30	486	16,20	6	99	16,50	40	631	15,78	3	46	15,33	79	1.262	15,97
2	MEDAN	-	-	-	22	445	20,23	7	130	18,57	67	1.314	19,61	3	55	18,33	99	1.944	19,64
3	PADANG	-	-	-	12	182	15,17	13	233	17,92	39	644	16,51	1	10	10,00	65	1.069	16,45
4	PEKANBARU	-	-	-	25	425	17,00	4	76	19,00	38	633	16,66	-	-	-	67	1.134	16,93
5	JAMBI	-	-	-	7	107	15,29	3	39	13,00	18	383	21,28	-	-	-	28	529	18,89
6	BENGKULU	-	-	-	13	187	14,38	2	25	12,50	21	293	13,95	-	-	-	36	505	14,03
7	PALEMBANG	-	-	-	21	320	15,24	8	125	15,63	50	775	15,50	-	-	-	79	1.220	15,44
8	LAMPUNG	-	-	-	17	215	12,65	6	87	14,50	42	610	14,52	1	5	5,00	66	917	13,89
9	TANJUNG PINANG	-	-	-	22	327	14,86	1	20	20,00	15	224	14,93	-	-	-	38	571	15,03
10	PANGKAL PINANG	-	-	-	27	500	18,52	1	18	18,00	16	288	18,00	1	12	12,00	45	818	18,18
11	NATUNA	-	-	-	8	97	12,13	-	-	-	5	54	10,80	-	-	-	13	151	11,62
12	MENTAWAI	-	-	-	19	290	15,26	-	-	-	7	124	17,71	-	-	-	26	414	15,92
13	BANTEN	-	-	-	8	131	16,38	2	40	20,00	28	523	18,68	-	-	-	38	694	18,26
14	JAKARTA	1	14	14,00	21	306	14,57	7	99	14,14	96	1.370	14,27	1	13	13,00	126	1.802	14,30
15	BANDUNG	-	-	-	10	152	15,20	7	123	17,57	69	1.008	14,61	4	40	10,00	90	1.323	14,70
16	SEMARANG	-	-	-	20	304	15,20	10	138	13,80	123	1.794	14,59	17	197	11,59	170	2.433	14,31
17	SURABAYA	-	-	-	35	730	20,86	7	123	17,57	97	1.853	19,10	3	3	1,00	142	2.709	19,08
18	YOGYAKARTA	-	-	-	6	60	10,00	-	-	-	46	463	10,07	21	176	8,38	73	699	9,58
19	DENPASAR	1	5	5,00	18	345	19,17	-	-	-	56	1.038	18,54	-	-	-	75	1.388	18,51
20	MATARAM	-	-	-	16	295	18,44	2	33	16,50	31	542	17,48	1	12	12,00	50	882	17,64
21	KUPANG	-	-	-	11	223	20,27	-	-	-	12	217	18,08	-	-	-	23	440	19,13
22	MAUMERE	-	-	-	25	475	19,00	2	40	20,00	22	424	19,27	-	-	-	49	939	19,16
23	PONTIANAK	-	-	-	33	512	15,52	2	35	17,50	53	1.156	21,81	-	-	-	88	1.703	19,35
24	BALIKPAPAN	-	-	-	21	362	17,24	2	30	15,00	46	723	15,72	1	15	15,00	70	1.130	16,14
25	BANJARMASIH	-	-	-	22	373	16,95	2	37	18,50	45	786	17,47	-	-	-	69	1.196	17,33

NO	KANTOR SAR	PESAWAT UDARA			KAPAL			BENCANA			KONDISI MEMBAHAYAKAN MANUSIA			LAKA PENANGANAN KHUSUS (KPK)			TOTAL		
		OPS SAR	TOTAL RESPON TIME	RATA-RATA RESPON TIME	OPS SAR	TOTAL RESPON TIME	RATA-RATA RESPON TIME	OPS SAR	TOTAL RESPON TIME	RATA-RATA RESPON TIME	OPS SAR	TOTAL RESPON TIME	RATA-RATA RESPON TIME	OPS SAR	TOTAL RESPON TIME	RATA-RATA RESPON TIME	OPS SAR	TOTAL RESPON TIME	RATA-RATA RESPON TIME
26	MANADO	-	-	-	16	340	21,25	2	48	24,00	45	2.388	53,07	1	19	19,00	64	2.795	43,67
27	GORONTALO	1	15	15,00	19	291	15,32	5	80	16,00	16	230	14,38	1	10	10,00	42	626	14,90
28	PALU	-	-	-	38	829	21,82	8	153	19,13	33	630	19,09	-	-	-	79	1.612	20,41
29	MAKASSAR	-	-	-	46	682	14,83	8	102	12,75	48	733	15,27	-	-	-	102	1.517	14,87
30	KENDARI	-	-	-	31	534	17,23	3	44	14,67	40	604	15,10	-	-	-	74	1.182	15,97
31	AMBON	-	-	-	55	1.050	19,09	-	-	-	17	310	18,24	-	-	-	72	1.360	18,89
32	TERNATE	1	5	5,00	28	358	12,79	2	25	12,50	10	124	12,40	-	-	-	41	512	12,49
33	SORONG	-	-	-	22	486	22,09	3	43	14,33	7	131	18,71	-	-	-	32	660	20,63
34	MANOKWARI	-	-	-	7	140	20,00	3	54	18,00	8	152	19,00	-	-	-	18	346	19,22
35	BIAK	1	10	10,00	15	277	18,47	-	-	-	5	92	18,40	-	-	-	21	379	18,05
36	JAYAPURA	-	-	-	7	121	17,29	-	-	-	17	249	14,65	-	-	-	24	370	15,42
37	TIMIKA	-	-	-	20	381	19,05	1	18	18,00	5	93	18,60	-	-	-	26	492	18,92
38	MERAUKE	-	-	-	11	200	18,18	2	20	10,00	6	75	12,50	-	-	-	19	295	15,53
39	NIAS	-	-	-	14	238	17,00	4	75	18,75	17	299	17,59	-	-	-	35	612	17,49
40	CILACAP	1	4	4,00	14	194	13,86	6	115	19,17	64	1.052	16,44	2	20	10,00	87	1.385	15,92
41	TARAKAN	1	10	10,00	5	86	17,20	1	15	15,00	6	85	14,17	-	-	-	13	196	15,08
42	PALANG KARAYA	-	-	-	29	466	16,07	2	40	20,00	34	595	17,50	4	48	12,00	69	1.149	16,65
43	MAMUJU	-	-	-	22	356	16,18	2	30	15,00	14	233	16,64	-	-	-	38	619	16,29
Jumlah		7	63	9,00	868	14.878	17,14	146	2.412	16,52	1.474	25.945	17,60	65	681	10,48	2.560	43.979	17,18

Sumber data: Direktorat Operasi

Dari tabel di atas dapat dilihat realisasai waktu tanggap Tahun 2024 sebesar 17,18 menit atau 131,28% dari target sebesar 25 menit. Berikut ini perbandingan realisasi waktu tanggap Tahun 2024:

Tabel 3.5. Perbandingan Target dengan Realisasi Waktu Tanggap Pencarian dan Pertolongan Tahun 2024.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Waktu tanggap pencarian dan pertolongan	25 menit	17,18 menit	131,28%

Tabel 3.6. Perbandingan Waktu Tanggap Pencarian dan Perolongan Tahun 2024 dengan tahun sebelumnya.

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)
Waktu tanggap pencarian dan pertolongan	2020	27,2 menit	16,29 menit	140,11%
	2021	27 menit	18,07 menit	133,07%
	2022	26 menit	23,52 menit	109,54%
	2023	25,2 menit	16,40 menit	134,92%
	2024	25 menit	17,18 menit	131,28%

Sumber data: Laporan Kinerja 2023 Basarnas

Dari Tabel 3.6. dapat dilihat bahwa capaian pada indikator kinerja Waktu Tanggap Pencarian dan Pertolongan mengalami peningkatan. Hal tersebut dikarenakan beberapa faktor diantaranya:

- 1) Pelaksanaan siaga 24 jam baik di Kantor SAR maupun di Kantor Pusat Basarnas;
- 2) Pelaksanaan pemeliharaan peralatan sistem komunikasi secara rutin untuk menjaga kesiapan peralatan sistem komunikasi;
- 3) Pelaksanaan pemeliharaan sarana SAR secara rutin untuk menjaga kesiapan sarana ketika akan digunakan untuk operasi pencarian dan pertolongan;
- 4) Pelaksanaan koordinasi baik dengan instansi maupun Potensi SAR.

- b. Persentase Keberhasilan Evakuasi Korban pada Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan (%).

Indikator kinerja ini menghitung korban dalam kondisi selamat maupun meninggal dunia pada kecelakaan pesawat, kecelakaan kapal, kondisi membahayakan manusia dan bencana. Rumus Persentase keberhasilan evakuasi korban:

$$\begin{aligned} & \% \text{ keberhasilan evakuasi korban} \\ & = \frac{(\sum \text{korban selamat} + \sum \text{korban meninggal})}{\text{Total} \sum \text{korban (selamat, meninggal, hilang)}} \times 100\% \end{aligned}$$

Pada Tabel 3.7 disajikan data operasi pencarian dan pertolongan yang ditangani Basarnas selama Tahun 2024:

Tabel 3.7. Jumlah korban yang terevakuasi selama penanganan operasi pencarian dan pertolongan selama Tahun 2024

NO	JENIS KECELAKAAN	JUMLAH KEJADIAN (KALI)	JUMLAH KORBAN (ORANG)	STATUS KORBAN						PERSENTASE HASIL OPERASI SAR (%)
				S	(%)	MD	(%)	H	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	PESAWAT UDARA	7	67	56	83,58	11	16,42	-	-	100
2	KAPAL	868	6.252	5.599	89,56	350	5,60	303	4,85	95,15
3	BENCANA	146	31.487	31.170	98,99	282	0,90	35	0,11	99,89
4	KMM	1474	2.349	999	42,53	1.186	50,49	164	6,98	93,02
5	KECELAKAAN KHUSUS	65	393	338	86,01	55	13,99	-	-	100
<b>JUMLAH &amp; PRESENTASE TAHUN 2024</b>		<b>2.560</b>	<b>40.548</b>	<b>38.162</b>	<b>94,12</b>	<b>1.884</b>	<b>4,65</b>	<b>502</b>	<b>1,24</b>	<b>98,76</b>

Sumber data: Direktorat Operasi

Dari Tabel 3.7. dapat dilihat capaian “Persentase Keberhasilan Evakuasi Korban pada Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan” Tahun 2024

sebesar 98,76%. Sedangkan perbandingan target dengan realisasi Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 3.8. sebagai berikut:

Tabel 3.8. Perbandingan Target dengan Realisasi Persentase Keberhasilan Evakuasi Korban pada pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase keberhasilan evakuasi korban pada pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan	100%	98,76%	98,76%

Tabel 3.9. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja “Persentase Keberhasilan Evakuasi Korban pada Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan” Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase keberhasilan evakuasi korban pada pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan	2020	100%	99,18%	99,18%
	2021	100%	98,64%	98,64%
	2022	100%	99,35%	99,35%
	2023	100%	98,20%	98,20%
	2024	100%	98,76%	98,76%

Sumber data: Laporan Kinerja Basarnas 2023

Dari Tabel 3.9 di atas dapat dilihat bahwa capaian indikator kinerja “Persentase Keberhasilan Evakuasi Korban pada Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan” Tahun 2024 target tidak tercapai atau capaian kurang dari 100%. Hal yang menyebabkan target tidak tercapai antara lain adalah:

- 1) Masih kurangnya tenaga di lapangan (*rescuer*), sehingga menyebabkan proses evakuasi korban tidak maksimal;
- 2) Masih kurangnya kompetensi tenaga lapangan sehingga perlu diberikan diklat lanjutan secara berkala;
- 3) Kesiapan sarana yang kurang optimal;
- 4) Masih kurangnya sarana untuk mendukung pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;
- 5) Lokasi kejadian kecelakaan/bencana yang sulit dijangkau sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk tiba ke lokasi.

Pada indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis “Meningkatnya Efektivitas Pelaksanaan operasi Pencarian dan Pertolongan” perbandingan dengan standar nasional tidak ada, hal ini dikarenakan Basarnas merupakan instansi satu-satunya yang bergerak dibidang pencarian dan pertolongan.

### 3. Sasaran Strategis “Meningkatnya keandalan sumber daya Pencarian dan Pertolongan”

Sasaran Strategis “Meningkatnya Keandalan Sumber Daya Pencarian dan Pertolongan” didukung oleh 3 indikator kinerja, yaitu:

a. Indikator Kinerja “Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Minimum Sumber Daya Pencarian dan Pertolongan (%)”.

Indikator Kinerja ini mengukur rata-rata persentase pemenuhan kebutuhan minimal tenaga pencarian dan pertolongan, sarana dan prasarana, serta sistem komunikasi Basarnas.

1) Pemenuhan Kebutuhan Minimal Tenaga Pencarian dan Pertolongan.

Tenaga pencarian dan pertolongan meliputi petugas pencarian dan pertolongan (*rescuer*), awak sarana air pencarian dan pertolongan, awak sarana udara pencarian dan pertolongan, awak sarana darat pencarian dan pertolongan, operator komunikasi pencarian dan pertolongan, teknisi komunikasi pencarian dan pertolongan, tenaga medis pencarian dan pertolongan, tenaga keperawatan pencarian dan pertolongan serta

instruktur pencarian dan pertolongan. Pada tahun 2024 pemenuhan tenaga pencarian dan pertolongan masih jauh dari jumlah akan pemenuhan kebutuhan SDM Basarnas. Tabel 3.10 menyajikan kebutuhan Pegawai di Basarnas Tahun 2020-2024.

Tabel 3.10. Kebutuhan Pegawai Basarnas Tahun 2020 – 2024

No.	Jabatan	Kebutuhan SDM	Kondisi Desember 2024
1.	Jabatan Pimti, Administrator dan Pengawas	155	151
2.	Nahkoda Kapal	79	58
3.	Tenaga ABK	1.154	462
3.	Jabatan Pelaksana (Eselon V)	57	58
4.	Jabatan Pelaksana selain ABK	2.618	570
5.	Jabatan Fungsional Pranata Pencarian dan Pertolongan	21.312	2.012
6.	Jabatan Fungsional Lainnya selain Pranata Pencarian dan Pertolongan	3.322	649
<b>Jumlah</b>		<b>28.687</b>	<b>3.960</b>

Sumber data: Biro Kepegawaian dan Organisasi Tata Laksana

**Keterangan:**

- ✓ Jabatan Pelaksana selain ABK maksudnya jabatan fungsional umum;
- ✓ Jabatan Fungsional lainnya selain Pranata Pencarian dan Pertolongan maksudnya jabatan fungsional tertentu.

2) Pemenuhan Sarana dan Prasarana

Pemenuhan sarana dan prasaran ini berdasarkan perhitungan persentase pemenuhan sarana SAR laut, sarana SAR darat, sarana SAR udara dan Persentase pemenuhan prasarana SAR.

Tabel 3.11. Pemenuhan Sarana Pencarian dan Pertolongan Laut

No	Sarana Laut	Pemenuhan 2024			Akumulasi Pemenuhan sarana s.d. 2024		
		Target Pemenuhan	Jumlah terpenuhi Tahun 2024	Capaian (%)	Total pemenuhan s.d. 2024	Standar kebutuhan sarana	Persentase (%)
1	Kapal penyelamatan (Rescue Boat) Klas 1	0	0	100	7	5	140
2	Kapal penyelamatan (Rescue Boat) Klas 2	0	0	100	6	86	36,04
3	Rigid Inflatable Boat (RIB) kelas 1	16	16	100	34	209	37,32
4	Rigid Inflatable Boat (RIB) kelas 2	0	0	100	12	209	37,32
5	Landing Craft Rubber	40	40	100	642	1.240	51,77
6	Rafting Boat	0	0	100	303	503	23,85
7	Jet Ski Penyelamatan (Rescue Water Craft)	5	5	100	39	323	12,07
8	Double Stabilizer Boat	0	0	100	16	16	100
9	Polyethylene boat	0	0	100	20	45	44,44
<b>Capaian pemenuhan sarana pencarian dan pertolongan laut 2024</b>				<b>121</b>	<b>Persentase akumulasi pemenuhan sarana pencarian dan pertolongan laut s.d 2024</b>		<b>46,77%</b>

Sumber data: Laporan Kinerja Triwulan IV 2024 Deputi Sarana dan Prasarana dan Sistem Komunikasi

Tabel 3.12. Pemenuhan Sarana Pencarian dan Pertolongan Darat

No.	Sarana Darat	Akumulasi Pemenuhan Sarana s.d. 2024		
		Total Pemenuhan s.d. 2024	Standar kebutuhan sarana	Persentase (%)
1	Rescue Truk Tipe I	48	91	52,74
2	Rescue Truk Tipe II	193	336	57,44
3	Rescue Car Tipe 1	96	214	45,32
4	Rescue Car Tipe 2	210	336	62,5
5	Rescue Excavator	10	45	22,22
6	Rescue Motorcycle	384	759	58,31
<b>Rata-rata persentase pemenuhan sarana pencarian dan pertolongan darat</b>				<b>39,02</b>

Sumber data: Laporan Kinerja Triwulan IV 2024 Deputi Sarana dan Prasarana dan Sistem Komunikasi

Tabel 3.13. Realisasi Pemenuhan Sarana Pencarian dan Pertolongan Udara

No	Sarana Udara	Pemenuhan 2024			Akumulasi Pemenuhan sarana s.d. 2024		
		Target Pemenuhan	Jumlah terpenuhi Tahun 2024	Capaian (%)	Total pemenuhan s.d. 2024	Standar kebutuhan sarana	Persentase (%)
1	Fix Wing	-	-	-	0	3	0
2	Rotary Wing Medium	-	-	-	6	12	50
<b>Persentase akumulasi pemenuhan sarana pencarian dan pertolongan udara s.d 2024</b>							<b>25</b>

Sumber data: Laporan Kinerja Triwulan IV 2024 Deputi Sarana dan Prasarana dan Sistem Komunikasi

Tabel 3.14. Pemenuhan Prasarana Pencarian dan Pertolongan

Indikator Kinerja	Target 2024 (%)	Realisasi 2024 (%)	Capaian 2024
Persentase Pemenuhan Prasarana Pencarian dan Pertolongan	27,01	27,01	100

Sumber data: Laporan Kinerja Triwulan IV 2024 Deputi Sarana dan Prasarana dan Sistem Komunikasi

### 3) Pemenuhan Sistem Komunikasi

Pada indikator ini persentase pemenuhan peralatan komunikasi dihitung berdasarkan kebutuhan ideal sistem komunikasi untuk Kantor Pusat, Kantor dan Pos Pencarian dan Pertolongan, sarana laut serta sarana udara yang dimiliki oleh Basarnas, akan tetapi bergantung pada alokasi anggaran yang diberikan pemerintah melalui APBN ke Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan berdasarkan hasil perhitungan terhadap indikator persentase pemenuhan peralatan komunikasi, realisasi *outcome* kegiatan ini sampai dengan triwulan IV sebesar 51.86% dari target tahunan 51.70%.

Pada Triwulan IV 2025 muncul kegiatan belanja modal baru, hal ini dikarenakan adanya kebutuhan organisasi dan sisa belanja modal sehingga disusun menjadi belanja modal berikutnya. Kebutuhan yang dimaksud adalah hasil evaluasi latihan dan operasi pada tahun sebelumnya dan tahun berjalan. Kegiatan tersebut adalah Pengadaan Proteksi Petir Meolut dan Pengadaan *Tactical Field Operation Communication System*. Adapun perhitungan capaian kinerjanya dan progres kegiatannya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.15. Pemenuhan Peralatan Sistem Komunikasi  
Pencarian dan Pertolongan

No.	Peralatan Komunikasi	Target Pemenuhan	Realisasi Pemenuhan 2024	Capaian %	Pembo botan	Nilai %
1	Pengembangan sistem pemantauan sinyal mara bahaya Cospas Sarsat	6	6	100%	0,1	10
2	Pengembangan sistem pemantauan kecelakaan transportasi udara	53	22	41,51%	0,1	4,15
3	Pengembangan peralatan Digital Mobile Radio VHF	279	127	42,76%	0,1	5,65
4	Pengembangan base communication system	115	65	56,52%	0,1	5,65
5	Pengembangan peralatan komunikasi satelit WiFi Marine	77	52	67,53%	0,1	6,75
6	Pengembangan Peralatan Push-to-Talk Over Cellular	750	250	33,33%	0,1	3,33
7	Pengembangan Communication Mobile Vehicle	46	20	43,48%	0,1	4,35
8	Peralatan Direction Finder	54	44	81,48%	0,05	4,07
9	Peralatan Manpack Radio HF	155	71	45,81%	0,005	2,29

10	Peralatan Komunikasi Bawah Air	45	10	22,22%	0,05	1,11
11	Pengembangan Operation Room for SAR office	43	1	2,33%	0	0,00
12	Pengembangan Tactical Field Operation Communication System	46	8	17,39%	0,05	0,87
13	Training Kit Communication System	3	0	0,00%	0,05	0,00
14	Peralatan Komunikasi Berbasis Satelit	3	3	100%	0,05	5,00
<b>Total</b>						<b>51,86%</b>

Sumber data: Laporan Kinerja Triwulan IV 2024 Deputi Sarana dan Prasarana dan Sistem Komunikasi

Tabel 3.16. Persentase Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Minimum Sumber Daya Pencarian dan Pertolongan Tahun 2024

No.	Uraian	Realisasi
1	Pemenuhan tenaga Pencarian dan Pertolongan	13,80%
2	Pemenuhan Sarana dan Prasarana	36,40%
3	Pemenuhan Peralatan Sistem Komunikasi	51,86%
<b>Persentase Pemenuhan kebutuhan minimum sumber daya pencarian dan pertolongan</b>		<b>34,02%</b>

Sumber data: Biro Kepegawaian dan Ortala, Direktorat Sarpras, Direktorat Siskom

Tabel 3.17. Perbandingan Target dengan Realisasi Persentase Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Minimum Sumber Daya Pencarian dan Pertolongan Tahun 2024

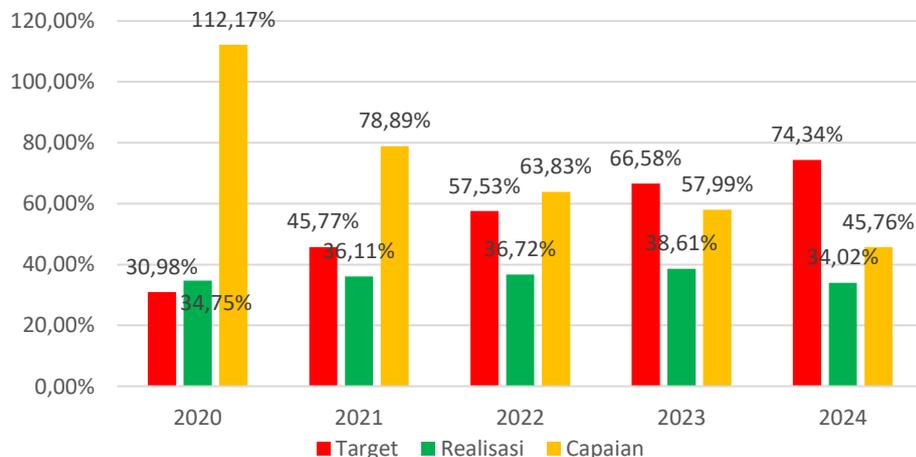
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase Pemenuhan Kebutuhan Minimum Sumber Daya Pencarian dan Pertolongan	74,34%	34,02%	45,76%

Tabel 3.18. Perbandingan Target dengan Realisasi Persentase Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Minimum Sumber Daya Pencarian dan Pertolongan Tahun 2024 dengan tahun sebelumnya.

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Minimum Sumber Daya Pencarian dan Pertolongan	2020	30,98%	34,75%	112,17%
	2021	45,77%	36,11%	78,89%
	2022	57,53%	36,72%	63,83%
	2023	66,58%	38,61%	57,99%
	2024	74,34%	34,02%	45,76%

Sumber data: Laporan Kinerja 2023 Basarnas

Grafik 3.1. Perbandingan Persentase Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Minimum Sumber Daya Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020 - 2024



Dari tabel dan grafik di atas dapat dilihat capaian indikator kinerja Persentase Pemenuhan Kebutuhan Minimum Sumber Daya Pencarian dan Pertolongan apabila dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan adanya beberapa faktor diantaranya yaitu:

- 1) Masih kurangnya SDM yang dimiliki Basarnas sehingga perhitungan pemenuhan akan tenaga pencarian dan pertolongan persentase hanya 13,80% dari jumlah total kebutuhan SDM Basarnas sebanyak 28.687 orang (dapat dilihat pada Tabel 3.10);
- 2) Masih kurangnya pemenuhan sarana dan prasarana yang dimiliki. Pemenuhan sarana dan prasarana sampai dengan Desember 2025 hanya mencapai 36,40%;
- 3) Masih belum terpenuhinya peralatan sistem komunikasi, dimana persentase pemenuhan baru mencapai 51,86%.

b. Indikator Kinerja “Tingkat Kesiapan Sarana Prasarana serta Sistem Komunikasi Pencarian dan Pertolongan (%)”

Indikator kinerja ini mengukur rata-rata tingkat keandalan/kesiapan sarana dan prasarana serta perangkat dan peralatan komunikasi dalam menunjang keberhasilan operasi SAR. Data diambil dari kesiapan sarana dan prasarana serta peralatan sistem komunikasi yang ada di Kantor Pusat Basarnas maupun UPT. Berikut ini kesiapan sarana dan prasarana serta sistem komunikasi sampai dengan Desember 2024:

Tabel 3.19. Kesiapan sarana prasarana serta sistem komunikasi Pencarian dan Pertolongan sampai dengan Desember 2024

No.	Satker	Realisasi % Kesiapan Sarpras	Realisasi % Kesiapan Peralatan Siskom
1	Kantor PP Banda Aceh	100,00	84,05

No.	Satker	Realisasi % Kesiapan Sarpras	Realisasi % Kesiapan Peralatan Siskom
2	Kantor PP Medan	99,30	100,00
3	Kantor PP Padang	99,43	92,03
4	Kantor PP Palembang	90,25	81,50
5	Kantor PP Jambi	90,25	99,16
6	Kantor PP Bengkulu	92,70	99,67
7	Kantor PP Tanjungpinang	98,61	100,00
8	Kantor PP Pangkal Pinang	99,10	97,40
9	Kantor PP Lampung	92,00	61,55
10	Kantor PP Pekanbaru	100,00	89,69
11	Kantor PP Banten	90,28	98,32
12	Kantor PP Semarang	98,99	100,00
13	Kantor PP Yogyakarta	95,53	90,00
14	Kantor PP Bandung	90,00	85,00
15	Kantor PP Surabaya	98,06	89,29
16	Kantor PP Denpasar	97,37	99,00
17	Kantor PP Mataram	95,69	98,00
18	Kantor PP Kupang	87,68	81,46
19	Kantor PP Banjarmasin	80,38	97,68
20	Kantor PP Balikpapan	95,52	81,46
21	Kantor PP Pontianak	93,84	92,41
22	Kantor PP Merauke	82,19	85,90
23	Kantor PP Makassar	93,00	90,00

No.	Satker	Realisasi % Kesiapan Sarpras	Realisasi % Kesiapan Peralatan Siskom
24	Kantor PP Palu	96,87	90,90
25	Kantor PP Gorontalo	100,00	81,59
26	Kantor PP TERNATE	98,33	91,00
27	Kantor PP Ambon	73,00	81,00
28	Kantor PP Biak	96,10	99,90
29	Kantor PP Jayapura	92,00	65,00
30	Kantor PP Timika	96,54	80,76
31	Kantor PP Sorong	79,00	90,00
32	Kantor PP Manokwari	95,68	77,91
33	Kantor PP Natuna	97,07	94,35
34	Kantor PP Maumere	98,00	91,00
35	Kantor PP Kendari	100,00	93,00
36	Kantor PP Manado	100,00	97,00
37	Kantor PP Mentawai	92,13	92,12
38	Kantor PP Jakarta	97,00	56,00
39	Balai Pelatihan SDMPP	98,00	98,00
40	Kantor PP Cilacap	98,00	100,00
41	Kantor PP Nias	100,00	80,00
42	Kantor PP Mamuju	96,43	99,00
43	Kantor PP Tarakan	99,00	80,40
44	Kantor PP Palangkaraya	90,00	78,00
45	Pusat	95,33	93,48
<b>% Kesiapan</b>		<b>94,41</b>	<b>88,98</b>

No.	Satker	Realisasi % Kesiapan Sarpras	Realisasi % Kesiapan Peralatan Siskom
<b>% Rata-rata Kesiapan</b>		<b>91,70%</b>	

Sumber data: UPT, Direktorat Sarana dan Prasarana, dan Direktorat Sistem Komunikasi

Tabel 3.20. Persentase kesiapan sarana prasarana serta sistem komunikasi Pencarian dan Pertolongan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase kesiapan sarana prasarana serta sistem komunikasi	93,91%	91,70%	97,64%

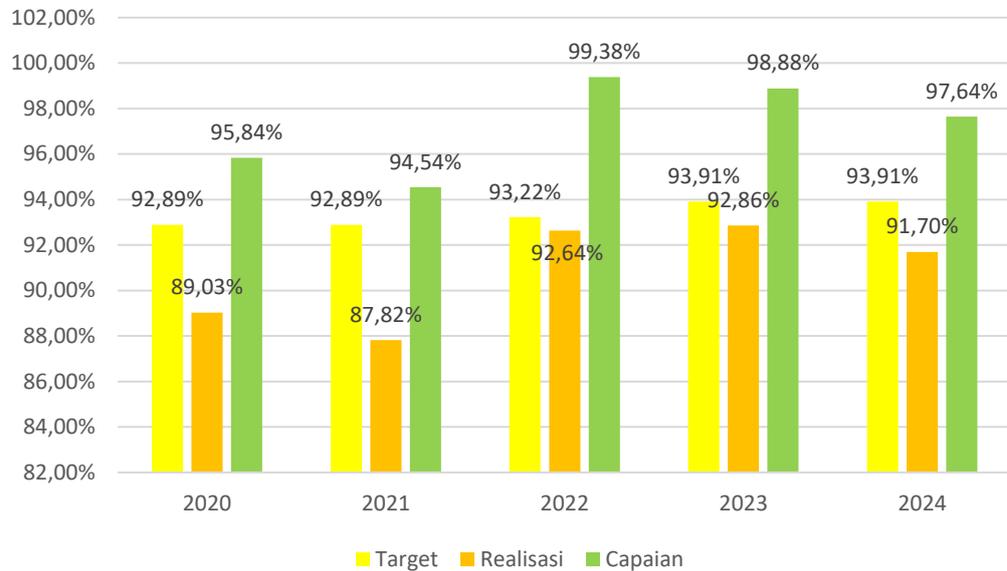
Berikut ini disajikan perbandingan tingkat kesiapan sarana dan prasarana serta peralatan sistem komunikasi Tahun 2024 dengan tahun sebelumnya:

Tabel 3.21. Perbandingan Persentase kesiapan sarana prasarana serta sistem komunikasi Tahun 2024 dengan tahun sebelumnya

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase kesiapan sarana prasarana serta sistem komunikasi	2020	92,89%	89,03%	95,84%
	2021	92,89%	87,82%	94,54%
	2022	93,22%	92,64%	99,38%
	2023	93,91%	92,86%	98,88%
	2024	93,91%	91,70%	97,64%

Sumber data: Laporan Kinerja 2023 Basarnas

Grafik 3.2. Perbandingan Persentase Tingkat Kesiapan Sarana Prasarana Serta Sistem Komunikasi Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020 - 2024



Dari tabel dan grafik di atas dapat dilihat capaian indikator kinerja Tingkat Kesiapan Sarana Prasarana Serta Sistem Komunikasi Pencarian dan Pertolongan jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan adanya beberapa faktor diantaranya yaitu:

- 1) Masih terdapat beberapa Kansar yang persentase kesiapan sarana dan prasarana di bawah 80% yaitu Kansar Sorong dan Kansar Ambon, sedangkan untuk kesiapan peralatan sistem komunikasi masih terdapat 5 Kansar yang kesiapannya di bawah 80% yaitu Lamung, Jayapura, Manokwari, Jakarta, dan Palangkaraya. Hal ini dikarenakan terdapat beberapa sarana maupun peralatan sistem komunikasi yang rusak sehingga tidak bisa digunakan;
- 2) Adanya *automatic adjustment* atau pemotongan anggaran berdampak terhadap pemeliharaan sarana dan prasarana serta sistem komunikasi.

- c. Indikator Kinerja “Persentase SDM Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan Potensi yang bersertifikat”.

Indikator kinerja ini mengukur jumlah SDM Basarnas yang bersertifikat serta jumlah Potensi SAR yang bersertifikat.

- 1) Persentase SDM Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang bersertifikat

Sesuai dengan Tabel 3.10. jumlah Pegawai yang dimiliki oleh Basarnas sebanyak 3.960 orang dan 5 (lima) orang belum memiliki sertifikat lulus Diklat Dasar SAR, hal ini dikarenakan 2 (dua) orang sakit dan 3 (tiga) orang tenaga P3K yang belum diikutsertakan dalam Diklat Dasar SAR. Di bawah ini rumus perhitungan Persentase SDM Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang bersertifikat:

% SDM Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang bersertifikat

$$= \frac{\text{Jumlah Pegawai Basarnas yang bersertifikat}}{\text{Jumlah Total Pegawai Basarnas}} \times 100\%$$

Dari rumus di atas didapat Persentase SDM Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sebesar 99,87%.

- 2) Persentase Potensi Pencarian dan Pertolongan yang bersertifikat  
Perhitungan berdasarkan jumlah Potensi Pencarian dan Pertolongan yang dilatih selama Tahun Anggaran 2024 dan dinyatakan lulus. Berikut ini rumus Persentase Potensi Pencarian dan Pertolongan yang bersertifikat.

% Potensi Pencarian dan Pertolongan yang bersertifikat

$$= \frac{\text{Jumlah Potensi SAR yang bersertifikat}}{\text{Jumlah Potensi SAR yang dilatih Basarnas}} \times 100\%$$

Berikut ini pelatihan Potensi Pencarian dan Pertolongan yang dilaksanakan selama Tahun 2024:

Tabel 3.22. Pelatihan Potensi Pencarian dan Pertolongan selama Tahun 2024

NO	UPT PELAKSANA	SKEMA PELATIHAN	TANGGAL MULAI	TANGGAL SELESAI	TOTAL PESERTA	KELULUSAN		
						PESERTA LULUS	PESERTA MENGIKUTI	PESERTA TIDAK LULUS
1	Kantor Pencarian dan Pertolongan Lampung	Pelatihan Pertolongan Pertama	26 Januari 2024	31 Januari 2024	50	44	1	5
2	Kantor Pencarian dan Pertolongan Mamuju	Pelatihan Teknis Pertolongan di Ketinggian	18 Februari 2024	24 Februari 2024	50	50	-	-
3	Kantor Pencarian dan Pertolongan Palu	Pelatihan Pertolongan di Permukaan Air	29 Februari 2024	6 Maret 2024	51	51	-	-
4	Kantor Pencarian dan Pertolongan Semarang	Pelatihan Pertolongan Pertama	4 Maret 2024	9 Maret 2024	50	50	-	-
5	Kantor Pencarian dan Pertolongan Lampung	Pelatihan Pertolongan di Permukaan Air	30 April 2024	5 Mei 2024	50	49	-	1
6	Kantor Pencarian dan Pertolongan Surabaya	Pelatihan Pertolongan di Ketinggian	30 April 2024	6 Mei 2024	50	49	1	-
7	Kantor Pencarian dan Pertolongan Surabaya	Pelatihan Pertolongan di Permukaan Air	1 Mei 2024	7 Mei 2024	50	49	1	-
8	Kantor Pencarian dan Pertolongan Palangkaraya	Pelatihan Pertolongan di Permukaan Air	2 Mei 2024	7 Mei 2024	50	43	7	-
9	Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh	Pelatihan Pertolongan Pertama	12 Mei 2024	18 Mei 2024	50	38	-	12
10	Kantor Pencarian dan Pertolongan Yogyakarta	Pelatihan Pertolongan di Permukaan Air	12 Mei 2024	18 Mei 2024	50	44	5	1
11	Kantor Pencarian Dan Pertolongan Yogyakarta	Pelatihan Teknis Pertolongan di Ketinggian	12 Mei 2024	18 Mei 2024	50	49	1	-
12	Kantor Pencarian dan Pertolongan Sorong	Pelatihan Pertolongan Pertama	13 Mei 2024	18 Mei 2024	50	47	3	-
13	Kantor Pencarian Dan Pertolongan Sorong	Pelatihan Pertolongan Di Permukaan Air	13 Mei 2024	18 Mei 2024	50	48	2	-
14	Kantor Pencarian Dan Pertolongan Banten	Pelatihan Pertolongan di Permukaan Air	27 Mei 2024	1 Juni 2024	50	44	6	-
15	Kantor Pencarian dan Pertolongan Jakarta	Pelatihan Pertolongan Pertama	27 Mei 2024	2 Juni 2024	50	50	-	-
16	Kantor Pencarian dan Pertolongan Palangkaraya	Pelatihan Pertolongan di Permukaan Air	3 Juni 2024	8 Juni 2024	50	50	-	-
17	Kantor Pencarian dan Pertolongan Bengkulu	Pelatihan Pertolongan Pertama	9 Juni 2024	14 Juni 2024	50	49	-	1

NO	UPT PELAKSANA	SKEMA PELATIHAN	TANGGAL MULAI	TANGGAL SELESAI	TOTAL PESERTA	KELULUSAN		
						PESERTA LULUS	PESERTA MENGIKUTI	PESERTA TIDAK LULUS
18	Kantor Pencarian dan Pertolongan Banjarmasin	Pelatihan Pertolongan Pertama	9 Juni 2024	15 Juni 2024	53	53	-	-
19	Kantor Pencarian dan Pertolongan Timika	Pelatihan Pertolongan Pertama	18 Juni 2024	24 Juni 2024	50	44	-	6
20	Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar	Pelatihan Pertolongan di Permukaan Air	8 Juli 2024	13 Juli 2024	50	49	-	1
21	Kantor Pencarian dan Pertolongan Biak	Pelatihan Teknis Pertolongan di Ketinggian	9 Juli 2024	15 Juli 2024	49	47	-	2
22	Kantor Pencarian dan Pertolongan Ambon	Pelatihan Pertolongan Pertama	15 Juli 2024	20 Juli 2024	50	48	-	2
23	Balai Pelatihan SDM Pencarian dan Pertolongan	Pelatihan Teknis Potensi SAR Dengan Pola PNB	30 Juli 2024	23 Agustus 2024	130	130	-	-
24	Kantor Pencarian dan Pertolongan Jayapura	Pelatihan Pertolongan Pertama	19 Agustus 2024	24 Agustus 2024	51	51	-	-
25	Kantor Pencarian dan Pertolongan Natuna	Pelatihan Pertolongan Pertama	25 Agustus 2024	31 Agustus 2024	50	50	-	-
26	Kantor Pencarian dan Pertolongan Mentawai	Pelatihan Pertolongan di Permukaan Air	8 September 2024	13 September 2024	50	48	-	2
27	Kantor Pencarian dan Pertolongan Kupang	Pelatihan Pertolongan Pertama	9 September 2024	15 September 2024	50	50	-	-
28	Kantor Pencarian dan Pertolongan Bandung	Pelatihan Pertolongan di Gunung Hutan	23 September 2024	29 September 2024	50	49	-	1
29	Kantor Pencarian dan Pertolongan Jambi	Pelatihan Pertolongan di Gunung Hutan	28 September 2024	4 Oktober 2024	50	47	-	3
30	Kantor Pencarian dan Pertolongan Cilacap	Pelatihan Pertolongan Di Permukaan Air	13 Oktober 2024	19 Oktober 2024	50	50	-	-
31	Kantor Pencarian dan Pertolongan Cilacap	Pelatihan Pertolongan Pertama	13 Oktober 2024	19 Oktober 2024	50	50	-	-
32	Kantor Pencarian dan Pertolongan Maumere	Pelatihan Pertolongan Pertama	14 Oktober 2024	20 Oktober 2024	50	48	-	2
33	Kantor Pencarian dan Pertolongan Pekanbaru	Pelatihan Pertolongan di Permukaan Air	14 Oktober 2024	20 Oktober 2024	50	45	-	5
34	Kantor Pencarian dan Pertolongan Nias	Pelatihan Pertolongan di Permukaan Air	25 Oktober 2024	30 Oktober 2024	50	50	-	-
Total Pelatihan yang sudah dilaporkan					1.784	1.654	27	70

Sumber data: Puslat SDM Pencarian dan Pertolongan

Dari tabel di atas, dapat dihitung Persentase Potensi Pencarian dan Petolongan sebesar 92,71%. Nilai tersebut didapat dari total peserta yang mengikuti Pelatihan sebanyak 1.784 orang dan yang lulus sebanyak 1.654 orang atau 92,71%.

Tabel 3.23. Persentase SDM Basarnas dan Potensi yang bersertifikat

No.	Uraian	Jumlah yang bersertifikat	Total Pegawai/ Potensi	%
1.	Persentase SDM Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang bersertifikat	3.955 orang	3.960 orang	99,87%
2.	Persentase Potensi Pencarian dan Pertolongan yang bersertifikat	1.784 orang	1.654 orang	92,71%
Persentase SDM Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan Potensi yang bersertifikat				96,29%

Tabel 3.24. Perbandingan Target dan Realisasi Persentase SDM Basarnas dan Potensi yang bersertifikat Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase SDM Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan Potensi yang bersertifikat	100%	96,29%	96,29%

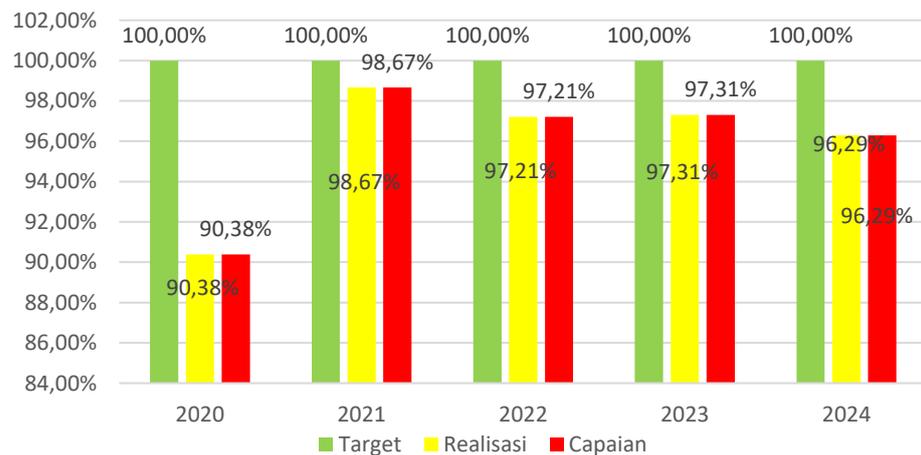
Tabel 3.25. Perbandingan Persentase SDM Basarnas dan Potensi yang bersertifikat Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase SDM Badan Nasional Pencarian dan	2020	100%	90,38%	90,38%
	2021	100%	98,67%	98,67%

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)
Pertolongan dan Potensi yang bersertifikat	2022	100%	97,21%	97,21%
	2023	100%	97,31%	97,31%
	2024	100%	96,26%	96,26%

Sumber data: Laporan Kinerja 2023 Basarnas

Grafik 3.3. Perbandingan Persentase SDM Basarnas dan Potensi yang bersertifikat Tahun 2020-2024



Dari tabel dan grafik di atas dapat dilihat capaian indikator kinerja Persentase SDM Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan Potensi yang bersertifikat target belum tercapai, dan apabila dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya mengalami penurunan. Hal yang menyebabkan target tidak tercapai diantaranya adalah terdapat 5 (lima) personil/ SDM Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang belum memiliki sertifikat Diklat Dasar SAR dikarenakan 2 (dua) orang sakit dan 3 (tiga) orang merupakan tenaga P3K yang belum mengikuti Diklat Dasar SAR. Sedangkan untuk Potensi Pencarian dan Pertolongan masih adanya peserta pelatihan yang tidak lulus.

Pada indikator kinerja pendukung sasaran strategis “Meningkatnya Keandalan Sumber Daya Pencarian dan Pertolongan” yaitu Tingkat pemenuhan kebutuhan minimum sumber daya pencarian dan pertolongan (%), Tingkat kesiapan sarana prasarana serta sistem komunikasi Pencarian dan Pertolongan (%), Persentase SDM Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan Potensi yang bersertifikat (%) untuk perbandingan dengan standar nasional tidak ada.

#### 4. Sasaran Strategis “Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)”

Sasaran strategis ini didukung oleh 1 indikator kinerja, yaitu: Indikator Kinerja “Nilai Indeks Reformasi Birokrasi”. Nilai ini merupakan hasil penilaian dan evaluasi yang dilaksanakan oleh Kementerian PANRB.

Berdasarkan Surat dari Kementerian PANRB Nomor: B/81/RB.06/2024 tanggal 1 Februari 2024 tentang Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi tahun 2023, Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Basarnas Tahun 2023 adalah 73,45 (BB). Target yang ditetapkan adalah 76 sehingga didapat capaian sebesar 96,64%. Adapun rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Penilaian	Bobot	Nilai
A	RB General	100	72,4
B	RB Tematik	10	1,05
			BB

Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Basarnas Tahun 2024 belum dirilis oleh Kementerian PANRB sehingga capaian nilai Indeks Reformasi Birokrasi belum dapat dihitung.

Tabel 3.26. Perbandingan Target dan Realisasi Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	76	N/A	N/A

Untuk hasil evaluasi Tahun 2023 “tidak dibandingkan” dengan hasil evaluasi tahun sebelumnya karena berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 dan peraturan turunannya, terdapat perubahan kerangka logis, komponen, indikator, bobot dan kriteria penilaian yang signifikan. Sedangkan hasil evaluasi Tahun 2024 dapat dibandingkan dengan hasil evaluasi Tahun 2023, namun sampai saat periode penyampaian laporan kinerja berakhir hasil evaluasi Tahun 2024 belum dirilis oleh Kementerian PANRB. Berikut perbandingannya:

Tabel 3.27. Perbandingan Target dan Realisasi Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2024 dengan Tahun 2023

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)
Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	2023	76	73,45	96,64%
	2024	76	N/A	N/A

Sumber data: Laporan Kinerja 2023 Basarnas

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Reformasi Birokrasi, kategori hasil evaluasi Reformasi Birokrasi adalah sebagai berikut:

No.	Kategori	Nilai/ Angka	Predikat	Interprestasi
1.	AA	>100	Sangat Memuaskan	Memenuhi kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing serta mampu mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan melalui percepatan transformasi digital, dan pembangunan budaya BerAKHLAK.
2.	A	<80 - 100	Memuaskan	Memenuhi kriteria (100%) sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing melalui percepatan transformasi digital, dan pembangunan budaya BerAKHLAK, namun belum optimal dalam mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan.
3.	A-		Memuaskan dengan catatan	Memenuhi sebagian besar kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing karena sebagian kecil pelaksanaan percepatan transformasi digital dan pembangunan budaya BerAKHLAK belum optimal, serta belum sepenuhnya mampu mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan.
4.	BB	>70 - 80	Sangat Baik	Memenuhi sebagian kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing karena sebagian pelaksanaan
5.	B	>60 - 70	Baik	Memenuhi sebagian kecil (<60%) kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing karena sebagian besar pelaksanaan percepatan transformasi digital, dan pembangunan

No.	Kategori	Nilai/ Angka	Predikat	Interprestasi
				budaya BerAKHLAK belum optimal, serta belum sepenuhnya mampu mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan.
6.	CC	>50 - 60	Cukup	Penerapan RB dilaksanakan melalui sebagian kecil percepatan transformasi digital dan pembangunan budaya BerAKHLAK sehingga belum mampu memenuhi kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing
7.	C	>30 - 50	Kurang	RB dilaksanakan sebatas formalitas, belum optimal menerapkan percepatan transformasi digital dan pembangunan budaya BerAKHLAK, sehingga belum mampu memenuhi kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing.
8.	D	0 - 30	Sangat Kurang	RB dilaksanakan sebatas inisiatif awal, belum diformalkan dan belum menerapkan percepatan transformasi digital dan pembangunan budaya BerAKHLAK.

Dari tabel kategori di atas dapat dilihat apabila dibandingkan dengan standar evaluasi Reformasi Berokrasi yang ditetapkan Kementerian PANRB, pada Tahun 2023 Basarnas mendapat nilai 73,45 sehingga memperoleh kategori “BB” atau predikat “Sangat Baik”.

Beberapa faktor pendukung capaian indikator kinerja “Nilai Indeks Reformasi Birokrasi” antara lain adalah:

a. Nilai SAKIP

Sesuai dengan Surat dari Kementerian PANRB Nomor: B/674/AA.05/2024 tanggal 19 Desember 2024 tentang Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024, Basarnas mendapatkan nilai sebesar 74,01 (BB). Apabila dibandingkan dengan capaian Tahun 2023 mengalami kenaikan yaitu dari 73,72 menjadi 74,01 (BB).

b. Indeks Sitem Merit

Sistem Merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) sebagai lembaga yang diberi tugas mengawasi dan memastikan kebijakan tersebut terlaksana perlu membangun sistem pengawasan untuk menjamin tugas tersebut dilaksanakan secara efektif. Penerapan sistem merit bertujuan untuk memastikan jabatan yang ada di birokrasi pemerintah diduduki pegawai yang memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi. Dengan demikian maka tujuan pembangunan bidang SDM Aparatur untuk mewujudkan pegawai ASN yang profesional, berintegritas, netral dan berkinerja tinggi dapat diwujudkan. Penilaian penerapan Sistem Merit Manajemen ASN berdasarkan 8 aspek, yaitu: perencanaan kebutuhan, pengadaan, pengembangan karier, promosi dan mutasi, manajemen kinerja, penggajian, penghargaan dan disiplin, perlindungan dan pelayanan dan sistem informasi.

Tahun 2024 Basarnas tidak ada penilaian, karena untuk katagori sangat baik akan dinilai lagi setelah 2 tahun. Selain itu, sesuai dengan Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pengalihan Pelaksanaan Pengawasan Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara, maka

Tahun 2024 tidak dilaksanakan penilaian sistem merit oleh BKN. Sebagai dasar pelaksanaan kinerja maka digunakan penilaian pada Tahun 2023.

c. Opini BPK

Opini BPK-RI atas laporan keuangan merupakan pernyataan professional pemeriksa dari hasil pemeriksaan laporan keuangan Kementerian/Lembaga oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, maka BPK-RI memiliki kewenangan melaksanakan pemeriksaan atas laporan keuangan. Berdasarkan pemeriksaan tersebut BPK-RI memberikan opini atas laporan keuangan yang telah diperiksa. Opini BPK-RI atas laporan Basarnas diukur 1 kali dalam 1 Tahun. Hasil opini BPK-RI atas laporan keuangan Basarnas Tahun 2023 yang dirilis Tahun 2024 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

d. Skor KIP

Pengukuran realisasi kinerja pada Indikator Kinerja Skor Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Basarnas diambil dari hasil penilaian Keterbukaan Informasi Publik yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 (UU 14/2008) tentang Keterbukaan Informasi Publik disebutkan bahwa, setiap tahun Badan Publik wajib mengumumkan layanan informasi publik. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/ atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Sesuai dengan Keputusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor: 52/KEP/KIP/XII Tahun 2024 Nilai KIP Basarnas adalah 94,67.

e. Indeks SPBE

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Untuk memastikan pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah selaras dengan prinsip terintegrasi dan terpadu, maka Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah diharapkan menerapkan unsur-unsur SPBE sesuai dengan kerangka kerja Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE agar penerapan SPBE dapat berjalan efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas dan optimal. Untuk mengukur perkembangan penerapan SPBE di Indonesia, Kementerian PANRB bersama Tim Koordinasi SPBE Nasional melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi SPBE. Nilai SPBE Basarnas Tahun 2024 belum dirilis.

f. Indeks Pengelolaan Aset (IPA)

Indikator Kinerja Pengelolaan BMN atau dikenal dengan Indeks Pengelolaan Aset (IPA) diformulasikan oleh Direktorat Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara (Direktorat PKKN) DJKN sebagai alat pengukuran kualitas pengelolaan Barang Milik Negara pada seluruh Kementerian/Lembaga yang telah dimulai pengukurannya sejak tahun 2021. Implementasi IPA merupakan bentuk penguatan dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pengelolaan Barang Milik Negara sebagai upaya Pengelola Barang bersama-sama Pengguna Barang untuk terus menerus melakukan perbaikan tata Kelola Barang Milik Negara karena telah ada alat ukurnya. Sesuai dengan Surat dari Kementerian Keuangan RI Nomor:S-22/KN/KN.2/2024 tanggal 16 Februari 2024 Hal Penyampaian Hasil Perhitungan Indeks Pengelolaan Aset (IPA) Kementerian/ Lembaga Tahun 2023 Basarnas mendapatkan nilai sebesar 3,38.

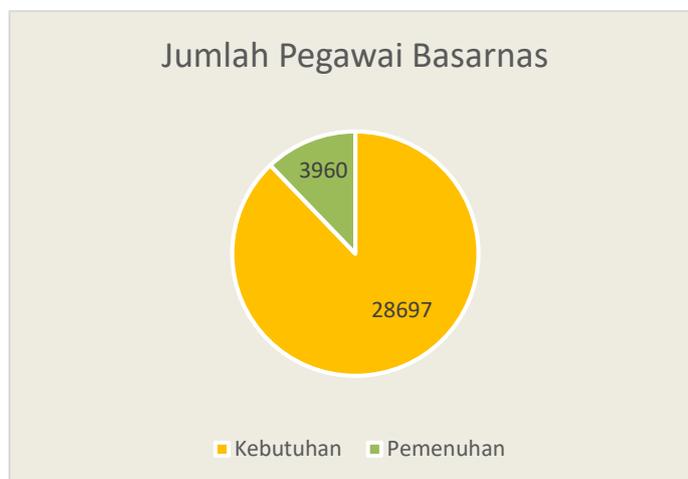
## B. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis sumber daya adalah proses evaluasi yang dilakukan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola berbagai jenis sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan. Tujuan utamanya adalah untuk memahami bagaimana sumber daya dapat dimanfaatkan secara efisien dan efektif. Berikut ini analisis terhadap sumber daya yang dimiliki oleh Basarnas selama tahun 2024.

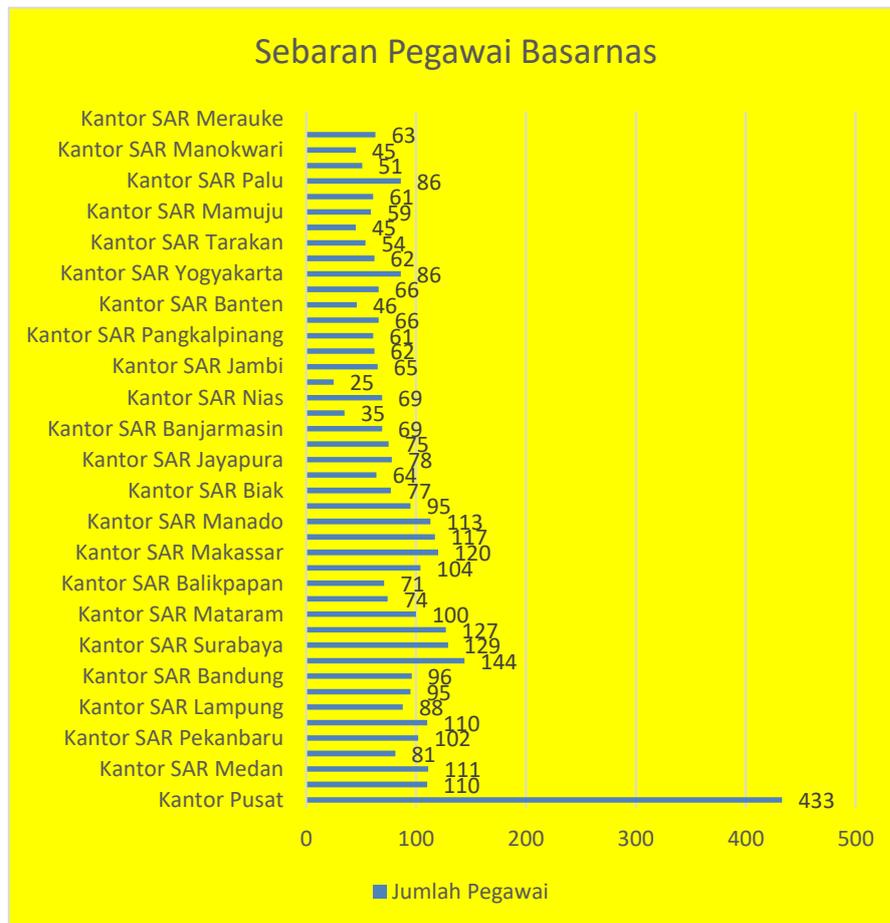
### 1. Sumber Daya Manusia (SDM)

SDM memiliki peran penting dalam keberhasilan pelaksanaan layanan SAR. Tidak hanya mencakup jumlah tenaga SAR saja, namun juga dari segi keterampilan dan pengetahuan. Dari jumlah SDM yang dimiliki Basarnas hingga Desember 2024 sebanyak 3.960 orang atau 13,80% dari jumlah kebutuhan SDM sebanyak 28.697 orang. Kurangnya SDM yang dimiliki menyebabkan beban kerja pegawai bertambah atau terjadinya rangkap pekerjaan sehingga kurang optimal dalam pelaksanaannya. Hal ini menyebabkan capaian kinerja tidak sesuai target. Salah satu upaya untuk mencukupi jumlah SDM adalah merekrut tenaga P3K atau honorer. Sampai dengan Desember 2024 Basarnas memiliki tenaga PPNPN yang diperuntukkan sebagai tenaga ABK sebanyak 305 orang dan Tenaga Penunjang (*rescuer*) sebanyak 195 orang.

Grafik 3.4. Perbandingan Jumlah Kebutuhan dan Pemenuhan SDM



Grafik 3.5. Sebaran Pegawai Basarnas



Sumber data: Biro Kepegawaian dan Ortala

Grafik 3.6. Pemenuhan Tenaga ABK dan Rescuer



Sumber data: Biro Kepegawaian dan Ortala dan Direktorat Bina Tenaga

## 2. Anggaran

Dalam rangka menunjang pelaksanaan terhadap layanan pencarian dan pertolongan, Basarnas memiliki 2 program yaitu Program Dukungan Manajemen dan Program Pencarian dan Pertolongan pada Kecelakaan dan Bencana. Untuk mendukung capaian sasaran strategis Basarnas lebih banyak menggunakan anggaran pada Program Pencarian dan Pertolongan pada Kecelakaan dan Bencana. Pada Tabel 3.26 disajikan realisasi anggaran Program yang digunakan sebagai pendukung capaian Basarnas Tahun 2024.

Tabel. 3.28. Realisasi Anggaran Kegiatan Pendukung

No.	Nama Kegiatan	Pagu	Realisasi	Persentase Realisasi	Outstanding Kontrak	Jumlah Diblok/ Direvisi	Dana Tersedia
1	Penyusunan Rencana Program, Evaluasi Pelaporan dan Pengelolaan Keuangan	571.499.130.000	543.210.727.328	95,05%	0	1.327.809.000	26.960.593.672
2	Penyusunan Organisasi Tata Laksana dan Pengelolaan Kepegawaian	13.643.629.000	10.391.333.086	76,16%	0	1.379.235.000	1.873.060.914
3	Pengelolaan Administrasi, Perlengkapan, Kehumasan dan Protokol	257.239.778.000	249.427.347.938	96,96%	7.088.908	2.835.164.000	4.970.177.154
4	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Aparatur	34.743.751.000	34.158.273.960	98,31%	2.591.850	290.000.000	292.885.190
5	Pengelolaan Data dan Sistem Informasi	23.188.252.000	21.243.833.863	91,61%	0	1.407.445.000	536.973.137
6	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Sar	855.715.727.000	709.656.505.778	82,93%	365.387.292	139.546.000.000	6.147.833.930
7	Pembinaan Tenaga SAR	60.276.175.000	53.488.542.444	88,74%	0	4.444.376.000	2.343.256.556

No.	Nama Kegiatan	Pagu	Realisasi	Persentase Realisasi	Outstanding Kontrak	Jumlah Diblok/ Direvisi	Dana Tersedia
8	Pengelolaan Operasi SAR	84.915.277.000	68.461.220.546	80,62%	0	6.702.756.000	9.751.300.454
9	Pengelolaan Sistem Komunikasi SAR	88.516.200.000	87.593.627.182	98,96%	0	421.341.000	501.231.818
10	Pembinaan Potensi SAR	17.055.440.000	8.937.977.388	52,41%	0	7.847.185.000	270.277.612
11	Pengelolaan Kesiapsiagaan SAR	34.320.371.000	25.688.038.499	74,85%	0	6.656.646.000	1.975.686.501
12	Pengawasan dan Pembinaan Internal	5.390.700.000	4.436.140.286	82,29%	0	938.000.000	16.559.714
13	Pengelolaan Diklat SAR	48.924.110.000	41.897.159.450	85,64%	0	4.969.976.000	2.056.974.550
14	Pengelolaan Diklat Aparatur	2.843.447.000	1.847.886.342	64,99%	0	866.706.000	128.854.658
15	Penyusunan Produk Hukum dan Kerja Sama	4.088.080.000	3.094.235.586	75,69%	0	984.100.000	9.744.414
<b>Jumlah</b>		<b>2.102.360.067.000</b>	<b>1.863.532.849.676</b>	<b>88,64%</b>	<b>375.068.050</b>	<b>180.616.739.000</b>	<b>57.835.410.274</b>

Sumber data: Online Monitoring Sistem Perbendaharaan Anggaran Negara (OM SPAN)

### 3. Sarana dan Prasarana

#### a. Pemenuhan Sarana dan Prasarana

Untuk mendukung pelaksanaan operasi SAR, Basarnas memiliki sarana maupun prasarana. Data sarana dan prasarana yang dimiliki Basarnas telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Untuk pemenuhan sarana pada Tahun 2024 Basarnas telah melaksanakan pengadaan sarana. Kegiatan pengadaan akan disajikan pada pembahasan selanjutnya.

- b. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
  - c. Untuk menjaga kesiapan terutama sarana yang digunakan pada saat pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dilakukan pemeliharaan rutin baik pada Kantor Pusat Basarnas maupun UPT.
4. Peralatan Sistem Komunikasi
- a. Pemenuhan Peralatan Sistem Komunikasi  
Peralatan sistem komunikasi dalam pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan memiliki tujuan utama untuk memastikan kelancaran koordinasi, keselamatan tim penyelamat, serta efektivitas dalam pencarian dan evakuasi korban. Untuk pemenuhan peralatan sistem komunikasi Tahun 2024, dilakukan melalui kegiatan pengadaan yang akan disajikan pada pembahasan selanjutnya.
  - b. Pemeliharaan Peralatan Sistem Komunikasi  
Untuk menjaga performa peralatan komunikasi di Kantor Pusat Basarnas dilaksanakan kegiatan pemeliharaan maupun kegiatan lainnya meliputi:
    - 1) Pemeliharaan repeater Tahun 2024 pada Kantor SAR Surabaya, Semarang dan Denpasar;
    - 2) Pemeliharaan *Communication SAR Mobile*  
Kegiatan ini dilakukan untuk memelihara mobil komunikasi yang dimiliki agar tetap dalam performa. Mobil komunikasi yang dirawat meliputi:
      - a) *Commob Longrange* Nomor Polisi B 9732 PQV
      - b) *Commob Tipe 1* Nomor Polisi B 8488 BX
      - c) *Commob GTA* Nomor Polisi B 9664 PSC
    - 3) Pemeliharaan deteksi dini.  
Kegiatan Pemeliharaan Peralatan Deteksi dini terdiri dari 2 Jenis kegiatan yaitu:
      - a) Pemeliharaan peralatan MEOLUT. Adapun pemeliharaan yang dilakukan meliputi:
        - 6 Channel MEOLUT Maintenance
        - Cospas-Sarsat LGM MCC System Maintenance

- Cospas-Sarsat DR LGM MCC- Software Update.
- b) Pemeliharaan Peralatan Flight Monitoring System.
- 4) Perpanjangan Izin Stasiun Radio (ISR) untuk peralatan radio HF, radio VHF dan peralatan repeater VHF.
- 5) Perpanjangan Sewa Tower yang digunakan untuk penempatan peralatan repeater yang ada di Kantor Pencarian dan Pertolongan

**C. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Basarnas memiliki 2 Program yaitu Program Dukungan Manajemen dan Program Pencarian dan Pertolongan pada Kecelakaan dan Bencana. Dari 4 (empat) sasaran strategis terdapat 2 (dua) sasaran strategis yang menggunakan Program Dukungan Manajemen.

Tabel 3.29. Program/Kegiatan penunjang keberhasilan/kegagalan capaian Basarnas Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan
Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan Pencarian dan Pertolongan	Indeks kepuasan masyarakat	Program Pencarian dan Pertolongan pada Kecelakaan dan Bencana	- Pengelolaan Operasi SAR - Pengelolaan Sistem Komunikasi SAR - Pembinaan Potensi SAR
Meningkatnya efektivitas pelaksanaan operasi Pencarian dan Pertolongan	Waktu tanggap Pencarian dan Pertolongan (menit) Persentase keberhasilan evakuasi korban pada pelaksanaan operasi Pencarian dan Pertolongan (%)	Program Pencarian dan Pertolongan pada Kecelakaan dan Bencana	- Pengelolaan Operasi SAR - Pengelolaan Kesiapsiagaan - Pengelolaan Sistem Komunikasi SAR - Pengelolaan Sarana dan Prasarana - Pembinaan Potensi SAR - Pembinaan Tenaga SAR

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan
			- Diklat SAR
Meningkatnya keandalan sumber daya Pencarian dan Pertolongan	Tingkat pemenuhan kebutuhan minimum sumber daya Pencarian dan Pertolongan (%)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Program Dukungan Manajemen</li> <li>- Program Pencarian dan Pertolongan pada Kecelakaan dan Bencana</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyusunan Organisasi Tata Laksana Dan Pengelolaan Kepegawaian</li> <li>- Pengelolaan Sarana dan Prasarana</li> <li>- Pengelolaan Sistem Komunikasi SAR</li> </ul>
	Tingkat kesiapan sarana prasarana serta sistem komunikasi Pencarian dan Pertolongan (%)		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengelolaan Sarana dan Prasarana</li> <li>- Pengelolaan Sistem Komunikasi SAR</li> </ul>
	Persentase SDM Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan Potensi yang bersertifikat (%)		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyusunan Organisasi Tata Laksana Dan Pengelolaan Kepegawaian</li> <li>- Puslat SDM Pencarian dan Pertolongan</li> <li>- Pembinaan Potensi SAR</li> </ul>
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	Program Dukungan Manajemen	Penyusunan Organisasi Tata Laksana Dan Pengelolaan Kepegawaian

Berikut uraian terkait kegiatan-kegiatan pendukung keberhasilan/kegagalan capaian kinerja Basarnas Tahun 2024:

## 1. Pengelolaan Operasi SAR

### a. Pengerahan dan Pengendalian Operasi SAR

Pengerahan dan pengendalian SAR merupakan proses di mana Tim SAR diberi tugas untuk menemukan dan menyelamatkan orang yang

hilang atau dalam keadaan darurat. Pengerahan SAR di mana Tim SAR akan menentukan jenis sumber daya yang diperlukan seperti personil, peralatan SAR, sarana SAR dan dukungan logistik. Pengendalian SAR merupakan proses operasi pencarian dan pertolongan setelah pengerahan sumber daya. Selama Tahun 2024 Basarnas telah melaksanakan operasi SAR sebanyak 2.560 kali dengan jumlah korban sebanyak 40.548 orang. Data penanganan operasi pencarian dan pertolongan terdapat pada Tabel 3.7.

- 1) Dukungan Asistensi operasi SAR kecelakaan dengan penanganan khusus tabrakan kereta api Turangga dengan kereta api lokal Bandung Raya pada tanggal 5 s/d 6 Januari 2024 di Cicalengka, Kab. Bandung, Jabar;
- 2) Dukungan Asistensi kecelakaan kerja dalam pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan pada Kondisi Membahayakan Manusia Orang Tenggelam pada tanggal 15 S.D. 25 Januari 2024 di Sungai Penetay Desa Muara Hemat, Kec. Merangin, Kab. Kerinci, Prov. Jambi;
- 3) Dukungan Asistensi kecelakaan kerja dalam pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan pada Kondisi Membahayakan Manusia orang mencoba bunuh diri menaiki Tower pada tanggal 20 s.d 22 Maret 2024 di Jayapura;
- 4) Dukungan Asistensi Operasi SAR Banjir & Longsor pada tanggal 25 Maret s.d. 1 April 2024 di kampung Joglo, Desa Sirnagalih, Kec.Cipongkor, Kab. Bandung Barat, Jawa Barat;
- 5) Dukungan Asistensi Operasi SAR Personil BSG Gudang Peluru Terbakar pada tanggal 30 s.d. 31 Maret 2024 di Bekasi;
- 6) Dukungan Asistensi Operasi SAR Kecelakaan Pesawat Technam P2006 Multi Engine PK-IFP pada tanggal 19 Mei 2024 di lapangan *Sunburst Serpong*, Kota Tangsel - Prov. Banten;
- 7) Dukungan kegiatan sosialisasi dan Sosialisasi TTX ATM *Contingency Plan* pada tanggal 10 s.d 11 Juni 2024 di Bogor;

- 8) Dukungan Asistensi Operasi Pencarian dan Petolongan Kecelakaan Kapal Perahu Nelayan Pencari Besi Tertimpa Bangunan Rumah Kontener pada tanggal 15 s.d 16 Juni 2024 di Perairan Surabaya, Jawa Timur;
- 9) Dukungan Pengerahan Potensi dan Pengendalian Operasi SAR pada pendampingan kunjungan kerja reses Komisi V DPR RI tanggal 5 April 2024 ke Wilayah Jawa Barat
- 10) Dukungan Pengerahan Potensi dan Pengendalian Operasi Pencarian dan Pertolongan Dalam Mendukung Peresmian Unit Siaga Pencarian Dan Pertolongan pada tanggal 19 April 2024 di Bogor;
- 11) Dukungan Asistensi Operasi SAR Bencana Lahar Dingin pada tanggal 14 s.d 26 Mei 2024 di Kab Agam, Kab Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat;
- 12) Dukungan Asistensi Operasi SAR Bencana Longsor Tambang pada tanggal 8 s.d 13 Juli 2024 di Desa Tulabo Kec. Suwawa Timur Kab. Bone Bulango Gorontalo;
- 13) Dukungan kegiatan Investigasi kecelakaan kerja penyelaman rescuer Pos SAR Namlea dalam misi Operasi SAR tanggal 23 s.d 29 September 2024 di Kansar Ambon dan Pos SAR Namlea;
- 14) Dukungan Pengerahan dan Pengendalian Operasi SAR pada kegiatan kedirgantaraan Internasional dalam Event Bali International Airshow tanggal 14 s.d 22 September 2024;
- 15) Dukungan dalam kegiatan sosialisasi penggunaan fitur panic button pada aplikasi sistem informasi kepariwisataan Nasional (SIPARNAS) dan Quick Response pada tanggal 4 s.d 6 September 2024 di Bali;
- 16) Dukungan sebagai Narsum seminar terhadap Bencana akibat gempa bumi di area Sumatera dan mitigasinya PT. Telkomsel pada tanggal 17 s.d 19 September 2024 di Padang;
- 17) Dukungan Pengerahan dan Pengendalian operasi SAR dalam rangka kegiatan latihan Posko I Wira Jaya (OMSP) Pasis Dikreg LII

- Sesko TNI Tahun 2024 pada tanggal 9 s.d 10 September 2024 di Bandung;
- 18) Dukungan Asistensi Operasi SAR KMM orang tenggelam dan hanyut pada tanggal 15 s.d 18 Oktober 2024 di jembatan dermaga PT. Sumber Baja Prima Desa Buniasih Kecamatan Tegal Buled;
  - 19) Dukungan apel gelar pasukan operasi lilin 2024 pada tanggal 19 s.d 20 Desember 2024 di Denpasar;
  - 20) Dukungan apel kesiapsiagaan Baznas Tanggap Bencana pada tanggal 12 s.d 14 Desember 2024 di Semarang oleh Kabadan;
  - 21) Dukungan Operasi SAR Peninjauan Udara Banjir Bandang pada tanggal 5 Desember 2024 di Sukabumi, Jawa Barat oleh Pimpinan Tinggi;
  - 22) Pendampingan kunjungan kerja Reses ke Pontianak Prov. Kalimantan Barat tanggal 5 s.d. 7 Desember 2024, tanggal 8 s.d. 10 Desember 2024 di Jawa Timur, dan tanggal 9 s.d. 10 Desember 2024 di Sorong Papua Barat oleh Pimpinan Tinggi;
  - 23) Dukungan peninjauan Operasi SAR Bencana Erupsi gunung lewatobi pada tanggal 23 s.d 25 November 2024 di Kab.Flores NTT oleh Kabadan;
  - 24) Dukungan Latihan SAR Malindo ke-43 pada tanggal 8 s.d. 11 Oktober 2024 di Tarakan;
  - 25) Dukungan Asistensi Operasi SAR Kondisi Membahayakan Manusia orang terseret arus sungai Lau Biang pada tanggal 18 s.d. 26 Oktober 2024 di Kab.karo Prov. Sumut;
  - 26) Dukungan Harmonisasi Rencana Patroli Nasional (RPN) 2025 oleh Bakamla RI pada tanggal 4 s.d 6 November 2024 di Malang;
  - 27) Dukungan pada pengerahan potensi dan pengendalian Operasi SAR pada event Adisucipto Urban Obstacler run tahun 2024 terdiri dari latihan pra event yang dilaksanakan tanggal 11 s.d. 13 Oktober 2024 di Akademi TNI Angkatan Laut (AL) Surabaya dan main event tanggal 14 s.d. 18 November 2024 di pangkalan TNI AU Adi Sutjipto Yogyakarta;

28) Dukungan Investigasi Kecelakaan Kerja Personel Kantor Pencarian dan Pertolongan Medan Pada Pelaksanaan Operasi SAR Orang Terseret Arus Sungai Lau Biang Desa Limang Kecamatan Tigabinang, Medan, Sumatera Utara yang dilaksanakan tanggal 15 – 23 Oktober 2024.

b. Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi Bidang Pelayanan Publik Basarnas.

Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh Direktorat Operasi dengan pembahasan terkait reformasi birokrasi bidang pelayanan publik dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang lebih obyektif tentang kemajuan pelaksanaan pelayanan publik di Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, dan untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil, kemajuan, dan kendala yang dihadapi dalam melaksanakan reformasi birokrasi khususnya dalam peningkatan pelayanan publik untuk selanjutnya dijadikan masukan dalam perbaikan pelayanan publik berikutnya.

- 1) Telah dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi Bidang Pelayanan Publik pada tanggal 23 s.d. 24 Oktober 2024 di Luminor Hotel Kota;
- 2) Telah dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi Bidang Pelayanan Publik Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan tanggal 18 s.d 21 November 2024 di Kantor Pencarian dan Pertolongan Timika.

c. Peningkatan Kapasitas Urban SAR

Basarnas selaku vokal point di bidang SAR merupakan anggota INSARAG yang aktif di tingkat global maupun Regional Asia-Pacific. Insarag sendiri merupakan suatu jaringan global di bidang pencarian dan pertolongan di perkotaan atau urban SAR (USAR) yang berada dibawah organisasi PBB. Sebagai anggota aktif Insarag, Basarnas

telah membentuk Tim Indonesia Search and Rescue (INASAR) yang melaksanakan operasi SAR terhadap bencana di dalam negeri maupun luar negeri. Basarnas dan Insarag membentuk program yang dinamakan *National Accreditation Process* (NAP) yang merupakan program lanjutan dari Insarag Insarag dimana pada tahun 2019 Basarnas telah berhasil mendapatkan akreditasi sebagai TIM SAR Internasional dengan Standar Medium yang bernaung di bawah UN-OCHA. Dengan demikian TIM INASAR yang sudah mendapatkan sertifikat dari Insarag dapat menjadi contoh dalam meningkatkan kualitas TIM SAR yang ada di setiap kantor Pencarian dan Pertolongan, sehingga NAP dilaksanakan untuk menyamakan persepsi seluruh personel baik mentor maupun NAP dalam membina TIM USAR di Kantor Pencarian dan Pertolongan sesuai dengan kebutuhannya dalam meningkatkan Kapasitas Tim Urban SAR di Kantor Pencarian dan Pertolongan. Kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2024 antara lain:

- 1) Diseminasi Informasi Program NAP pada tanggal 29 Juli s.d 2 Agustus 2024 di Kantor SAR Sorong;
- 2) Diseminasi Informasi Program NAP pada tanggal 4 s.d 9 Agustus 2024 di Kantor SAR Yogyakarta;
- 3) Diseminasi Informasi Program NAP pada tanggal 26 s.d 30 Agustus 2024 di Kantor SAR Makassar;
- 4) Diseminasi Informasi Program NAP pada tanggal 9 s.d 13 September 2024 di Kantor SAR Pontianak;
- 5) Diseminasi Informasi Program NAP pada tanggal 10 s.d 15 November 2024 di Kantor SAR Tanjungpinang;
- 6) Evaluasi Pelaksanaan Diseminasi NAP T.A. 2024 pada tanggal 28 s.d. 30 November 2024 di Semarang;
- 7) Rapat Penyusunan Kelompok Kerja NAP pada tanggal 4 s.d. 6 Desember 2024.

- d. Uji Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan di Kantor Pencarian dan Pertolongan

Kegiatan diselenggarakan oleh Kantor Pusat Basarnas dalam rangka menguji dan mengevaluasi kesesuaian dan ketaatan pelaksanaan suatu operasi SAR oleh seluruh kantor SAR terhadap peraturan dan pedoman standar operasi yang ditetapkan UU No. 29/2014, PP No.21/2017, PP No. 22/2017, Perpres No. 83/2016, dan Perban No. 16/2018 dan Renkon operasi SAR. Kegiatan ini meliputi evaluasi pemenuhan kebutuhan operasi SAR di seluruh kantor SAR, baik dalam hal pengembangan organisasi, kebutuhan personil (pengendali operasi, analis SAR, rescuer, abk, operator kom, operator jaringan, humas, logistik), maupun kebutuhan sarana-prasarana. Adapun jadwal pelaksanaan yaitu:

- 1) Uji Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada tanggal 27 Juli s.d 2 Agustus 2024 di Kansar Manokwari;
- 2) Uji Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada tanggal 17 s.d 23 Agustus 2024 di Kansar Aceh;
- 3) Uji Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada tanggal 31 Agustus s.d. 6 September 2024 di Kansar Banjarmasin;
- 4) Evaluasi Uji Pelaksanaan Operasi di Kansar Bandung pada tanggal 14 sd 15 Desember 2024.

e. *IMO dan ICAO Meeting Group*

Indonesia merupakan salah satu anggota dari *International Maritime Organization* (IMO) sejak tahun 1959. Sebagai badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa, IMO memiliki tujuan untuk meningkatkan kerja sama internasional bidang pelayaran melalui peningkatan aspek-aspek keselamatan, keamanan, berwawasan lingkungan, efisien dan berkelanjutan pada aktifitas pelayaran. Hal ini dapat dicapai dengan mengadopsi standar internasional pada keselamatan dan keamanan laut, efisiensi navigasi pelayaran dan pencegahan dan pengendalian polusi dari kapal, serta pertimbangan-pertimbangan masalah hukum terkait penerapan instrumen IMO yang efektif dan berlaku secara universal. Di Tahun 2024 Basarnas menghadiri sidang IMO navigation,

communication SAR ke-11 pada tanggal 4 sd 13 Juni 2024 di London Inggris dan sidang IMO Council ke 133 di IMO Headquarter London pada tanggal 18 sd 22 November 2024

f. Asistensi Rencana Kontingensi

Asistensi Rencana Kontingensi adalah kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Kantor Pusat sebagai pengawas dan regulator terhadap satuan kerja dibawahnya serta memberikan arahan tentang penyusunan Rencana Kontingensi. Adapun tujuan kegiatan tersebut adalah untuk mensosialisasi Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kontingensi Pencarian dan Pertolongan, bimbingan teknis penyusunan rencana kontingensi, evaluasi dokumen rencana kontingensi yang telah disusun oleh Kantor Pencarian dan Pertolongan serta untuk mengetahui kendala dan hambatan yang dihadapi oleh seluruh Kantor Pencarian dan Pertolongan dalam penyusunan Rencana Kontingensi. Tahun 2024 asistensi rencana kontijensi dilaksanakan:

- 1) Tanggal 18 s.d 20 Februari 2024 di Kantor SAR Tarakan;
- 2) Tanggal 27 s.d 31 Mei 2024 di Pos SAR Labuan Bajo;
- 3) Tanggal 24 sd 27 Juni 2024 di Kantor SAR Denpasar;
- 4) Tanggal 1 sd 5 Juli 2024 di Kantor SAR Padang;
- 5) Tanggal 5 sd 7 Agustus 2024 di Kantor SAR Palu;
- 6) Tanggal 18 sd 21 Agustus 2024 di Kantor SAR Kupang;
- 7) Tanggal 10 s.d 13 September 2024 di Kantor SAR Palangka Raya;
- 8) Tanggal 1 s.d 5 Oktober 2024 di Kantor SAR Jayapura.

## 2. Pengelolaan Kesiapsiagaan

### a. Pelaksanaan Latihan

Latihan SAR dilaksanakan dengan tujuan untuk menguji dan mempertahankan kemampuan personel SAR, menguji prosedur operasi SAR, serta meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar personel atau unit terlibat. Latihan SAR dilaksanakan dalam bentuk

komunikasi, posko maupun manuver di dalam negeri atau luar negeri yang bekerja sama dengan otoritas SAR negara lain. Berikut kegiatan Latihan SAR yang dilaksanakan pada tahun 2024:

1) Latihan SAR Indonesia – Malaysia (Malindo)

Kegiatan Latihan *Search and Rescue (SAR)* Malaysia-Indonesia (Malindo) adalah latihan dalam rangka uji prosedur, uji pengerahan alat utama dan manajemen posko antara pemerintah Indonesia dan Malaysia apabila terjadi kecelakaan penerbangan, pelayaran dan bencana di wilayah perbatasan kedua negara, dengan melibatkan potensi SAR di wilayah masing-masing guna menjalin kerja sama antara Indonesia dan Malaysia dalam penyelenggaraan operasi SAR tersebut. Sehingga kesiapan seluruh unsur dalam pelaksanaan operasi SAR dapat terkoordinir dengan baik apabila terjadi kecelakaan pesawat udara dan kecelakaan kapal, bencana dan kondisi membahayakan manusia di wilayah perbatasan.

Kegiatan ini dilaksanakan tanggal 8 s.d. 12 Oktober 2024 bertempat di Putrajaya Malaysia dan Tarakan dengan melibatkan Kantor Pusat Basarnas, RCC Indonesia, Kantor SAR Tarakan, MRCC Putrajaya, MRSC Kinabalu, CAAM Malaysia dengan tahapan pelaksanaan sebagai berikut:

- a) Pembukaan Kegiatan Latihan SAR Malindo;
- b) Pembahasan Standard Operational Procedure (SOP) SAR Malindo;
- c) Pembahasan Latihan SAR Malindo;
- d) Pelaksanaan Tabletop Exercise (TTX);
- e) Pelaksanaan CPX Latihan SAR Malindo;
- f) Debriefing dan Penutupan Latihan SAR Malindo.

2) Latihan SAR Indonesia – Singapura (Indopura)

Latihan *Search and Rescue (SAR)* Indonesia-Singapura (Indopura) adalah latihan dalam rangka uji prosedur, uji pengerahan alat utama dan manajemen posko antara pemerintah Indonesia dan

Singapura apabila terjadi kecelakaan penerbangan, pelayaran dan bencana di wilayah perbatasan kedua negara, dengan melibatkan potensi SAR di wilayah masing-masing guna menjalin kerja sama antara Indonesia dan Singapura dalam penyelenggaraan operasi SAR tersebut. Sehingga kesiapan seluruh unsur dalam pelaksanaan operasi SAR dapat terkoordinir dengan baik apabila terjadi kecelakaan pesawat udara dan kecelakaan kapal, bencana dan kondisi membahayakan manusia di wilayah perbatasan.

Kegiatan dilaksanakan tanggal 27 s.d. 30 November 2024 secara *hybrid* di wilayah kerja Kantor SAR Natuna dan *Civi Aviation Authority of Singapore (CAAS)* dengan melibatkan Kantor Pusat Basarnas, RCC Indonesia, Kantor SAR Natuna, CAAS, TNI, Polri, Bakamla, KKP, KPLP, BMKG, AirNav, SROP, RRI.

### 3) Latihan Bhakti Kanyini

Latihan Ausindo Bhakti Kanyini merupakan latihan bersama trilateral antara Tentara Nasional Indonesia (TNI), *Australian Defence Force (ADF)*, *United States Marine Corps (USMC)* serta Organisasi Pemerintah lainnya yang berfokus pada Bantuan Kemanusiaan dan Penanggulangan Bencana (*Humanitarian Aid and Disaster Relief/ HADR*). Latihan ini merupakan gabungan antara Latihan Nusa Bhakti Ausindo (NBA) dan *Exercise Crocodile Response* yang pernah dilaksanakan pada tahun sebelumnya. Pelaksanaan Latihan Ausindo Bhakti Kanyini pada tahun 2024 adalah yang pertama.

Nama Latihan Bhakti Kanyini diambil dari 2 kata yaitu “Bhakti” dan “Kanyini”. Kata “Bhakti” diambil dari bahasa Sanskerta, mempunyai makna yang terkait dengan tindakan pengabdian, pelayanan, dan kesetiaan kepada negara, komunitas, keluarga, atau bahkan kepada entitas ilahi. Istilah “Kanyini” merupakan prinsip keterhubungan melalui kepedulian dan tanggung jawab yang mendasari kehidupan Aborigin. Kanyini menyiratkan bahwa setiap

orang bertanggung jawab terhadap satu sama lain. Sehingga Bhakti Kanyini mempunyai makna pengabdian/ pelayanan kepada masyarakat yang diberikan sebagai kepedulian dan tanggung jawab manusia terhadap sesamanya.

Latihan terdiri dari *Academic Session*, *Table Top Exercise (TTX)*, *Field Training Exercise (FTX)* dan *After Action Review (AAR)*. Persiapan pelaksanaan Latihan Ausindo Bhakti Kanyini 2024 telah dimulai dari bulan April 2024. Kegiatan Latihan Bhakti Kanyini Ausindo 2024 telah berjalan dengan aman dan lancar. Dari pelaksanaan latihan dan MNF SOP terdapat beberapa hal yang dapat menjadi pembelajaran dalam Bantuan Kemanusiaan dan Penanggulangan Bencana (HADR):

- a) Pendekatan Terkoordinasi dan Multinasional dengan Penghormatan terhadap Kedaulatan
  - Pendekatan MNF SOP menekankan pentingnya koordinasi yang erat dan terstruktur antara berbagai negara dan organisasi selama operasi HADR;
  - Indonesia dapat meningkatkan koordinasi antar lembaga pemerintah, TNI, POLRI serta organisasi internasional dan negara tetangga dalam penanganan bencana.
- b) Penekanan pada Standar Operasi dan Prosedur (SOP) Bersama
  - MNF SOP menekankan pentingnya memiliki SOP yang seragam untuk memastikan kesesuaian operasi antara berbagai militer dan negara yang terlibat;
  - Indonesia dapat menyesuaikan SOP nasional yang kompatibel dengan standar internasional akan meningkatkan interoperabilitas Indonesia dalam HADR. Ini penting terutama ketika bekerja dengan mitra sesuai prosedur internasional.
- c) Latihan Gabungan, latihan bersama dan Simulasi
- d) Penggunaan Teknologi dan Informasi (share data dan informasi)

- e) Pendekatan HADR yang berpusat pada komunitas
- 4) Latihan Gabungan Dalam Rangka Menghadapi Isu Megathrust  
Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 16 s.d.19 September 2024 yang bertempat di Mercusuar Ditjen Perhubungan Laut Cikoneng, Pantai Anyer, Banten dengan melibatkan Kantor Pusat Basarnas, Kantor SAR Lampung, Kantor SAR Banten, instansi terkait. Tujuan diselenggarakannya Latihan Gabungan Kesiapsiagaan SAR ini antara lain:
  - a) Mengimplementasikan prosedur operasi SAR pada saat terjadi bencana alam gempa bumi dan tsunami.
  - b) Melatih Kesiapsiagaan personil SAR gabungan.
  - c) Menguji kelaikan sarana, peralatan dan perlengkapan SAR yang digunakan.
- 5) Latihan Gabungan Dalam Rangka Menghadapi Bencana Alam Hidrometeorologi  
Dilaksanakan pada tanggal 9 s.d. 12 Desember 2024 yang bertempat di Central Park Meikarta, Cikarang, Kabupaten Bekasi. dengan melibatkan Kantor Pusat Basarnas, Kantor SAR Jakarta, 400 peserta dari 90 organisasi potensi SAR. Kegiatan ini dirancang untuk menguji dan memperkuat kemampuan koordinasi, komunikasi, serta eksekusi lapangan dari berbagai pihak yang terlibat, termasuk lembaga pemerintah, organisasi SAR, dan relawan. Dengan latihan ini, diharapkan respons terhadap bencana dapat dilakukan secara cepat, terkoordinasi, dan efisien.
- 6) Latihan Heli *Rescue*  
Dilaksanakan pada tanggal 17 s.d. 20 November 2024 yang bertempat di Lanud Sri Mulyono Herlambang, Palembang dengan melibatkan personil dari Kantor Pusat Basarnas dan Kantor SAR

Palembang. Latihan Gabungan Heli Rescue Refresh Kantor SAR Palembang bertujuan untuk:

- a) Merefresh Rescuer saat bekerja di Helikopter;
- b) Membina Kesiapsiagaan Sumber Daya SAR di wilayah Sumatera Selatan dan sekitarnya;
- c) Meningkatkan sinergitas dengan stakeholder dalam pelaksanaan Operasi SAR Gabungan.

7) Latihan Urban SAR (VAR)

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 3 s.d. 6 April 2024 yang bertempat di Jalan Lintas Sumatera depan pintu Toll Bakauheni Utara dengan melibatkan personil dari Kantor Pusat Basarnas dan Kantor SAR Lampung, Polri, Komunitas Relawan Rescue.

8) Latihan Urban SAR (Gempa Bumi)

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 5-10 Agustus 2024 yang bertempat di Alun-alun Kidul Yogyakarta dengan melibatkan personil dari Kantor Pusat Basarnas dan Kantor SAR Yogyakarta, Polri, Komunitas Relawan Rescue.

9) Latihan *Karuna* Nisevanam

Maksud pelaksanaan Latihan *Karuna* Nisevanam Tahun 2024 adalah untuk membina kemampuan, koordinasi, dan kesiapsiagaan petugas pencarian dan pertolongan serta menguji prosedur pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan. Tujuan Latihan *Karuna* Nisevanam Tahun 2024 adalah menguji prosedur Pencarian dan Pertolongan, menguji dan membina kesiapsiagaan Petugas Pencarian dan Pertolongan; dan menguji kemampuan operasional sarana dan prasarana Pencarian dan Pertolongan.

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 25-30 Agustus 2024 yang bertempat di Dermaga Penyeberangan ASDP Ketapang

Banyuwangi, Dermaga Bulusan Banyuwangi, Perairan Selat Bali dengan melibatkan personil dari Kantor Pusat Basarnas, Kantor SAR Surabaya, Kantor SAR Denpasar, Kantor SAR Mataram, Skadron 400 Puspenerbal, Lanal Banyuwangi, Kodim Banyuwangi, Polair Polresta Banyuwangi, KPLP Tanjungwangi, SROP Banyuwangi, KSOP Banyuwangi, Balai Karantina Kesehatan Bwi, PT. ASDP, PT. Dharma Lautan Utama, Tagana, SAR MTA, Potensi SAR Lainnya dan sebagai observer adalah Japan Coast Guard, 31 Kepala Kantor SAR Basarnas, KPLP Ditjen Hubla Kemenhub, Dit. Kapel Ditjen Hubla Kemenhub RI, Dit. TSDP Ditjen Hub Dat Kemehub RI.

b. Pelaksanaan Siaga SAR Khusus

Siaga Pencarian dan Pertolongan (Siaga SAR) adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memonitor, mengawasi, mengantisipasi, dan mengkoordinasikan kegiatan Pencarian dan Pertolongan. Dalam situasi dan kondisi tertentu, yaitu keadaan dimana terjadi peningkatan aktivitas dan mobilitas masyarakat setempat yang dapat berpotensi terjadinya kedaruratan, maka dilaksanakan Siaga SAR Khusus dengan mendekatkan dan menggelar sumber daya SAR pada wilayah dan/atau situasi khusus yang berpotensi menimbulkan kecelakaan, bencana dan/atau kondisi membahayakan manusia yang meliputi pada hari libur nasional, hari besar keagamaan, hari perayaan tradisi dan budaya, kunjungan pejabat tinggi negara, kegiatan pariwisata, olahraga internasional, nasional dan daerah dan pada status bencana. Berikut kegiatan Siaga SAR Khusus yang dilaksanakan pada tahun 2024:

- 1) Siaga SAR Khusus Lebaran Tahun 2024
  - a) Pada tanggal 3 s.d. 19 April 2024 telah dilaksanakan siaga Lebaran;
  - b) Melaksanakan Liaison Officer yang tergabung di Posko Terpadu Kementerian Perhubungan;

- c) Monitoring pelaksanaan siaga Lebaran di Kantor SAR Tanjung Pinang, Palembang, Yogyakarta, Banjarmasin
- 2) Siaga Khusus Natal 2024 dan Tahun Baru 2025

Kegiatan Siaga SAR Khusus Natal 2024 dan Tahun Baru (Nataru) 2025 yang dilaksanakan secara serentak oleh Kantor Pusat dan Kantor SAR berlangsung selama 19 hari mulai tanggal 18 Desember 2024 s.d. tanggal 5 Januari 2025. Berikut keterlibatan Basarnas pada Nataru sebagai berikut:

  - a) Pembukaan Posko Pusat Angkutan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 di Kementerian Perhubungan;
  - b) Melakukan pantauan dan monitoring Posko Basarnas di Semarang dengan menggunakan helikopter HR-1301.
- 3) Siaga SAR Khusus HUT Pekabaran Injil di Tanah Papua

Basarnas melaksanakan siaga SAR Khusus dalam rangka HUT Pekabaran Injil ke-169 di tanah Papua pada 05 Februari 2024. Siaga SAR khusus dilaksanakan dari pagi hari pukul 06.00 wit hingga selesai, dengan mengerahkan alat laut, alat komunikasi serta alat medis, alat laut yakni KN. SAR Kumbakarna, rubber boat, sea rider, jetsky bersama personil yang siaga di beberapa titik yaitu, Dermaga Pulau Mansinam, pelabuhan umum Manokwari, Pulau Lemon serta di perairan Manokwari - Mansinam.
- 4) Simulasi Protokol Keamanan Dan Keselamatan DPSP dan Siaga SAR Khusus F1 H2O Powerboat Danau Toba

Indonesia menjadi tuan rumah ajang balap Formula One Power Boat (F1 Powerboat) untuk kedua kalinya pada tanggal 1-3 Maret 2024 bertempat di Balige, Danau Toba dengan diikuti sebanyak 17 pembalap internasional. Kejuaraan Dunia Perahu Motor Formula 1 adalah sebuah kompetisi balap perahu motor internasional untuk motor perahu yang diselenggarakan oleh *Union Internationale*

*Motonautique* (UIM) dan dipromosikan oleh H2O Racing, sehingga sering disebut sebagai F1H2O. Kejuaraan tersebut merupakan balap motor perahu pesisir kelas tertinggi di dunia.

Basarnas akan mendukung penuh event F1 H2O Powerboat dengan melaksanakan Simulasi Keselamatan Protokol DPSP dan Siaga SAR Khusus F1 H2O Powerboat pada 27 Februari s.d. 5 Maret 2024 dengan menggerakkan 25 alut yang terdiri dari alut Basarnas, potensi SAR TNI/ Polri, BPBD, serta komunitas lainnya, kemudian dari pusat Basarnas mengerahkan satu unit Helikopter HR-3606 untuk evakuasi medis udara, pada F1 power boat hari ini sudah berjalan dua etape, dimana etape pertama ada 9 racer, dan etape kedua ada 8 racer

5) Siaga SAR Khusus Upacara HUT RI Ke-79 di IKN

Basarnas melaksanakan Siaga SAR Khusus Pengamanan Wilayah dalam rangka HUT ke-79 Republik Indonesia (RI) yang diselenggarakan di Ibu Kota Nusantara (IKN) Penajam Paser Utara. Satu unit helikopter Dauphin AS 365 N3+ HR-3603 disiagakan guna mendukung pengamanan. Basarnas juga mengerahkan personil, peralatan, dan alut diantaranya KN SAR Wisanggeni yang disiagakan mulai dari 14 s.d 18 Agustus 2024. Adapun rute evakuasi titik helipad di IKN yaitu di Penajam Paser Utara dan RS Kanujdoso Djatiwibowo.

6) Siaga SAR Khusus Indonesia Africa Forum (IAF)

Dalam rangka menyukseskan High Level Forum on Multi Stakeholder Partnership (HLF MSP) dan Konferensi Forum Tinggi (IAF) Ke -2 Tahun 2024. Basarnas menjadi Satgas Evakuasi Bencana Alam guna memberikan jaminan bagi para tamu Undangan terutama bagi Kepala Negara atau Pejabat yang hadir. Dalam Rangkaian Acara HLF MSP & IAF di Denpasar, Bali yang

berlangsung pada tanggal 1-3 September 2024. Basarnas mengerahkan 1 unit Helikopter AS 365 N3+ Dauphin HR 3606 kepada Satgasud Kogabpadpam guna mendukung kelancaran kegiatan tersebut.

7) Siaga SAR Khusus Bali *International Airshow* 2024

Event Bali International Air Show (BIAS) diselenggarakan di Apron Selatan Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Badung, Bali, pada, tanggal 18 s.d 21 September 2024 dan dibuka oleh Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Untuk mendukung event tersebut Basarnas mengerahkan 2 (dua) Helikopter, Kapal SAR, dan 100 Personel.

8) Siaga SAR Khusus MotoGP 2024

Basarnas menyiapkan 2 (dua) Helikopter di Helipad Medical Center Sirkuit Mandalika selama Event MotoGP 2024 berlangsung, tanggal 27 hingga 29 September 2024. Helikopter yang didatangkan dari Surabaya Jawa Timur dan Lanud Atang Sendjaja Bogor tersebut menjadi bagian dari kesiapsiagaan Evakuasi Medis Udara (EMU) kepada para riders MotoGP Mandalika, mulai dari Moto3, Moto2, dan MotoGP yang telah memulai free practice hari Jumat, 27 September 2024, sprint race hari Sabtu, 28 September 2024, hingga puncaknya balapan pada hari Minggu, 29 September 2024.

Di dalam helikopter tersebut telah dilengkapi tandu, alat monitor jantung, ventilator, dan oksigen berikut tim medis yang telah mendapat rekomendasi dari Dorna, selaku penyelenggara. EMU dari arena Mandalika menuju RSUD NTB. Tidak hanya peralatan utama (alut) udara, Basarnas juga mengerahkan alut laut seperti kapal, rubber boat, dan jet sky di Pantai Kuta Mandalika serta tim

SAR darat di berbagai titik krusial arena balap motor paling bergengsi di dunia tersebut.

9) Siaga SAR Khusus *Aqua Bike Championship Tahun 2024*

Basarnas melaksanakan Siaga SAR Khusus dalam perhelatan Internasional "Aqua Bike Championship 2024". Balap Aquabike Jetski World Championship 2024 dilaksanakan mulai tanggal 10 s.d. 17 November 2024 di Danau Toba Sumatera Utara

c. Basarnas *Command Center* (BCC)

Dalam rangka mendukung Penyelenggaraan Operasi SAR yang cepat, tepat, aman, terpadu dan terkoordinasi, maka Basarnas telah menyiapkan fasilitas yaitu BCC dengan fungsi sebagai pusat koordinasi dan dukungan pada kegiatan penyiapan, kesiapsiagaan dan pengerahan serta pengendalian dalam pelayanan jasa Pencarian dan Pertolongan. BCC memiliki fungsi antara lain :

- 1) Melaksanakan dukungan dan koordinasi pelaksanaan pelatihan, sosialisasi, siaga dan latihan serta Operasi SAR;
- 2) Melaksanakan pemantauan dan dukungan pelaksanaan kesiapsiagaan unit SAR/SRU;
- 3) Melaksanakan deteksi dini dan menerima laporan terjadinya kecelakaan kapal, kecelakaan pesawat, kecelakaan dengan penanganan khusus, bencana, dan kondisi membahayakan manusia;
- 4) Melaksanakan dukungan pengerahan dan pengendalian SRU dalam pelaksanaan Operasi SAR sesuai dengan rencana Operasi SAR dari Koordinator SAR/ SAR *Coordinator* (SC) maupun dari Koordinator Misi SAR/ SAR *Mission Coordinator* (SMC);
- 5) Melaksanakan dukungan koordinasi, kerjasama dan pertukaran informasi dengan potensi Pencarian dan Pertolongan dan negara lain dalam pelaksanaan Siaga dan Operasi SAR.

### 3. Pengelolaan Sistem Komunikasi

#### a. Layanan Terhadap Registrasi *Beacon*

Sesuai amanat undang-undang nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan, Pendaftaran radio beacon dilaksanakan di Basarnas, adapun jumlah peralatan radio beacon yang didaftarkan mulai tahun 2016 di Basarnas adalah sebagai berikut:

No	Tahun	ELT	EPIRB	PLB	Total
1	2016	2268	172	165	2605
2	2017	2412	292	173	2877
3	2018	2703	314	200	3217
4	2019	2882	655	232	3769
5	2020	3069	1190	274	4552
6	2021	3241	2361	323	5925
7	2022	3398	2985	342	6725
8	2023	3660	3713	438	7811
9	2024	3764	4605	482	8851

Sumber data: Direktorat Sistem Komunikasi

Adapun langkah-langkah yang dilakukan untuk meningkatkan jumlah registrasi *beacon* meliputi:

- 1) Pengembangan aplikasi radio *beacon* yang dapat diakses melalui web browser maupun aplikasi android;
- 2) Melakukan sosialisasi secara intensif terkait sistem deteksi dini Basarnas kepada stakeholder serta perusahaan penerbangan maupun pelayaran.

#### b. Asistensi Dukungan Komunikasi

Asistensi Dukungan Komunikasi bertujuan untuk mendukung pelaksanaan operasi SAR dan sebagai penunjang keberhasilan operasi SAR. Karena dalam setiap kegiatan SAR diperlukan sistem komunikasi SAR yang handal. Komunikasi berfungsi sebagai deteksi dini, koordinasi, komando dan pengendalian serta untuk kepentingan administrasi dan logistik. Kegiatan ini merupakan bentuk kerja sama antara Kantor Pusat dengan Kantor Pencarian dan Pertolongan untuk

memaksimalkan peralatan komunikasi pada pelaksanaan siaga, latihan dan operasi Pencarian dan Pertolongan.

Tabel 3.30. Lokasi Kegiatan Asistensi Dukungan Komunikasi

No	Lokasi Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan
1	Dukungan Komunikasi Operasi Kecelakaan Kereta di Kansar Bandung	5-6 Januari 2024
2	Dukungan Komunikasi Operasi SAR Di Kansar Makassar	2024
3	Dukungan Komunikasi Pameran HEXIA, Di Cengkareng.	28 -30 Juni 2024
4	Dukungan Komunikasi dalam rangka latihan <i>karuna nisevanam</i>	25-30 Agustus 2024
5	Asistensi <i>Underwater Recovery Training</i>	2024
6	Asistensi Dukungan Komunikasi Satelit untuk Drone	2024
7	Dukungan Komunikasi Sarex Malindo di Tarakan Kalimantan Utara	7-11 Oktober 2024

Sumber data: Direktorat Sistem Komunikasi

c. Pemenuhan Peralatan Komunikasi

Pada Triwulan IV Tahun 2024 muncul kegiatan belanja modal yang baru, karena terkait kebutuhan organisasi dan adanya sisa belanja modal agar disusun untuk menjadi belanja modal berikutnya, kebutuhan dimaksud hasil evaluasi latihan dan operasi ditahun sebelumnya dan tahun berjalan, adapun nama kegiatannya adalah Pengadaan Proteksi Petir Meolut dan Pengadaan *Tactical Field Operation Communication System*. Berikut ini pengadaan Tahun 2024 beserta penempatannya adalah:

1) Pengadaan *Base Communication System*

Based Communication system merupakan peralatan komunikasi yang terdiri dari peralatan komunikasi radio *High Frekuensi (HF)*, *radio Very High Frekuensi (VHF)* yang digunakan untuk pelayaran dan amatir serta peralatan *repeater base VHF-FM Radio Digilog*. Berikut penempatan Tahun 2024:

- a) Pos SAR Marisa;
- b) Pos SAR Wonosobo;
- c) Unit Siaga SAR Pematang;
- d) Unit Siaga SAR Rembang;
- e) Unit Siaga SAR Borobudur;
- f) Unit Siaga SAR Lubuk Lingau;
- g) Unit Siaga SAR Ulu;
- h) Unit Siaga SAR Bengkulu Siaga.

2) Pengadaan *Digital Mobile Radio VHF*,

*Digital Mobile Radio VHF* merupakan sistem komunikasi repeater yang menggunakan frekuensi VHF digunakan untuk komunikasi suara maupun data, tracking pergerakan *Search and Rescue Unit (SRU)*, serta memungkinkan jaringan repeater yang ada untuk dapat diintegrasikan dengan Kantor Pusat maupun Kantor Pencarian dan Pertolongan Lainnya. Berikut penempatan Tahun 2024:

- a) Kansar Gorontalo penempatan pada tower Polres Dumbo;
- b) Pos SAR Marisa penempatan pada Mitratel Telkom Lamu;
- c) Pos SAR Kwandang penempatan pada Mitratel Dambalo;
- d) Unit Siaga SAR Oku Timur penempatan pada TVRI Batu Raja;
- e) Unit Siaga SAR Lubuk Lingau penempatan pada TVRI Lubuk Lingau;

- 3) Pengadaan *Walldisplay* Basarnas *Command Center*  
*Walldisplay* Basarnas *Command Center* dipergunakan untuk mendukung operasional Basarnas Command Centre.
- 4) Pengadaan *Tactical Field Operation Communication System*  
Peralatan komunikasi satelit broadband dan peralatan komunikasi telestrial yang digunakan untuk mendukung kegiatan Operasi maupun Latihan Pencarian dan Pertolongan. Penempatan pada Kantor Pusat Basarnas dan UPT.

d. Pemeliharaan Komunikasi

Pelaksanaan pemeliharaan peralatan komunikasi di Basarnas merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menjaga dan memperbaiki peralatan komunikasi agar selalu dalam keadaan siap guna mendukung operasi Pencarian dan Pertolongan secara efektif dan efisien sesuai dengan standar (fungsional dan kualitas). Pemeliharaan Peralatan komunikasi pada Tahun 2024 meliputi:

- 1) Penyediaan suku cadang peralatan komunikasi;
- 2) Pemeliharaan repater Tahun 2024 pada Kansar Surabaya, Semarang dan Denpasar;
- 3) Pemeliharaan Communication SAR Mobile untuk memelihara mobil komunikasi yang dimiliki agar tetap dalam performa. Mobil komunikasi yang dirawat meliputi:

- Commob Longrange Nopol B 9732 PQV
- Commob Tipe 1 Nopol B 8488 BX
- Commob GTA Nopol B 9664 PSC

Perawatan yang dilakukan seperti service berkala, pembelian AKI, pergantian ban mobil serta pembelian BBM untuk operasional.

- 4) Pemeliharaan deteksi dini meliputi Pemeliharaan Peralatan Flight Monitoring System dan peralatan MEOLUT. Pemeliharaan MEOLUT meliputi:
  - 6 Channel MEOLUT Maintenance

- Cospas-Sarsat LGM MCC System Maintenance
  - Cospas-Sarsat DR LGM MCC- Software Update
- 5) Perpanjangan Izin Stasiun Radio (ISR) untuk peralatan radio HF, radio VHF dan peralatan repeater VHF;
  - 6) Perpanjangan Sewa Tower yang digunakan untuk penempatan peralatan repeater yang ada di Kantor Pencarian dan Pertolongan.

#### 4. Pengelolaan Sarana dan Prasarana

##### a. Pemenuhan Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana memiliki pengaruh terhadap pelaksanaan operasi SAR. Pada tahun 2024 Basarnas telah melaksanakan pengadaan sarana guna mendukung pelaksanaan operasi SAR. Selama tahun 2024 Basarnas melaksanakan:

- 1) Pengadaan *Landing Craft/ Rubber Boat* sebanyak 40 Unit
- 2) Pengadaan *Rigid Bouyancy Boat* sebanyak 6 unit
- 3) Pengadaan *Rescue Water Craft* sebanyak 5 unit
- 4) Pengadaan *Double Stabilized Boat* sebanyak 8 unit
- 5) Pengadaan *Forklift* sebanyak 2 unit
- 6) Pengadaan *Rescue Car Type II* sebanyak 25 unit
- 7) *Rescue Car Type 1* sebanyak 4 unit
- 8) *Rescue Motor* sebanyak 17 unit

##### b. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Untuk menjaga kesiapan sarana maupun prasarana, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan melaksanakan pemeliharaan secara rutin. Hal ini dikarenakan kesiapan sarana merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi capaian indikator kinerja *response time*. Upaya yang untuk pemeliharaan sarana dilakukan melalui pemantauan ke beberapa lokasi baik secara luring maupun daring.

## 5. Pembinaan Potensi SAR

### a. Program SAR Goes to School

Pada tahun 2024, program SAR Goes to School yang dilaksanakan oleh Basarnas baik tingkat pusat maupun daerah berhasil menjangkau ratusan sekolah di berbagai daerah di Indonesia, dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran pelajar, guru, dan masyarakat sekitar tentang pentingnya keselamatan, pertolongan pertama, dan kesiapsiagaan bencana. Selama Tahun 2024 kegiatan dilaksanakan sebanyak 15 kali dengan jumlah peserta sebanyak 2.594 orang.

### b. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan Kelompok Masyarakat di Bidang Pencarian dan Pertolongan juga dapat memperkuat rasa solidaritas dan kohesi sosial dalam komunitas, yang selanjutnya dapat meningkatkan kapasitas mereka untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi bersama. Pemberdayaan Kelompok Masyarakat di Bidang Pencarian dan Pertolongan dilaksanakan melalui kegiatan berupa workshop tentang mitigasi bencana, SOP evakuasi, dan simulasi evakuasi. Hal ini diharapkan akan menciptakan jaringan yang tangguh dan efektif yang siap bertindak cepat dan aman dalam menghadapi kondisi darurat akibat bencana. Untuk mencapai tujuan tersebut Basarnas melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat di berbagai wilayah rawan bencana dan kedaruratan lainnya. Selama Tahun 2024 dilaksanakan di 8 lokasi dengan jumlah peserta sebanyak 750 orang, dengan rincian sebagai berikut:

Kantor SAR	Lokasi	Tanggal	Peserta
Mamuju	Kab. Majene	14-16 Mei 2024	1 Kelompok Masyarakat (100 orang)

Kantor SAR	Lokasi	Tanggal	Peserta
Maumere	Kab. Manggarai Barat	28-30 Mei 2024	1 Kelompok Masyarakat (50 orang)
Nias	Kab. Nias Selatan	11-13 Juni 2024	1 Kelompok Masyarakat (100 orang)
Manado	Kota Tomohon	9-11 Juli 2024	1 Kelompok Masyarakat (100 orang)
Palu	Kota Palu	29-31 Juli 2024	1 Kelompok Masyarakat (100 orang)
Padang	Kab. Tanah Datar	13-15 Agustus 2024	1 Kelompok Masyarakat (100 orang)
Banten	Kab. Serang	17-19 Oktober 2024	1 Kelompok Masyarakat (100 orang)
Cilacap	Kab. Kebumen	14-16 Desember 2024	1 Kelompok Masyarakat (100 orang)
Jumlah			8 Kelompok Masyarakat (750 orang)

Sumber: Direktorat Bina Potensi

- c. Forum Koordinasi Potensi Pencarian dan Pertolongan (FKP3)
- Forum Koordinasi Potensi Pencarian dan Pertolongan (FKP3) merupakan wadah koordinasi dan komunikasi bagi seluruh Potensi Pencarian dan Pertolongan yang berasal dari Kementerian/Lembaga, TNI-Polri, Badan Usaha, Instansi/ Organisasi non-Pemerintah, relawan, serta masyarakat, agar dukungan potensi SAR terhadap Basarnas

dapat dikelola secara efektif sesuai dengan kebutuhan pelayanan Operasi SAR. Dengan adanya forum ini diharapkan fungsi koordinasi di tataran Tingkat Pusat pada pelaksanaan operasi Pencarian dan Pertolongan dapat lebih ditingkatkan sehingga pelayanan Pencarian dan Pertolongan kepada masyarakat di wilayah Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dapat berjalan dengan cepat, tepat, dan terpadu. Selain itu, dengan terintegrasinya seluruh Potensi Pencarian dan Pertolongan, baik di tingkat pusat maupun Tingkat Pusat, diharapkan mampu memberikan rasa aman dan mendorong segala aspek pembangunan nasional yang telah digariskan pemerintah.

## 6. Pembinaan Tenaga SAR

Berikut ini Pembinaan Tenaga SAR yang dilaksanakan selama Tahun 2024:

### a. Pembinaan Kompetensi Tenaga Medis

Diklat ini bertujuan agar peserta mampu melakukan penatalaksanaan kegawatdaruratan akibat trauma di Unit/Instalasi kesehatan atau gawat darurat. Adapun pelatihan yaitu:

- 1) Telah dilaksanakan Pelatihan *Basic Trauma Cardiac Life Support* (BTCLS) Gelombang I tanggal 8 s.d.15 September 2024 di Bogor;
- 2) Telah dilaksanakan Pelatihan *Basic Trauma Cardiac Life Support* (BTCLS) Gelombang II tanggal 22 September s.d.29 September 2024 di Bogor.

### b. Pelatihan dan Peningkatan Kompetensi Pelatihan Awak Kapal

Salah satu kendala yang dihadapi saat ini adalah minimnya personil awak kapal *rescue boat*. Beberapa solusi yang diambil salah satunya adalah perbantuan tenaga dari jabatan lain, tetapi masalah yang muncul adalah kompetensi yang dimiliki sangat minim karena *basically* belum pernah mempelajari ilmu perkapalan. Untuk itu, Direktorat Bina Tenaga merasa perlu melaksanakan kegiatan pelatihan dan peningkatan kompetensi dan keahlian awak kapal sehingga para awak kapal dapat bekerja dengan baik. Harapannya, para awak kapal dapat

memelihara dan mengoperasikan kapal dengan baik dan benar. Pada Tahun 2024 telah dilaksanakan Peningkatan Kompetensi Pendidikan dan Pelatihan Pelaut Kapal Negara (DPKN) Tk. III Dek dan Mesin pada 1 Agustus s.d. 13 Oktober 2024 secara *online* dan 14 Oktober s.d. 29 November 2024 secara *offline*.

c. Uji Periodik Tenaga SAR

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Pencarian dan Pertolongan dibutuhkan pembinaan baik kuantitas pengetahuan maupun kualitasnya, dalam upaya meningkatkan kemampuan tersebut maka dilaksanakan Uji Periodik Tenaga SAR berupa Monitoring dan Evaluasi dalam Program Pembinaan Tenaga dimasing-masing Kantor SAR dalam mencapai Tenaga Pencarian dan Pertolongan (*rescuer*) yang ideal untuk mendukung tugas dan fungsi Basarnas. Tahun 2024 telah dilaksanakan Uji Periodik bagi tenaga Pranata Pencarian dan Pertolongan pada Triwulan I, II, III, IV secara *daring* dan *luring* pada bulan Maret, Juli, Desember 2024.

d. *Training Crew Helicopter*

*Training crew helicopter* merupakan latihan yang diperuntukkan bagi seluruh crew yang mengawaki helikopter Basarnas. Tujuan dari latihan ini ialah untuk menjaga dan meningkatkan kemampuan personil yang terlibat dalam pengawakan helikopter sehingga menghasilkan Pilot yang berkualitas dan berkompetensi. Adapun pelaksanaan *training crew helikopter* dimulai dari bulan Januari – Juli 2024. Latihan ini sendiri terdiri atas:

- 1) *Refreshing* dan *Initial Type Rating* di Satud PP;
- 2) Latihan peningkatan kompetensi profesi penerbang di Lanudal Surabaya;
- 3) Latihan peningkatan kompetensi profesi penerbang di Lanudal Tanjung Pinang;

- e. **Pembinaan Awak Sarana Udara Melalui Simulator**  
Telah dilaksanakan peningkatan kompetensi 11 Pilot Basarnas melalui Simulator Helikopter pada tanggal 21-27 Oktober 2024 di Australia, pada tanggal 2-10 November 2024 dan 2-8 Desember 2024 di Perancis.
- f. **Peningkatan Kompetensi Awak Drone**  
Peningkatan kompetensi awak drone Basarnas pada tanggal 27 Mei s.d. 1 Juni 2024 di Bogor.
- g. **Uji Kompetensi Pranata Pencarian dan Pertolongan**  
Kegiatan ini dilaksanakan untuk pegawai yang akan melakukan kenaikan jenjang setingkat lebih tinggi dalam lingkup Jabatan Fungsional Pranata Pencarian dan Pertolongan. Jenjang yang ada dalam JF dimaksud dimulai dari pemula, terampil, mahir dan penyelia.
  - 1) Uji kompetensi ini mencakup beberapa aspek yang diuji, antara lain uji keterampilan teknis (praktek dan teori) dan uji kebugaran jasmani.
  - 2) Pelaksanaan uji kompetensi terbagi dalam 2 (dua) gelombang, yakni pada bulan April 2024 dan bulan Oktober 2024.

## 7. Diklat SAR

Diklat SAR adalah pendidikan dan pelatihan yang bertujuan untuk membekali tenaga *rescuer* dengan pengetahuan, keterampilan, dan kesiapsiagaan dalam operasi pencarian dan pertolongan terhadap korban kecelakaan, bencana, atau kondisi darurat lainnya. Adapun tujuan Diklat SAR antara lain yaitu memberikan keterampilan dasar hingga lanjutan dalam teknik pencarian dan pertolongan, membentuk kesiapan mental dan fisik dalam menghadapi kondisi darurat, melatih kerja sama dengan berbagai pihak/ potensi pencarian dan pertolongan. Berikut Diklat SAR yang dilaksanakan selama Tahun 2024:

Tabel 3.31. Pelaksanaan Diklat SAR Tahun 2024

NO	NAMA KEGIATAN	PELAKSANAAN	TEMPAT	JUMLAH PESERTA	LULUS	TIDAK LULUS	KETERANGAN
1	Pelatihan <i>Medical First Responder</i> (MFR) Angkatan XXVIII Tahun 2024	05 S.D 15 Februari 2024 dan 18 Februari s.d. 03 Maret 2024	Zoom / Daring dan Balai Pelatihan SDMPP	39	39		Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan
2	Pelatihan <i>Medical First Responder</i> (MFR) Angkatan XXIX Tahun 2024	05 s.d.15 Februari 2024 dan 18 Februari s.d. 03 Maret 2024	Zoom / Daring Dan Balai Pelatihan SDMPP	37	37		Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan
3	Pelatihan <i>Confined Space Rescue</i> (CSR) Angkatan V TAHUN 2024	05 s.d. 16 Februari 2024	Balai Pelatihan SDMPP	12	12		Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan
4	Pelatihan <i>Sar Planning</i> Angkatan XXXIV Tahun 2024 di Mataram	01 s.d. 25 Maret 2024	Kantor Pencarian dan Pertolongan Mataram	26			Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan
5	Bimbingan Teknis Penanganan Musibah Di Perkotaan	05 s.d. 07 Maret 2024	Balai Pelatihan SDMPP	22	22		Telah mengikuti pelatihan
6	Pelatihan <i>High Angle Rescue Technique</i> (HART) Angkatan XVII Tahun 2024	13 s.d. 26 Maret 2024	Balai Pelatihan SDMPP	11			Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan
7	Pelatihan Profisiensi Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Pelatihan Teknis Suibstantif Tahun 2024	27 s.d. 29 Maret 2024	Hotel Puncak Raya, Bogor	30			Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan
8	Pelatihan Jungle Rescue Angkatan XVI	1 s.d. 29 Maret 2024	Balai Pelatihan SDMPP	16			Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan
9	Pelatihan Pencarian Dan Pertolongan Di Permukaan Air ( <i>Water Rescue</i> ) Angkatan XVII	1 s.d. 21 Mei 2024	Balai Pelatihan SDMPP	40			Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan

NO	NAMA KEGIATAN	PELAKSANAAN	TEMPAT	JUMLAH PESERTA	LULUS	TIDAK LULUS	KETERANGAN
10	Pelatihan Collapsed Structure Search And Rescue (CSSR) Angkatan IX	1 s.d 21 Mei 2024	Balai Pelatihan SDMPP	40	40	-	Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan
11	Pelatihan High Angle Rescue Technique Angkatan XVIII	27 Mei s.d. 14 Juni 2024	Balai Pelatihan SDMPP	43	42	1	Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan
12	Pelatihan Jungle Rescue Angkatan XVII	27 Mei s.d. 14 Juni 2024	Balai Pelatihan SDMPP	42	41	1	Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan
13	Pelatihan Vehicle Accident Rescue (VAR) Angkatan V	19 Juni s.d. 3 Juli 2024	Balai Pelatihan SDMPP	11	-	-	Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan
14	Pelatihan Vehicle Accident Rescue (VAR) Angkatan VI	14 s.d 30 Agustus 2024	Balai Pelatihan SDMPP	35	-	-	Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan
15	Pelatihan CSR Angkatan VI	26 Agustus s.d 10 September 2024	Balai Pelatihan SDMPP	35	-	-	Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan
16	Pengembangan Kompetensi Instruktur Di Bidang Medical First Responder (MFR)	18 s.d 20 September 2024	Balai Pelatihan SDMPP	11	-	-	Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan
17	Pelatihan Instruktur Angkatan XXV	18 September s.d 10 Oktober 2024	Balai Pelatihan SDMPP	20	-	-	Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan
18	Pelatihan Mentor Angkatan I	29 September s.d 10 Oktober 2024	Balai Pelatihan SDMPP	20	-	-	Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan
19	Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Pencarian Dan Pertolongan Angkatan XCI	02 Oktober s.d 02 November 2024	Balai Pelatihan SDMPP	24	22	2	Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan
20	Pelatihan Basic Under Water Rescue Angkatan VI Tahun 2024	18 November s.d 04 Desember 2024	BALAI PELATIHAN SDMPP	20	20	-	
21	Pelatihan Sarplanning Angkatan XXXVI Tahun 2024	18 November s.d 07 Desember 2024	BALAI PELATIHAN SDMPP	31	28	3	

NO	NAMA KEGIATAN	PELAKSANAAN	TEMPAT	JUMLAH PESERTA	LULUS	TIDAK LULUS	KETERANGAN
Total				794	350	4	

Sumber data: Balai Pelatihan SDM Pencarian dan Pertolongan

## 8. Penyusunan Produk Hukum dan Kerja Sama

### a. Kerja Sama

Untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, Basarnas menjalin koordinasi dan kerja sama dengan berbagai pihak. Kerja sama tersebut dilakukan dengan pihak lain di dalam negeri dan di luar negeri. Berikut adalah penjelasan kegiatan terkait kerja sama yang dilaksanakan oleh Basarnas pada Tahun 2024.

#### 1) Kerja Sama Dalam Negeri

Dalam rangka penyelenggaraan SAR Basarnas melakukan kerja sama dengan berbagai pihak di dalam negeri yang antara lain terdiri dari TNI, POLRI, kementerian dan Lembaga terkait, pemerintah daerah, organisasi kemasyarakatan, badan usaha dan perorangan. Pada Tahun 2024 telah dilaksanakan kerja sama dengan instansi dan organisasi dengan rincian sebagaimana di bawah ini.

Tabel 3.32. Kerja Sama Dalam Negeri selama Tahun 2024

No	Kerja Sama	Tanggal Pelaksanaan
1	PKS antara Direktorat Kenavigasian, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dengan Pusat Data dan Informasi Basarnas tentang Berbagi Pakai Data dan Informasi dalam rangka Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan	tanggal 12 Februari 2024 s.d. 12 Februari 2029
2	PKS dengan Universitas Indonesia tentang Penyelenggaraan Program Pendidikan, Pelatihan dan Pengabdian	tanggal 10 Juli 2024 s.d. 10 Juli 2029

No	Kerja Sama	Tanggal Pelaksanaan
	kepada Masyarakat Sekolah Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia	
3	Nota Kesepahaman antara Universitas Negeri Gorontalo dengan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan tentang Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan dan Tridharma Perguruan Tinggi	tanggal 18 Maret 2024 s.d. 18 Maret 2029
4	Nota Kesepahaman dengan Kementerian Sosial Republik Indonesia tentang Penyelenggaraa Pencarian dan Pertolongan	tanggal 14 Mei 2024 s.d. 14 Mei 2029
5	Kesepakatan Bersama antara Kementerian Perhubungan dengan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan tentang Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan pada Kecelakaan Transportasi	tanggal 06 Agustus 2024 s.d. 06 Agustus 2029
6	PKS dengan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia tentang Penyelenggaraan Penarian dan Pertolongan	tanggal 12 September 2024 s.d. 12 September 2029
7	MoU dengan Kementerian Kesehatan tentang Sinergitas Tuga sdan Fungsi Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan dan Kesehatan	tanggal 17 Desember 2024 s.d. 17 Desember 2029

Sumber data: Biro Hukum dan Kerja Sama

## 2) Kerja Sama Luar Negeri

Sebagaimana tersebut dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan, guna menunjang tugas dan fungsinya Basarnas dapat bekerja sama dengan pemerintah negara lain, lembaga atau organisasi internasional di bidang SAR dan/atau negara asing. Kerja sama tersebut di atas mencakup kegiatan kerja sama bilateral, regional maupun multilateral.

a) Kerja Sama Regional

Kegiatan yang dilaksanakan pada forum ini antara lain adalah pertemuan tahunan ATSF, penyusunan *ASEAN Agreement on Aeronautical and Maritime Search and Rescue*, penyusunan *Search and Rescue Operational Procedure*, latihan bersama ATSF yang sementara ini dilaksanakan dalam bentuk latihan posko dan pelatihan SAR.

- 1) Menghadiri Forum SAR AMSA - Basarnas ke-13 dalam Kerangka Kerja Sama Indonesia Transport Safety Assistance Package (ITSAP) pada tanggal 7-9 Maret 2024 di Australia.

ITSAP merupakan sebuah paket bantuan dari Australia untuk keselamatan transportasi di Indonesia yang sudah dilaksanakan sejak tahun 2008 berdasarkan MoU bidang transportasi yang ditandatangani oleh para Menteri Transportasi kedua negara. Sejak tahun 2012, Basarnas dan AMSA telah melaksanakan beberapa kegiatan sebagai bagian dari implementasi kerja sama kedua negara di bidang pencarian dan pertolongan serta hasil kesepakatan kedua pimpinan negara.

- 2) Pertemuan *Humanitarian Network and Partnership Weeks* (HNPW)

Dilaksanakan pada tanggal 4 s.d. 11 Mei 2024 di Jenewa, Swiss dengan beberapa hasil pertemuan diantaranya adalah *Co-Chair INSARAG Information Management Working Group* menyampaikan agar Indonesia mengirimkan salah satu anggota pada *working group* tersebut sehingga Indonesia dapat 3 (tiga) orang anggota pada *working group* yang berbeda, selanjutnya Deops Basarnas bertemu dengan Delegasi Amerika Serikat dan Sekretariat INSARAG dan menyepakati bahwa tanggal proses peningkatan Tim INASAR ditunda yang awalnya di agendakan pada bulan

Februari 2025 ditunda sesuai dengan hasil assessment Mentor dari Amerika Serikat.

- 3) ASEAN Transport SAR Forum Ke-11 pada tanggal 13-14 Agustus 2024 di Phnom Penh, Kamboja  
*Asean Transport Search and Rescue (SAR) Forum (ATSF)* merupakan forum Kerjasama teknis Regional ASEAN di bidang Pencarian dan Pertolongan Transportasi dibawah pilar ekonomi pada kerangka kerja ASEAN. Bidang transportasi merupakan salah satu pilar ekonomi dimana pencarian dan pertolongan transportasi berada di dalamnya. ATSF dilaksanakan secara regular setiap tahun di masing-masing negara anggota ASEAN sesuai mekanisme ASEAN. Forum ini merupakan inisiasi Indonesia (BASARNAS) yang dilaksanakan pertama kali pada tahun 2011 di Denpasar, Bali. Tujuan pembentukan ATSF adalah untuk memperkuat Kerjasama regional dalam operasi pencarian dan pertolongan (SAR) di sektor transportasi.
- 4) Health Emergencies in Large Populations (HELP) Course  
Dilaksanakan pada tanggal 19 s.d. 30 Juli 2024 di Honolulu, Hawaii. Kegiatan dimaksud meningkatkan Kompetensi Tim Medis di Basarnas dikarenakan materi-materi yang di peroleh oleh delegasi dapat di elaborasi ke dalam materi INASAR dan dapat pula dijadikan bahan workshop bagi Potensi Basarnas sebagai organisasi bantuan kemanusiaan serta penerepan beberapa pengetahuan dan keterampilan untuk mendukung misi perbantuan Tim INASAR.
- 5) Menghadiri *the Thirty-Five Asia and Pacific Air Navigation Planning and Implementation Regional Group (APANPIRG/35)* tanggal 25 s.d. 27 November 2024 di Bangkok, Thailand.  
Pada pembahasan working paper 02 tentang status Asia& Pasifik terhadap deklarasi Beijing, Delegasi Indonesia

memberikan tanggapan terkait status batas *Search and Rescue Region (SRR)*, penyampaian terkait kesiapan *Location of an Aircraft in Distress Respiratory (LADR)* untuk mendukung *Autonomous Distress Tracking (ADT)* pada penerapan *Global Aeronautical Distress and Safety System (GADSS)*, Penandatanganan keanggotaan Indonesia pada *ICAO Asia/Pacific FPP* oleh Direktur Navigasi Penerbangan, Penandatanganan Kerja Sama antara AirNav Indonesia dengan FAA (Badan Penerbangan Amerika Serikat).

b) Kerja Sama Organisasi Internasional

Sebagai otoritas SAR di Indonesia, Basarnas berperan aktif mengikuti kegiatan organisasi-organisasi internasional terkait di bidang penerbangan, pelayaran, pemanfaatan satelit SAR dan *urban SAR*. Kegiatan kerja sama Basarnas pada organisasi-organisasi tersebut adalah sebagaimana dijelaskan di bawah ini.

1) *International Civil Aviation Organization (ICAO)*

Kegiatan Basarnas dalam otoritas ini untuk mendukung Indonesia sebagai anggota ICAO dengan Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara sebagai instansi penjurur. Pemenuhan ICAO Asia Pacific SAR *Performance Indicators*. Indonesia telah berhasil memenuhi *Asia Pasific SAR Performance Indicator Regional SAR Plan* sebesar 95% yang menempatkan Indonesia sebagai 4 besar penyelenggara SAR penerbangan di 125ersama Asia Pasifik 125ersama dengan Singapura, Australia, Amerika Serikat dan Indonesia.

2) *International Maritime Organization (IMO)*

Kegiatan Basarnas dalam otoritas ini untuk mendukung Indonesia sebagai anggota IMO dengan Kementerian

Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sebagai instansi penjurur. Selama Tahun 2023 pertemuan IMO yang dihadiri oleh perwakilan Basarnas antara lain adalah *International Maritime Organization (IMO) Maritime Safety Committee (MSC)* di London, Inggris.

3) *International COSPAS-SARSAT Programme*

COSPAS singkatan dari bahasa Rusia yaitu *Cosmicheskaya Sistyema Poiska Avariynich Sudov* (sistem pencarian luar angkasa untuk kapal yang mengalami keadaan darurat) sedangkan SARSAT singkatan dari *Search and Rescue Satellite Aided Tracking*. Organisasi ini merupakan organisasi internasional di bidang pemanfaatan satelit untuk mendukung penyelenggaraan SAR yang beranggotakan 45 negara pemilik stasiun bumi atau *Local User Terminal (LUT)* dan pengelola satelit SAR.

4) *International Search and Rescue Advisory Group (INSARAG)*

INSARAG merupakan suatu jaringan global yang terdiri lebih dari 90 negara dan organisasi di bawah Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) *khususnya* di bawah koordinasi *United Nation Office for Coordination and Humanitarian Affairs (UN-OCHA)*. INSARAG memiliki tujuan untuk menetapkan standar dan metodologi koordinasi bagi *Tim Urban Search and Rescue (USAR) Internasional*. Pendirian organisasi ini didukung dengan Resolusi Sidang Umum PBB 57/150 tahun 2002 tentang *Strengthening the Effectiveness and Coordination of International Urban Search and Rescue Assistance*.

Basarnas sebagai anggota INASAR yang aktif telah membentuk *Indonesia Search and Rescue (INASAR) Team*, yang memperoleh dukungan dari Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Republik Indonesia (Polri),

Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), dan berbagai Kementerian dan Lembaga lainnya. Tim INASAR merupakan tim yang dibentuk untuk melaksanakan operasi SAR pada reruntuhan bangunan yang disebabkan oleh gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor dan bencana lainnya. Pada tanggal 26 s.d. 29 November 2019 Tim INASAR telah berhasil mengikuti *INSARAG External Classification (IEC)* dan dinyatakan lulus sebagai *INSARAG-Medium USAR Team*.

Basarnas juga merencanakan untuk meningkatkan klasifikasi tim INASAR dari klasifikasi *Medium* ke *Heavy USAR Team*. Secara bersamaan, Basarnas akan membentuk tim *Urban SAR* di berbagai wilayah di Indonesia melalui program akreditasi nasional. Tujuan pembentukan tim tersebut adalah untuk meningkatkan kemampuan tim SAR di berbagai daerah dan mempercepat waktu tanggap serta kualitas pelaksanaan operasi SAR terutama di wilayah yang rawan bencana.

- 5) *Thirty-First Meeting of ICAO/IMO JWG On Harmonization of Aeronautical and Maritime Search and Rescue* pada tanggal 4-8 November 2024 di Dublin, Irlandia.

International Civil Aviation Organization (ICAO)/ International Maritime Organization (IMO) Joint Working Group (JWG) dibentuk dengan tujuan untuk membantu ICAO dan IMO dalam mengembangkan dan reviu terhadap ketentuan dan regulasi internasional bidang pencarian dan pertolongan transportasi pada Annex 12: Search and Rescue, Konvensi Penerbangan Sipil Internasional (Chicago Convention, 1944) dan Konvensi SAR Maritim Hamburg (IMO SAR Convention, 1979) termasuk penyesuaian dokumen turunannya pada International Aeronautical and Maritime SAR (IAMSAR) Manual, IMO

Safe of Life at Sea (SOLAS), Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS) dan Global Aeronautical Distress and Safety System (GADSS). Hasil pertemuan JWG akan dilaporkan kepada ICAO dan IMO Sub-Committee on Navigation, Communication, Search and Rescue (NCSR). JWG terdiri dari anggota tetap yang berjumlah 16 negara yaitu Australia, Canada, Chile, Finlandia, Prancis, Irlandia, Swedia, Spanyol, Jepang, Singapura, New Zealand, Brazil, Inggris, RRT, Korea Selatan dan Amerika Serikat. Komposisi anggota tetap diusulkan melalui mekanisme pengajuan dari ICAO dan IMO dengan jumlah masing-masing sebanyak 8 negara.

9. Penyusunan Organisasi Tata Laksana dan Pengelolaan Kepegawaian

a. Evaluasi dan Penyusunan Analisa Beban Kerja (ABK)

- 1) Telah dilaksanakan perhitungan ABK JF Kepegawaian pada tanggal 16 s.d. 17 Maret 2023 di Hotel Best Westrn Plus, Kemayoran;
- 2) Telah dilaksanakan penyusunan kebutuhan jabatan fungsional Perencana di lingkungan Basarnas pada tanggal 1 s.d. 15 September 2023 di Jakarta;
- 3) Telah dilaksanakan Identifikasi Jabatan Pelaksana serta Perhitungan Beban Kerja di lingkungan Basarnas pada tanggal 18 s.d. 19 Oktober 2023 di Jakarta.

b. Pengadaan Pegawai Tahun 2024

Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan melaksanakan pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) melalui seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun Anggaran 2024. Proses Pelaksanaan Seleksi CASN yang dilaksanakan pada Tahun 2024 diantaranya:

- 1) Pengisian Rincian Kebutuhan ASN Tahun 2024;

- 2) Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Seleksi Penerimaan CASN Tahun 2024;
- 3) Seleksi Administrasi CPNS  
Pada seleksi administrasi, formasi CPNS yang dibuka adalah 1.389 Formasi CPNS dengan pelamar 8.628 orang. Berkas yang masuk pada aplikasi SSCASN BKN dilakukan verifikasi oleh tim verifikator pada Biro Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana dengan pendampingan dari Tim SSCASN BKN. Setelah proses verifikasi, kegiatan dilanjutkan dengan masa sanggah terhadap verifikasi yang telah dilaksanakan.
- 4) Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS  
SKD CPNS Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dilaksanakan mulai 17 Oktober 2024 s.d 15 November 2024, yang dilaksanakan pada 55 titik lokasi ujian dalam negeri dan 1 titik lokasi ujian luar negeri. Adapun pelaksanaan kegiatan ini panitia utama adalah Badan Kepegawaian Negara dengan Tim Panitia Instansi Kantor UPT dan Kantor Pusat. Jumlah pelamar pada SKD CPNS Tahun 2024 adalah 6.817 orang, dengan peserta lulus sebanyak 1.390 orang.
- 5) Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)  
SKB CPNS Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dilaksanakan mulai 9 s.d. 23 Desember 2024, yang dilaksanakan pada 34 titik lokasi ujian. Adapun pelaksanaan kegiatan ini panitia utama adalah Badan Kepegawaian Negara dengan Tim Panitia Instansi Kantor UPT dan Kantor Pusat. Peserta SKB CPNS Tahun 2024 berjumlah 1.390 orang. Pengumuman kelulusan dilaksanakan mengikuti jadwal dari BKN pada Tahun 2025.
- 6) Seleksi Administrasi PPPK  
Seleksi Administrasi PPPK dilaksanakan mulai tanggal 1 s.d 29 Oktober 2024. Seleksi ditujukan kepada pelamar prioritas, eks Tenaga Honorer Kategori II dan Tenaga Non ASN yang terdata dalam pangkalan data BKN. Peserta dari Badan Nasional Pencarian

dan Pertolongan adalah 359 orang dengan peserta lulus seleksi Administrasi sebanyak 340 orang.

7) Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) PPPK

Tahun 2024 pelaksanaan SKB PPPK dilaksanakan mulai tanggal 2-19 Desember 2024 dengan jumlah peserta 340 orang. Jumlah peserta yang lulus Seleksi Kompetensi PPPK adalah sebanyak 336 orang peserta.

c. Fasilitasi Reformasi Birokrasi

Melalui kegiatan Fasilitasi Reformasi Birokrasi, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan selama Tahun 2024 telah melaksanakan kegiatan-kegiatan antara lain:

- 1) Telah ditetapkan Keputusan Sekretaris Utama Nomor: SK.SU-140/OT.07/VIII/BSN-2024 tanggal 2 Agustus 2024 perihal Rencana Aksi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2024;
- 2) Melaksanakan kegiatan internalisasi core value ASN BerAKHLAK dengan peserta perwakilan unit kerja Kantor Pusat dan seluruh pegawai Kantor Pencarian dan Pertolongan Semarang;
- 3) Melaksanakan internalisasi dan koordinir kegiatan survei BerAKHLAK dan survei *Employee Engagement* Kementerian PANRB;
- 4) Melaksanakan survei layanan fasilitasi reformasi birokrasi ditujukan kepada para peserta kegiatan sosialisasi *core value* BerAKHLAK yang bertujuan untuk mengukur dan mengetahui indeks kepuasan pengguna layanan dan Mendapatkan umpan balik sebagai acuan untuk melakukan perbaikan di masa mendatang dengan nilai indeks Layanan Fasilitasi Reformasi Birokrasi 3,43 (Sakala 4) dengan Predikat Sangat Baik.

D. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Tabel. 3.33. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah (Renstra Basarnas 2020-2024)

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	2020			2021			2022			2023			2024		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan pencarian dan pertolongan	Indeks kepuasan masyarakat	83,33	87,01	104,42%	83,67	88,12	105,31%	84,67	88,76	104,83%	85,33	89,23	104,57%	85,67	90,78	105,96
2.	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan	Waktu tanggap pencarian dan pertolongan	27,2 menit	16,29 menit	140,11%	27 menit	18,07 menit	133,07%	26 menit	23,52 menit	109,54%	25,2 menit	16,40 menit	134,92%	25	17,18	131,28
		Persentase keberhasilan evakuasi korban pada pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan	100%	99,18%	99,18%	100%	98,64%	98,64%	100%	99,33%	99,35%	100%	98,20%	98,20%	100	98,76	98,76
3.	Meningkatnya keandalan sumber daya pencarian dan pertolongan	1 Persentase tingkat pemenuhan kebutuhan minimum sumber daya pencarian dan pertolongan	30,98%	34,75%	112,17%	45,77%	36,11%	78,89%	57,53%	36,72%	63,83%	66,58%	38,61%	57,99%	74,34	34,02	45,76
		2 Persentase tingkat kesiapan sarana prasarana serta sistem komunikasi Pencarian dan Pertolongan	92,89%	89,03%	95,84%	92,89%	87,82%	94,54%	92,22%	92,64%	99,38%	93,91%	92,86%	98,88%	93,91	91,70	97,64

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	2020			2021			2022			2023			2024		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian									
		3 Persentase SDM Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan Potensi yang bersertifikat	100%	90,38%	90,38%	100%	98,67%	98,67%	100%	97,21%	97,21%	100%	97,31%	<b>97,31%</b>	100	96,29	96,29
4.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	75	76,67	102,22%	75	76,85	102,46%	75	77,37	103,16%	76	73,45	96,64%	76	N/A	N/A

Sumber data: Laporan Kinerja 2023 Basarnas

## E. Realisasi Anggaran

### 1. Pagu Anggaran

Pagu Anggaran Basarnas Tahun Anggaran 2024 pada DIPA induk di tetapkan adalah Rp.2.101.373.027.000 dengan rincian perjenis belanja sebagai berikut:

Jenis Belanja	Pagu (Rp.)
Belanja Pegawai	546.176.103.000
Belanja Barang	1.108.892.845.000
Belanja Modal	446.304.079.000
Total	2.101.373.027.000

Dengan Blokir anggaran sebagai berikut:

Sumber Dana	Blokir (Rp.)
Rupiah Murni	7.714.202.000
Rupiah Murni Pendamping	127.575.000.000
Pinjaman Luar Negeri	1.000.000.000
Total	136.289.202.000

Sampai dengan akhir Tahun 2024 terdapat beberapa perubahan yang menyebabkan Pagu Anggaran Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan mengalami perubahan antara lain:

- a. Blokir *Automatic Adjustment*  
Sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor: S-1082/MK.02/2023 tanggal 29 Desember 2023 Basarnas dilakukan *automatic adjustment* sebesar Rp.153.594.992.000,-.
- b. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)  
Penambahan anggaran yang bersumber dari PNBP sebesar Rp.987.040.000,-.
- c. Buka blokir kegiatan simulator

- Pembukaan tanda blokir untuk kegiatan Pelatihan Awak Pesawat melalui simulator sebesar Rp.4.414.204.000,-.
- d. Pembukaan Blokir *Automatic Ajustment* Sebesar Rp. 108.040.902.000 dan revisi lain yang merubah komposisi dari Anggaran
- e. Revisi pergeseran anggaran pada kegiatan dan KRO yang sama antar Satker  
Operasi SAS sebesar Rp.6.292.415.000,- revisi pemanfaatan sisa kontraktual belanja modal untuk pengadaan Tactical Field Operation Communication System Rp.763.000.000,- dan Pengadaan Proyeksi Petir Rp.407.000.000,-.
- f. Revisi Anggaran pada 43 Satker sebesar Rp.834.075.000,-. Revisi sisa belanja kontraktual sebesar Rp.1.212.158.000,- dan pergeseran pemanfaatan sisa dana kontraktual pada Direktorat Sarana dan Prasarana.
- g. Revisi anggaran dalam rangka efisiensi Belanja Perjalanan Dias berupa blokir anggaran sebesar Rp.6.487.649.000,-.

2. Revisi Anggaran

Sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024 sudah tercatat 165 Revisi DIPA pada DIPA Petikan di lingkungan Basarnas dengan rincian sebagai berikut:

N0.	Nama Satker	Revisi	Tanggal	Pagu (Rp.)
1	414370 Badan SAR Nasional	16	12-12-2024	1.032.930.110.000
2	414386 Surabaya	4	03-12-2024	38.556.632.000
3	414392 Medan	6	31-10-2024	32.109.029.000
4	414406 Padang	6	10-12-2024	23.205.594.000
5	414412 Pekanbaru	6	24-12-2024	26.784.445.000
6	414421 Pontianak	9	12-12-2024	30.215.400.000
7	414437 Banjarmasin	7	20-12-2024	23.706.432.000
8	414443 Balikpapan	7	30-12-2024	23.883.527.000
9	414452 Manado	9	27-12-2024	29.234.533.000

NO.	Nama Satker	Revisi	Tanggal	Pagu (Rp.)
10	414468 Makassar	7	27-12-2024	33.379.136.000
11	414474 Ambon	7	19-12-2024	32.055.468.000
12	414480 Denpasar	7	06-12-2024	32.608.602.000
13	414499 Merauke	6	12-12-2024	23.412.731.000
14	414500 Biak	5	12-12-2024	24.049.479.000
15	414519 Jayapura	6	06-12-2024	24.997.025.000
16	414525 Kupang	7	29-11-2024	22.696.801.000
17	414531 Tanjung Pinang	6	31-10-2024	29.435.678.000
18	414540 Palembang	5	29-11-2024	22.391.130.000
19	414556 Sorong	5	04-12-2024	26.541.073.000
20	414559 Jambi	7	24-12-2024	17.898.275.000
21	414563 Pangkal	6	17-12-2024	20.365.379.000
22	414566 Bandung	7	17-12-2024	25.942.412.000
23	414568 Palu	6	06-11-2024	24.599.562.000
24	414572 Ternate	6	31-12-2024	18.225.508.000
25	414574 Bengkulu	6	06-12-2024	17.893.816.000
26	414576 Lampung	6	11-12-2024	23.047.468.000
27	414578 Gorontalo	10	25-11-2024	21.422.466.000
28	414580 Manokwari	7	31-10-2024	16.817.539.000
29	414582 Balai	8	12-12-2024	32.732.929.000
30	414583 Yogyakarta	7	13-12-2024	22.654.727.000
31	417077 Nias	7	28-11-2024	18.395.484.000
32	417079 Cilacap	7	31-10-2024	17.475.797.000
33	417085 Mamuju	9	23-12-2024	15.677.457.000
34	417089 Tarakan	6	12-12-2024	15.815.448.000
35	417091 Palangka Raya	8	23-12-2024	17.179.081.000
36	417623 Banten	4	27-12-2024	16.204.909.000
37	417624 Natuna	4	27-12-2024	16.717.527.000
38	417625 Maumere	6	17-12-2024	18.582.173.000
39	417626 Mentawai	5	31-10-2024	11.368.541.000
40	517641 Jakarta	7	31-10-2024	30.959.044.000
41	614794 Banda Aceh	5	02-12-2024	28.703.296.000
42	614802 Semarang	6	19-12-2024	35.226.053.000
43	614816 Kendari	6	12-11-2024	33.843.530.000

NO.	Nama Satker	Revisi	Tanggal	Pagu (Rp.)
44	614820 Timika	9	20-12-2024	23.162.080.000
45	649924 Mataram	6	31-12-2024	29.256.741.000
		302		2.102.360.067.000

Sampai dengan akhir Tahun 2024 terdapat 302 Revisi DIPA diantaranya:

a. Revisi *Automatic Adjustment*

Pencantuman Catatan Halaman IV DIPA berupa Blokir pada 45 Satuan Kerja di lingkungan Basarnas dengan jumlah Pagu yang di blokir adalah Rp.153.594.992.000,-.

b. Revisi PNBPN dan Pergeseran Pemeliharaan Sarana Kapal

Revisi anggaran berupa penambahan anggaran yang bersumber dari PNBPN sebesar Rp.987.040.000,- serta pergeseran anggaran pemeliharaan Kapal Antasena dari Kansar Surabaya ke Kansar Jakarta sebesar Rp.544.844.000. Disamping itu dalam usulan juga terdapat revisi anggaran untuk pembelian tanah di Kantor SAR Jayapura sebesar Rp.400.000.000,- dan revisi perubahan RO Prioritas Nasional untuk pembangunan Gedung dan sarana *Smartclass* pada Balai Pelatihan Basarnas sebesar Rp.47.137.134.000,- yang belum dapat disetujui oleh Direktorat Jenderal Anggaran (DJA Kemenkeu) dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS);

c. Revisi Buka Blokir Kegiatan Simulator

Revisi anggaran ini merupakan revisi Penghapusan Tanda Blokir untuk kegiatan Pelatihan Awak Pesawat melalui simulator sebesar Rp.4.414.204.000,-. Disamping itu dalam usulan juga terdapat revisi anggaran sisa kontraktual prioritas nasional untuk Pengadaan sarana *Smartclass* pada Balai Pelatihan Basarnas sebesar Rp.10.654.000.000,- yang belum dapat disetujui Direktorat Jenderal Anggaran (DJA Kemenkeu).

d. Pergeseran Antar kegiatan antar Satuan Kerja dalam Program yang sama sebesar Rp. 7.812.925.000,- untuk pemenuhan anggaran untuk Kegiatan Penerimaan CASN, serta pergeseran anggaran belanja

pegawai dari kantor pusat untuk Kantor SAR Mamuju sebesar, Rp. 838.072.000,-.

- e. Revisi pembukaan blokir anggaran Rp.108.040.902.000,- pada program Prioritas Nasional, revisi anggaran sisa kontraktual sebesar Rp,2.606.350.000,-, pergeseran belanja operasional ke belanja non operasional dari kegiatan honorarium Pengelola Keuangan, serta pergeseran Belanja Pegawai untuk pemenuhan Tunjangan Kinerja.

Pada akhir tahun 2024 terdapat 2 revisi anggaran yaitu revisi Tingkat DJA dan Kanwil yang seharusnya menjadi kewenangan DJA, yaitu:

- a. Revisi Anggaran pad 43 satker sebesar Rp.834.075.000,-. Revisi sisa belanja kontraktual sebesar Rp.1.212.158.000,- dan pergeseran pemanfaat sisa dana kontraktual pada Direktorat Sarana dan Prasarana;
- b. Revisi anggaran Dalam rangka efisiensi Belanja Perjalan Dinas berupa blokir anggaran sebesar Rp.6.487.649.000,-.

Tabel 3.34. Realisasi Anggaran Basarnas Tahun 2024

No.	Program	Pagu	Realisasi	%
1	Pencarian dan Pertolongan Pada Kecelakaan dan Bencana	1.189.723.300.000	995.723.071.287	83,70
2	Dukungan Manajemen	912.636.767.000	867.809.778.389	95,09

Sumber data: Alikasi OmSPAN

### 3. Nilai IKPA

Sampai dengan Desember tahun 2024 Basarnas mendapatkan nilai akhir/ total adalah 92.55% yang termasuk dalam katagori Baik dengan rincian:

NO	KODE KL	NAMA KL	KETERANGAN	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN		KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN				KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN	NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	DISPENSASI SPM (PENGURANG)	NILAI AKHIR (NILAI TOTAL/KONVERSI BOBOT)
				REVISI DIPA	DEVIASI HALAMAN III DIPA	PENYERAPAN ANGGARAN	BELANJA KONTRAKTUAL	PENYELESAIAN TAGIHAN	PENGELOLAAN UP DAN TUP	CAPAIAN OUTPUT				
1	107	BADAN NASIONAL Pencarian DAN PERTOLONGAN (BASARNAS)	Nilai	100,00	80,26	88,45	97,08	99,46	96,93	95,90	93,05	100%	0,50	92,55
			Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
			Nilai Akhir	10,00	12,04	17,69	9,71	9,95	9,69	23,97				
			Nilai Aspek	90,13		95,48			95,90					

#### 4. PNBP

Pagu Anggaran Basarnas dengan jumlah pendapatan negara yang telah disetorkan ke Kas Negara dengan rincian per akun adalah sebagai berikut:

NO	Kode Akun  Jenis Pendapatan	Setoran				Potongan SPM	Pengembalian	Realisasi
		MPN		BI				
		Pajak	Non Pajak	Pajak	Non Pajak			
1	425791   Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain	0	18,080,000	0	0	0	0	18,080,000
2	425248   Pendapatan Hasil Pengembalian Uang Negara	0	41,420,890	0	0	0	0	41,420,890
3	411124   Pendapatan PPh Pasal 23	0	0	0	0	0	0	0
4	425918   Penerimaan Kembali Belanja Lain-lain Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	0	0	0	0	0
5	425991   Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0	0	0	0	0	0	0
6	425129   Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	117,012,952	0	0	0	0	117,012,952
7	411121   Pendapatan PPh Pasal 21	0	0	0	0	0	0	0
8	425421   Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	0	1,382,790,000	0	0	0	0	1,382,790,000
9	425811   Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	306,622,080	0	0	1,207,559,752	0	1,514,181,832
10	425999   Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	1,004,187	0	0	0	0	1,004,187
11	411211   Pendapatan PPN Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0
12	425131   Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	120,276,135	0	0	0	0	120,276,135
13	425912   Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	3,201,452,749	0	0	0	0	3,201,452,749
14	425122   Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	452,491,852	0	0	0	0	452,491,852
15	425913   Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	3,341,478,945	0	0	0	0	3,341,478,945
16	425429   Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lainnya	0	16,200,000	0	0	0	0	16,200,000
17	425911   Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	42,161,880	0	0	2,753,037	0	44,914,897
<b>GRAND TOTAL</b>		<b>0</b>	<b>9,040,991,650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,210,312,789</b>	<b>0</b>	<b>10,251,304,439</b>

#### F. Prestasi dan Capaian Kinerja Lainnya

Sejak tahun anggaran 2019 Basarnas mengalami pengurangan anggaran karena *refocusing* dan *automatic adjustment*. Namun demikian kondisi tersebut tidak mengurangi tekad personel Basarnas dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya sehingga layanan SAR tetap tersedia bagi masyarakat secara optimal. Hal ini terbukti dengan berbagai peningkatan kinerja Basarnas di berbagai bidang. Berikut penghargaan dan capaian yang diperoleh Basarnas dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024.

Tabel 3.35. Capaian Basarnas Tahun 2020-2024

No.	Capaian Basarnas	2020	2021	2022	2023	2024
1	Nilai SAKIP	72,27 (BB)	72,86 (BB)	73,06 (BB)	73,72 (BB)	74,01 (BB)
2	Nilai Reformasi Birokrasi	76,67	76,85	77,37	73,43	Belum rilis
3	Kematangan APIP	Level 3				
4	Indeks Audit Kearsipan	86,5	78,91	82,19	90,04	92,75
5	Merit Sistem Kepegawaian	262,5	262,5	275	325	325
6	Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART)	94,82	93,80	93,33	95,46	88,35
7	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
8	Response Time (IKU Basarnas)	16 menit	18,07 menit	23,52 menit	16,40 menit	17,18 menit
9	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,90 (Baik)	2,75 (Baik)	2,85 (Baik)	3,42 (Baik)	3,63 (Sangat Baik)

No.	Capaian Basarnas	2020	2021	2022	2023	2024
10	Skor Keterbukaan Publik (KIP)	Tidak Informatif	Menuju Informatif	Menuju Informatif	Informatif	Informatif
11.	Indeks Reformasi Hukum	N/A	N/A	N/A	86,69 Kategori A (Sangat Baik)	99,53 A (Sangat Baik)
12.	Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN)	N/A	N/A	N/A	97,98 Sangat Baik	95,11 Sangat Baik
	Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS)	N/A	N/A	N/A	N/A	2,95

Sedangkan penghargaan yang diperoleh Basarnas pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Peringat III Implementasi JF APK APBN dan JF PK APBN pada Kementerian Negara/ Lembaga dengan jumlah Setket Menengah Kecil Tahun 2024;
2. Penghargaan satuan kerja Terbaik pengelolaan UP/ TUP Semester I Mitra KPPN Jakarta IV;
3. Pada Anugerah Reksa Bandha Tahun 2024 Basarnas meraih penghargaan Juara 2 pada kategori Sertifikasi Barang Milih Negara Kelompok II;
4. Penghargaan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) Tahun 2024 dengan Nilai 4,57 Kategori "A";
5. Penghargaan dengan Kualifikasi Informatif Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) dengan Nilai 94,67 Predikat Tertinggi INFORMATIF;

6. Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan dan Nilai Tingkat Digitalisasi Arsip pada Instansi Tingkat Pusat dan Pemerintah Provinsi Tahun 2024 dengan Nilai 92,75 Predikat AA (Sangat Memuaskan);
7. Nilai Indeks Reformasi Hukum Tahun 2024 dengan Nilai 99,53;
8. Penghargaan Satuan Kerja Terbaik Pengelolaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) dengan nilai Terbaik Kategori Growth 65% Tahun 2022;
9. Penghargaan dan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan LKKL di lingkungan AKN I Tahun 2024, dengan nilai WTP (Wajar Tanpa Pengecualian);
10. Indeks Perencanaan Pembangunan (IPPN), dengan nilai 95,11 Predikat Sangat Baik;
11. Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024 dengan nilai 3,63 Predikat Sangat Baik;
12. Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektor (EPSS) dengan nilai 2,95 Skala 5.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan dan Upaya Perbaikan

Laporan Kinerja Basarnas Tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban Basarnas kepada para pemangku kepentingan dan masyarakat. Laporan kinerja memberikan gambaran atas pencapaian target kinerja tingkat organisasi dan seluruh satuan kerja. Basarnas telah mengintegrasikan penerapan manajemen risiko, manajemen pengetahuan dan manajemen perubahan dalam pengelolaan kinerja organisasi. Pelaksanaan ketiga jenis manajemen ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan rutin dan strategis untuk mendukung keberhasilan dan mengatasi hambatan dalam rangka pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi yang dioperasionalkan melalui pengukuran kinerja atas target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024. Dengan sinergi dan kolaborasi manajemen kinerja, risiko, pengetahuan dan perubahan, pencapaian tujuan organisasi yang diamanatkan dalam Renstra Basarnas 2020-2024 dapat dicapai dengan hasil maksimal.

Berdasarkan hasil pengukuran atas seluruh target kinerja yang telah ditetapkan dalam bentuk dokumen PK Tahun 2024, pencapaian skor kinerja Basarnas pada Tahun 2024 secara keseluruhan adalah 95,95% atau menurun apabila dibandingkan skor kinerja Tahun 2023 sebesar 98,46%. Berdasarkan hasil monitoring atas pencapaian kinerja Tahun 2024, dari tujuh indikator kinerja Basarnas, terdapat 2 (dua) indikator kinerja yang melebihi target, 4 (empat) indikator kinerja belum tercapai targetnya dan 1 (satu) indikator kinerja belum bisa dihitung capaiannya dikarenakan hasil penilaian belum dirilis dari Instansi penilai. Kendala dan permasalahan yang menyebabkan tidak tercapainya indikator kinerja Basarnas Tahun 2024 akan menjadi fokus perbaikan kinerja di tahun mendatang.

Dalam upaya mendorong pencapaian target kinerja dan sasaran strategis yang ditetapkan dan dalam rangka mencapai tujuan-tujuan strategis Basarnas 2020-2024, Basarnas memanfaatkan hasil evaluasi kinerja tahun sebelumnya untuk perbaikan pengelolaan kinerja saat ini. Langkah-langkah perbaikan yang akan dilakukan antara lain penyempurnaan aplikasi pengukuran kinerja (e-

*performance*), penyempurnaan IKU dan formula pengukuran indikator kinerja (manual IKU), peningkatan kompetensi SDM pengelola kinerja, dan perbaikan dalam perencanaan dan penganggaran.

## B. Rekomendasi dan Tindak Lanjut

Sesuai Surat dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor B/674/AA.05/2024 tanggal 19 Desember 2024 'tentang Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024 memberikan rekomendasi sebagai berikut:

Tabel.4. 1. Rekomendasi dan Tindak Lanjut

No.	Hasil Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	Memastikan kembali keselarasan pada Perjanjian Kinerja (PK) dan dokumen indikator kinerja utama (IKU) pada seluruh unit kerja.	Telah dilaksanakan dialog kinerja dan reviu Indikator Kinerja Utama untuk memastikan keselarasan pada PK dan Surat Keputusan Kepala Basarnas Nomor: SK. KBSN-202/PR.02.02/XI/BSN-2023 tentang Indikator Kinerja dan Manual IKU di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.
2	Melakukan reviu dan perbaikan penjenjangan/ <i>cascading</i> kinerja dari level jabatan tertinggi hingga ke level operasional dengan memperhatikan <i>logical framework</i> dan <i>critical success factor</i> dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Selanjutnya, memanfaatkan hasil penjenjangan/ <i>cascading</i> kinerja tersebut sebagai dasar untuk menyempurnakan perencanaan kinerja secara keseluruhan.	Telah dilaksanakan reviu dan perbaikan penjenjangan/ <i>cascading</i> kinerja dari level jabatan tertinggi hingga ke level operasional dengan memperhatikan <i>logical framework</i> dan <i>critical success factor</i> melalui penyusunan Pohon Kinerja dan Surat Keputusan Kepala Basarnas Nomor: SK. KBSN-202/PR.02.02 /XI/BSN-2023 tentang Indikator Kinerja dan Manual IKU di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang disahkan pada tanggal 30 November 2023.

No.	Hasil Rekomendasi	Tindak Lanjut
3	<p>Mengoptimalkan penggunaan aplikasi <i>e-Performance</i> sebagai bahan dasar monitoring dan evaluasi kinerja maupun untuk memberikan <i>feedback</i> perbaikan dari pimpinan unit kerja terkait progress kinerja yang tidak tercapai. Kemudian, memanfaatkan aplikasi tersebut sebagai dasar pengukuran kinerja individu dan dasar pemberian <i>reward and punishment</i> baik bagi unit kerja maupun individu.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pada Tahun 2024 aplikasi <i>e-Performance</i> dalam proses <i>maintenance</i> sehingga tidak optimal penggunaannya. Alternatif yang dilakukan dalam pemantauan dan evaluasi kinerja yaitu dengan menggunakan <i>storage</i> bersama (<i>google drive</i>) untuk mengupload dokumen SAKIP baik secara berkala maupun final.</li> <li>- Basarnas telah melaksanakan pemberian <i>reward</i> dalam bentuk penghargaan atas Kinerja UPT selama 1 (satu) tahun anggaran yang dinilai dari 13 kategori kinerja. Pemberian penghargaan hanya pada tingkat UPT belum sampai tingkat individu.</li> </ul>
4	<p>Mereviu dan menyempurnakan kembali kesesuaian formulasi indikator kinerja yang akan diterapkan pada aplikasi <i>e-Performance</i> sehingga dapat memenuhi kebutuhan unit kerja dan dapat mengoptimalkan ketercapaian kinerja.</p>	<p>Pada Tahun 2024 aplikasi <i>Simonev</i> sedang dalam <i>maintenance</i> hingga hari ini, sehingga penyesuaian formulasi indikator kinerja belum dapat dilaksanakan. Namun untuk indikator kinerja yang akan dilakukan penyesuaian formulasinya pada aplikasi <i>e-performance</i> telah dilakukan inventarisasi.</p>
5	<p>Mempublikasikan Laporan Kinerja seluruh unit kerja dan UPT pada aplikasi <i>e-Performance</i> Basarnas ataupun website sebagai bentuk transparansi kepada masyarakat.</p>	<p>Laporan Kinerja seluruh unit kerja dan UPT telah diupload pada <i>website</i> Basarnas dan masing-masing UPT. Untuk aplikasi <i>e-performance</i> belum dapat dilakukan upload Laporan Kinerja dikarenakan sedang dalam proses <i>maintenance</i>.</p>
6	<p>Meningkatkan kualitas laporan kinerja pada unit kerja untuk dapat</p>	<p>Telah dilaksanakan Asistensi Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2024 Kantor</p>

No.	Hasil Rekomendasi	Tindak Lanjut
	menyajikan informasi secara detail per-pencapaian kinerja terkait analisis efisiensi penggunaan sumber daya yang dimiliki dan analisis upaya-upaya perbaikan kinerja ke depan.	Pencarian dan Pertolongan pada 14 s.d. 15 Januari 2025. Dan telah dilaksanakan asistensi penyajian data dukung Indikator Kinerja Kantor Pencarian dan Pertolongan pada 5 Februari 2025 melalui Zoom Meeting.
7	Mengoptimalkan pemanfaatan laporan kinerja dengan cara memastikan penetapan target kinerja tahun berikutnya lebih baik nilainya dibandingkan dengan realisasi target tahun sebelumnya sehingga perencanaan kinerja ke depan memiliki target kinerja yang lebih realistis dan menggambarkan peningkatan kinerja.	Laporan Kinerja sudah digunakan sebagai pembanding capaian kinerja sehingga dapat diketahui capaian mengalami peningkatan atau penurunan apabila dibandingkan dengan capaian-capaian tahun sebelumnya, dan dijadikan dasar untuk penetapan target kinerja di tahun berikutnya dengan memperhatikan kondisi yang ada.
8	Melakukan pemantauan atas tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi AKIP unit kerja secara berkala, sehingga mendorong perbaikan dan peningkatan kinerja pada unit kerja.	Telah dilakukan pemantauan atas tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi AKIP melalui Pemantauan Rencana Aksi tiap triwulan baik dari sisi Kegiatan, Anggaran dan capaian Indikator-nya, yang juga dijadikan dasar dalam Penetapan Predikat Kinerja Organisasi Periodik dan Final.



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Kusworo S.E., M.M.  
Jabatan : Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, Januari 2024

Kepala Badan Nasional  
Pencarian dan Pertolongan

Kusworo S.E., M.M.  
Marsekal Madya TNI

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan Pencarian dan Pertolongan	Indeks kepuasan masyarakat	85,67
2.	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan operasi Pencarian dan Pertolongan	Waktu tanggap Pencarian dan Pertolongan (menit)	25
		Persentase keberhasilan evakuasi korban pada pelaksanaan operasi Pencarian dan Pertolongan (%)	100
3.	Meningkatnya keandalan sumber daya Pencarian dan Pertolongan	Tingkat pemenuhan kebutuhan minimum sumber daya Pencarian dan Pertolongan (%)	74,34
		Tingkat kesiapan sarana prasarana serta sistem komunikasi Pencarian dan Pertolongan (%)	93,91
		Persentase SDM Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan Potensi yang bersertifikat (%)	100
4.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik ( <i>Good Governance</i> )	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	76

<b>Pagu Anggaran</b>	: Rp	<b>2.101.373.027.000,-</b>
Program Dukungan Manajemen	: Rp	912.636.767.000,-
Program Pencarian dan Pertolongan Pada Kecelakaan dan Bencana	: Rp.	1.188.736.260.000,-

Jakarta, Januari 2024

Kepala Badan Nasional  
Pencarian dan Pertolongan

Kusworo S.E., M.M.  
Marsekal Madya TNI

**PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2024  
BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan Pencarian dan Pertolongan	Indeks kepuasan masyarakat	85,67	90,78	105,96%
2.	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan operasi Pencarian dan Pertolongan	Waktu tanggap Pencarian dan Pertolongan (menit)	25 menit	17,18 menit	131,28%
		Persentase keberhasilan evakuasi korban pada pelaksanaan operasi Pencarian dan Pertolongan (%)	100%	98,76%	98,76%
3.	Meningkatnya keandalan sumber daya Pencarian dan Pertolongan	Tingkat pemenuhan kebutuhan minimum sumber daya Pencarian dan Pertolongan (%)	74,34%	34,02%	45,76
		Tingkat kesiapan sarana prasarana serta sistem komunikasi Pencarian dan Pertolongan (%)	93,91%	91,70%	97,64%
		Persentase SDM Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan Potensi yang bersertifikat (%)	100%	96,29%	96,29%
4.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	76	N/A	N/A

Pagu Anggaran : Rp. 2.102.360.067.000,-

Realisasi Anggaran : Rp. 1.863.532.849.676,-

1. Program Dukungan Manajemen : Rp. 867.809.778.389,-

2. Program Pencarian dan Pertolongan pada Kecelakaan dan Bencana : Rp. 995.723.071.287,-

Jakarta, 21 Februari 2025

Kepala Badan Nasional  
Pencarian dan Pertolongan



*Kusworo*  
Kusworo, S.E., M.M.  
Marsekal Madya TNI

PERNYATAAN TELAH DIREVIU  
BADAN NASIONAL Pencarian dan Pertolongan  
TAHUN ANGGARAN 2024

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan untuk tahun anggaran 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam menyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, 20 Februari 2025

Inspektur,



I Nyoman Parwata, S.E., M.Si., M.Tr. (Han)

Brigadir Jenderal TNI

## Lampiran Laporan Kinerja Basarnas Tahun 2024

NO	URAIAN	BELANJA			CAPAIAN KINERJA		
		ANGGARAN	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
1.	<b>SS.1 Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan Pencarian dan Pertolongan</b>						
	IKSS.1 Indeks kepuasan masyarakat				85,67	90,78	105,96%
	<b>SP.1 Meningkatnya kinerja pelaksanaan operasi Pencarian dan Pertolongan</b>						
	IKSP.1.1 Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan operasi pencarian dan pertolongan				88	92,22	104,80%
	<b>SK.1.1.1 Meningkatnya kepuasan masyarakat pada layanan operasi pencarian dan pertolongan</b>						
	IKSK.1.1.1.a Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan operasi pencarian dan pertolongan				88	92,22	104,80%
	Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi Bidang Pelayanan Publik Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	170.826.000	169.278.040	99,09%			
	Forum Konsultasi Publik	159.700.000	159.043.500	99,59%			
	<b>SP.4 Meningkatnya kualitas SDM potensi Pencarian dan Pertolongan</b>						
	IKSP.4.2 Indeks kepuasan masyarakat terhadap pemberdayaan masyarakat Pencarian dan Pertolongan				89.	87,39	98,2%
	<b>SK.4.1.1 Meningkatnya peran serta SDM Potensi dalam penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan</b>						
	IKSK.4.1.1.a Indeks kepuasan masyarakat terhadap pemberdayaan masyarakat pencarian dan pertolongan				89	87,39	98,2%
	Pengelolaan Survei Kepuasan Layanan Masyarakat Pencarian dan Pertolongan	-	-	-			
	Penyelenggaraan FKP3 Tingkat Daerah	229.500.000	179.950.700	100%			

NO	URAIAN	BELANJA			CAPAIAN KINERJA		
		ANGGARAN	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
	Penyelenggaraan FKP3 Tingkat Pusat	500.000.000	358.130.000	99,4%			
	Workshop Bidang Potensi Pencarian dan Pertolongan	500.000.000	404.460.000	99,2%			
	Uji Kompetensi Potensi	1.577.500.000	1.459.710.460	92,53%			
	Uji Kopetensi Bidang Pencarian dan Pertolongan (PNBP)	86.400.000	20.000.000	23,1%			
	Refresh Materi Uji Kompetensi	105.000.000	102.250.000	98,0%			
	Pemeliharaan Kompetensi	250.000.000	178.179.886	89,6%			
	<b>SP.6 Meningkatnya keandalan sistem komunikasi Pencarian dan Pertolongan</b>						
	IKSP.6.4 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan registrasi alat pemancar sinyal marabahaya (Beacon)				87	88.50	102%
	<b>SK.6.4.1 Meningkatnya kepuasan masyarakat pada layanan registrasi alat pemancar sinyal mara bahaya (Beacon)</b>						
	IKSK.6.4.1.a Indeks kepuasan masyarakat pada layanan registrasi alat pemancar sinyal mara bahaya (Beacon)				87	88.50	102%
	Indeks kepuasan masyarakat pada layanan alat pemancar sinyal mara bahaya (Beacon)	Non Anggaran	Non Anggaran	Non Anggaran			
<b>2.</b>	<b>SS.2 Meningkatnya efektivitas pelaksanaan operasi Pencarian dan Pertolongan</b>						
	IKSS.2 Waktu tanggap Pencarian dan Pertolongan				25 menit	16,41 menit	152,35%
	<b>SP.2 Meningkatnya kesiapsiagaan Pencarian dan Pertolongan</b>						
	IKSP.2.3 Waktu tanggap (response time) pada penanganan operasi pencarian dan pertolongan				25 menit	16,41 menit	152,35%
	<b>SK.2.1.1 Terwujudnya pelaksanaan siaga dan latihan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan</b>						

NO	URAIAN	BELANJA			CAPAIAN KINERJA		
		ANGGARAN	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
	IKSK.2.1.1.b Waktu tanggap (response time) pada penanganan operasi pencarian dan pertolongan				25 menit	16,41 menit	152,35%
	Penerapan Manajemen Resiko Dalam Respon SAR	155.000.000	154.597.555	99,74%			
	Sinkronisasi Data Response Time Kantor SAR	0	0	0			
	<b>SK.2.2.1 tersedianya norma, standar, prosedur, kriteria dan rencana pengembangan serta evaluasi di bidang siaga dan latihan pencarian dan pertolongan</b>						
	IKSK.2.2.1.a Persentase rancangan norma, standar, prosedur, kriteria siagadan latihan yang telah disusun						
	Penyusunan Standar Biaya	126.389.000	123.789.344	97,94%			
	Penyusunan Pedoman Siaga	251.968.000	237.858.555	94,40%			
	IKSK.2.2.1.b Persentase dokumen rencana pengembangan dan evaluasi siaga dan latihan yang sudah terlaksana						
	Monitoring dan Asistensi Siaga dan Latihan	361.018.000	345.510.594	95,70%			
	Bimbingan Teknis Petugas Siaga	606.241.000	605.469.205	99,87%			
	Workshop dan Sosialisasi Protokol Keselamatan DPSP	160.102.000	159.077.316	99,36%			
	Pengawasan Penyelenggaraan Latihan	132.671.000	129.511.982	97,62%			
	Workshop Kesiapsiagaan SAR	638.744.000	630.232.500	98,67%			
	IKSP.2.1 Indeks siaga pencarian dan pertolongan				85	90,60	106,59%
	<b>SK.2.1.1 Terwujudnya pelaksanaan siaga dan latihan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan</b>						
	IKSK.2.1.1.a Indeks siaga pencarian dan pertolongan				85	90,60	106,59%

NO	URAIAN	BELANJA			CAPAIAN KINERJA		
		ANGGARAN	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
	Siaga Awak Sarana Udara	0	0	0			
	Siaga Lebaran	369.658.000	367.537.529	99,43%			
	Siaga Tahun Baru dan Natal	309.369.000	279.713.094	90,41%			
	Siaga Khusus Lainnya	574.698.000	571.666.020	99,47%			
	Operasional BCC	300.000.000	298.701.000	99,57%			
	Siaga Rutin Kantor Pusat (Penambah Daya Tahan Tubuh Petugas Siaga)	249.660.000	249.232.000	99,83%			
	Fasilitasi Pelaksanaan Siaga	53.356.000	53.355.833	100%			
	IKSP.2.2 Indeks pelaksanaan latihan pencarian dan pertolongan				74	78,40	105,95%
	<b>SK.2.1.1 Terwujudnya pelaksanaan siaga dan latihan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan</b>						
	IKSK.2.1.1.c Indeks pelaksanaan latihan pencarian dan pertolongan				74	78,40	105,95%
	Latihan SAR Indonesia-Malaysia (Malindo)	353.295.000	312.130.330	88,35%			
	Latihan SAR Indonesia-Singapura (Indopura)	372.980.000	306.158.200	82,08%			
	Latihan SAR Indonesia-Australia (Ausindo)	291.881.000	283.133.986	97,00%			
	Latihan Gabungan Kesiapsiagaan SAR	1.849.846.000	1.673.045.784	90,44%			
	Latihan Urban SAR	405.593.000	337.420.522	83,19%			
	SAR Communication Exercise (SAR Comex)	69.190.000	39.045.804	56,43%			
	Latihan Karuna Nisevanam	418.349.000	407.758.820	97,47%			
	Fasilitasi Pelaksanaan Latihan	83.220.000	83.219.568	100,00%			
	Pengelolaan Ketatausahaan Kesiapsiagaan	45.662.000	45.662.000	100,00%			
	IKSS.3 Persentase keberhasilan evakuasi korban pada pelaksanaan operasi Pencarian dan Pertolongan				100%	98,76%	98,76%

NO	URAIAN	BELANJA			CAPAIAN KINERJA		
		ANGGARAN	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
	<b>SP.1 Meningkatnya kinerja pelaksanaan operasi Pencarian dan Pertolongan</b>						
	IKSP.1.3 Persentase keberhasilan evakuasi korban pada pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan				100%	98,76%	98,76%
	<b>SK.1.2.2 Terwujudnya keterlibatan potensi pencarian dan Pertolongan dalam pelaksanaan operasi Pencarian dan Pertolongan</b>						
	IKSK.1.2.2.a Persentase pelibatan potensi pencarian dan pertolongan dalam pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan				100%	99,57%	99,57%
	Rapat Koordinasi SAR Nasional	500.000.000	418.691.000	83,74%			
	<b>SK.1.3.1 Terwujudnya keberhasilan evakuasi korban pada pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan</b>						
	IKSK.1.3.1.a Persentase keberhasilan evakuasi korban pada pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan				100%	98,76%	98,76%
	Peningkatan Kapasitas Bencana dan Kondisi Membahayakan Manusia	1.524.441.000	1.447.210.252	94,93%			
	Peningkatan Kapasitas Urban	2.418.804.000	2.080.386.688	86,01%			
	IKSK.1.3.1.b Persentase keselamatan petugas pencarian dan pertolongan dalam pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan				100%	99,41%	99,41%
	Rapat Kerja Teknis SAR Nasional	495.500.000	491.542.610	99,20%			
	IKSK.1.3.1.c Nilai uji pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan pada kantor pencarian dan pertolongan				87	84,28	96,87%
	Uji Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan	1.035.004.000	1,021,513,169	98,70%			

NO	URAIAN	BELANJA			CAPAIAN KINERJA		
		ANGGARAN	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
	IKSK.1.3.1.d Persentase pemenuhan dukungan operasi pencarian dan pertolongan				100%	100%	100%
	Pembinaan pengerahan dan pengendalian BSG dalam Operasi SAR	995.780.000	986.997.052	99,12%			
	Gelar Pasukan Operasi SAR	250.000.000	206.125.292	82,45%			
	Pembinaan pengelolaan administrasi pengerahan dan pengendalian operasi SAR	498.347.000	486.514.519	99,42%			
	IKSK.1.3.1.e Persentase penyusunan dokumen rencana, pengembangan dan evaluasi di bidang operasi pencarian dan pertolongan				100%	100%	100%
	Evaluasi Operasi Pencarian dan Pertolongan	159.700.000	159.004.000	99,56%			
	Asistensi Rencana Kontingensi	187.375.000	186.889.864	99,74%			
	SAR Transport Meeting	878.915.000	867.732.480	98,73%			
	IKSK.1.3.1.f Persentase penyusunan rancangan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang operasi pencarian dan pertolongan				100%	100%	100%
	Penyusuna Juknis di Bidang Operasi SAR	149.025.000	146.630.000	98,39%			
	Penyusuna Pedoman di Bidang Operasi SAR	141.718.000	134.375.000	94,82%			
	Penyusuna SOP di Bidang Operasi SAR	139.935.000	138.135.000	98,71%			
	<b>SK.1.3.2. Meningkatkan Evaluasi Kinerja dan Pengelolaan Kearsipan yang Andal</b>						
	IKSK.1.3.2.a Nilai SAKIP oleh APIP				BB (73)	B (71,75)	98,29%
	-	-	-	-			

NO	URAIAN	BELANJA			CAPAIAN KINERJA		
		ANGGARAN	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
	IKSK.1.3.2.b Hasil pengawasan kearsipan internal				85	91,41	107,54%
	-	-	-	-			
	IKSP.1.2 Waktu tempuh (deployment time) pada penanganan operasi pencarian dan pertolongan				150 menit	130,95 menit	112,70%
	<b>SK.1.2.1 Tercapainya waktu tempuh (deployment time) pada penanganan operasi Pencarian dan Pertolongan</b>						
	IKSK.1.2.1.a Waktu tempuh (deployment time) pada penanganan operasi pencarian dan pertolongan (menit)				150 menit	130,95 menit	112,70%
	Pengerahan dan Pengendalian Operasi SAR	3.234.622.000	1.734.35.648	53,61			
<b>3.</b>	<b>SS.3 Meningkatkan keandalan sumber daya Pencarian dan Pertolongan</b>						
	IKSS.4 Tingkat pemenuhan kebutuhan minimum sumber daya Pencarian dan Pertolongan				74,34%	34,02%	45,76%
	<b>SP.5 Meningkatkan keandalan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan</b>						
	IKSP.5.1 Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan yang sesuai perencanaan dan standar				34,83%	36,40%	104,51%
	<b>SK.5.1.1 Meningkatkan perencanaan dan standarisasi sarana dan prasarana yang berkualitas</b>						
	IKSK.5.1.1.a Persentase pemenuhan sarana pencarian dan pertolongan darat				39,20%	39,20%	100%
	Pengadaan Rescue Car Type II	19.222.500.000	19.222.500.000	100%			
	Pengadaan Rescue Motorcycle	878.900.000	878.900.000	100%			
	Pengadaan Rescue Car Type I	10.989.640.000	10.989.640.00	100%			
	IKSK.5.1.1.b Persentase pemenuhan sarana pencarian dan pertolongan laut				38,79%	46,77%	121%

NO	URAIAN	BELANJA			CAPAIAN KINERJA		
		ANGGARAN	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
	Pengadaan RBB Kelas I	34.690.784.000	34.690.784.000	100%			
	Pengadaan landing craft/Rubber Boat	9.919.000.000	9.919.000.000	100%			
	Pengadaan Rescue Water Craft	3.820.000.000	3.820.000.000	100%			
	Pengadaan Double Stabilize Boat	1.533.708.000	1.533.707.000	100%			
	IKSK.5.1.1.c Persentase pemenuhan sarana pencarian dan pertolongan udara	-	-	-	25%	25%	100%
	IKSK.5.1.1.d Persentase pemenuhan peralatan pencarian dan pertolongan				44,47	45,75	103%
	Pengadaan peralatan confinespace	4.402.650.000	4.402.650.000	100%			
	Pengadaan forklift	888.748.000	885.780.000	99,67%			
	Pengadaan ROV untuk KN SAR Ganesha	60.000.000.000	59.976.298.665	99,81%			
	Pengadaan Emergency lighting	955.000.000	955.000.000	100%			
	Pengadaan handheld sonar	2.741.700.000	2.741.700.000	100%			
	Pengadaan peralatan under water evacuation	4.084.130.000	4.084.130.000	100%			
	Pengadaan high angle rescue	8.751.862.000	8.751.862.000	100%			
	Pengadaan kantong mayat	299.000.000	298.000.000	99,67%			
	Pengadaan bahan pengepakan dan penyimpanan	147.811.000	147.375.255	99,71%			
	Pengadaan perlengkapan rescuer	11.664.000.000	11.664.000.000	100%			
	Pengadaan Rescue Personal Protective Equipment	7.755.320.000	7.755.320.000	100%			
	Pengadaan life jacket	4.578.030.000	4.578.030.000	100%			
	Pengadaan air ambulance untuk helikopter basarnas	1.700.000.000	1.624.060.000	95,53%			
	Pengadaan Urban SAR Equipment for Inasar	9.661.083.000	9.634.181.500	99,72%			

NO	URAIAN	BELANJA			CAPAIAN KINERJA		
		ANGGARAN	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
	Pengadaan persediaan Urban SAR equipment for heavy Class Inasar	515.316.000	510.518.600	99,07%			
	Pengadaan Urban SAR Equipment for Heavy Class Inasar	30.189.048.000	30.151.033.850	99,87%			
	Pengadaan peralatan ekstrikasi	7.854.972.000	7.678.946.000	99,13%			
	Pengadaan persediaan Medis Equipment	1.063.314.000	1.047.551.260	98,52%			
	IKSK.5.1.1.e Persentase pemenuhan prasarana pencarian dan pertolongan	-	-	-	27,01%	27,01%	100%
	IKSK.5.1.1.f Jumlah dokumen rencana pengembangan sarana dan prasarana				1 Dok	1 Dok	100%
	Pemantauan pengelolaan sarana	205.689.000	198.686.209	96,60%			
	Workshop sarana dan prasarana	487.327.000	385.192.966	95,45%			
	Penyusunan dokumen proses pengadaan sarana dan prasarana	111.407.000	104.027.250	93,38%			
	Jasa konsultasi perencanaan peralatan simulasi virtual pencarian dan pertolongan	375.000.000	337.440.000	89,98%			
	IKSK.5.1.1.g Jumlah norma/ standar/ prosedur sarana dan prasarana yang telah disahkan				1 Dok	1 Dok	100%
	Penyusunan standarisasi biaya Pemeliharaan Sarana Perairan	140.295.500	115.061.900	97,93%			
	IKSP.5.2 Persentase pemenuhan dukungan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan dalam menunjang operasi Pencarian dan Pertolongan				95%	95%	100%
	<b>SK.5.2.1 Meningkatkan kualitas dukungan sarana dan prasarana</b>						
	IKSK.5.2.1.a Persentase pemenuhan dukungan sarana dan prasarana				95%	95%	100%
	Uji fungsi sarana dan peralatan pencarian dan pertolongan	293.400.000	240.231.605	98,90%			
	Pembinaan Teknis Sarana dan Prasarana	277.832.000	264.745.401	95,29%			

NO	URAIAN	BELANJA			CAPAIAN KINERJA		
		ANGGARAN	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
	IKSK.5.2.1.b Persentase penerapan materi pembinaan teknis				95%	95%	100%
	Pembinaan Teknis Sarana dan Prasarana	277.832.000	264.745.401	95,29%			
	IKSK.5.2.1.c Jumlah pelaksanaan pengujian sarana				8 Dok	8 Dok	100%
	Uji fungsi	293.400.000	240.231.605	98,90%			
	IKSK.5.2.1.d Persentase pemenuhan dukungan perbekalan				95%	95%	100%
	Pendistribusian Peralatan dan perbekalan	293.777.000	293.454.579	99,89%			
	Pengadaan perlengkapan pendukung pergudangan	647.603.000	647.558.400	99,99%			
	Pengadaan perlengkapan pendukung sarana dan peralatan	352.844.000	352.785.550	99,98%			
	IKSP.5.3 Meningkatkan keakuratan data inventarisasi dan kualitas pemeliharaan						
	<b>SK.5.3.1 Meningkatkan kesiapan sarana pencarian dan pertolongan darat</b>				96,16%	98,20%	102%
	Pemeliharaan Rescue truk	100.000.000	98.179.300	98,18%			
	Pemeliharaan Rescue Car	540.000.000	521.0127.850	96,49%			
	Pemeliharaan truk personil	280.000.000	279.941.450	99,98%			
	Pemeliharaan Rescue Carier Vehicle	120.000.000	116.295.100	96,91%			
	Pemeliharaan multipurpose vehicle logistic	386.364.000	356.357.262	100%			
	Pemeliharaan motor lapangan	85.000.000	67.568.730	79,49%			
	Pemeliharaan mobile trailer pump	70.000.000	67.747.450	96,78			
	Pemeliharaan refueler 5000 L	114.842.000	107.976.590	94,02%			
	Pemeliharaan helikopter vessel control vehicle	60.000.000	53.557.500	89,26%			

NO	URAIAN	BELANJA			CAPAIAN KINERJA		
		ANGGARAN	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
	Pemeliharaan ATV	240.000.000	69.313.950	49,51%			
	Pemeliharaan Truk ATV	90.000.000	83.885.900	93,21%			
	Pemeliharaan Rescue Excavator	410.000.000	395.000.000	96,34%			
	Pemeliharaan Truk UAV	60.000.000	53.309.900	88,85%			
	Pemeliharaan Tactical Multipurpose Vehicle For Ground Operation	122.015.000	79.703.550	63,52%			
	Pemeliharaan Disaster Support Tactical Equipment Vehicle	301.329.000	301.301.850	99,99%			
	<b>SK.5.3.2 Meningkatnya kesiapan sarana pencarian dan pertolongan laut</b>				89,04%	91,78%	103%
	Dukungan BBM sarana laut	97.049.691.000	97.049.691.000	100%			
	Penyusunan repair list kapal	1.200.000.000	1.124.558.760	99,89%			
	Pekerjaan docking kapal Basarnas	53.822.916.000	53.454.318.541	99,32%			
	<b>SK.5.3.3 Meningkatnya kesiapan sarana pencarian dan pertolongan udara</b>				82,74%	88,49%	107%
	Pemeliharaan pesawat terbang (helikopter)	116.380.419.000	116.248.455.152	99,89%			
	Dukungan BBM helikopter SAR	4.410.877.000	4.410.492.708	99,99%			
	<b>SK.5.3.4 Meningkatnya kesiapan peralatan pencarian dan pertolongan</b>				96,16%	98,20%	102%
	Pemeliharaan peralatan SAR darat	993.530.000	990.620.610	99,71%			
	Pemeliharaan peralatan SAR Laut	298.255.000	297.964.260	99,90%			
	Pemeliharaan Emergency Lighting	30.000.000	29.600.000	98,67%			
	Pemeliharaan Ground Support Equipment Hanggar	800.001.000	623.521.126	77,94%			
	Perbaikan ROV KN SAR Wisnu	4.412.142.330	4.412.142.330	100%			
	Perbaikan ROV KN SAR Kamajaya	1.374.862.000	1.374.628.995	99,98%			
	Peralatan dan Perlengkapan Gudang	200.000.000	199.866.600	99,93%			

NO	URAIAN	BELANJA			CAPAIAN KINERJA		
		ANGGARAN	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
	Pemeliharaan Dropable Liferaft	195.360.000	180.985.500	92,64%			
	Handheld Sonar	190.220.000	190.000.000	99,88%			
	Thermal Drone	316.350.000	314.565.000	99,44%			
	<b>SK.5.3.5 Meningkatnya kesiapan prasarana pencarian dan pertolongan</b>				100%	100%	100%
	Pemeliharaan hanggar helikopter	277.600.000	275.695.150	99,31%			
	Pemeliharaan halaman hanggar helikopter	62.860.000	62.829.496	99,95%			
	Pemeliharaan tower rappeling kantor pusat	100.000.000	98.379.000	98,38%			
	Perbaikan tower rappeling kantor pusat	215.000.000	197.961.000	92,07%			
	<b>SK.5.3.6 Meningkatnya kesiapan prasarana pencarian dan pertolongan</b>						
	Inventarisasi pemutakhiran	-	-	-	100%	100%	100%
	<b>SP.6 Meningkatnya keandalan sistem komunikasi Pencarian dan Pertolongan</b>						
	IKSP.6.1 Persentase pemenuhan sistem komunikasi pencarian dan pertolongan yang sesuai perencanaan dan standar				51.70%	51.86%	100.31%
	<b>SK.6.1.1 Meningkatnya penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, rencana dan pengembangan serta pemantauan, penilaian, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang sistem komunikasi</b>						
	IKSK.6.1.1.a Persentase Pemenuhan Peralatan Komunikasi				51.70%	51.86%	100.31%
	Pengadaan Base Communication System	8,000,000,000	7,994,341,500	99.92%			
	Pengembangan Peralatan Digital Mobile Radio VHF	15,000,000,000	14,962,245,000	99.74%			

NO	URAIAN	BELANJA			CAPAIAN KINERJA		
		ANGGARAN	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
	Tactical Field Operation Communica System	763,000,000	738,358,900	96.77%			
	Pengadaan Wall Display Basarnas Center	8,777,200,000	8,777,000,000	99.99%			
	Pengadaan Proteksi Petir MEOLUT	407,000,000	405,000,000	99.50%			
	IKSK.6.1.1.b Persentase dokumen rencana pengembangan, realisasi dan ketersediaan suku cadang Sistem Komunikasi				100%	100%	100%
	Penyusunan Spesifikasi Teknis Rencana Pengembangan serta Kajian dan Evaluasi	Non Anggaran	Non Anggaran	Non Anggaran			
	IKSK.6.1.1.c Persentase norma standar prosedur dan petunjuk teknis yang telah disahkan				100%	100%	100%
	Penyusunan Petunjuk Teknis Pengoperasian peralatan komunikasi	43,818,000	43,639,227	99.59%			
	Penyusunan Petunjuk Teknis Uji Gelar Komunikasi						
	Buku Saku penempatan repeater	Non Anggaran	Non Anggaran	Non Anggaran			
	IKSK.6.1.1.d Nilai Audit Kearsipan Direktorat Sistem Komunikasi				93	97.12	104%
	Dokumen tata usaha dan kearsipan Direktorat Sistem Komunikasi	Non Anggaran	Non Anggaran	Non Anggaran			
	IKSK.6.1.1.e Nilai SAKIP oleh APIP				65	70.65	105%
	Dokumen SAKIP	Non Anggaran	Non Anggaran	Non Anggaran			
	Reformasi Birokrasi	Non Anggaran	Non Anggaran	Non Anggaran			
	Forum Konsultasi Publik	Non Anggaran	Non Anggaran	Non Anggaran			
	Maturitas SPIP	Non Anggaran	Non Anggaran	Non Anggaran			

NO	URAIAN	BELANJA			CAPAIAN KINERJA		
		ANGGARAN	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
	IKSP.6.2 Persentase pemenuhan dukungan sistem komunikasi pencarian dan pertolongan serta pemenuhan pelaksanaan sertifikasi pemancar sinyal marabahaya dalam menunjang operasi pencarian dan pertolongan				100%	100%	100%
	<b>SK.6.2.1 Tercapainya kebijakan dan kegiatan di bidang sistem komunikasi, koordinasi, dan pelaksanaan dukungan komunikasi serta pelaksanaan sertifikasi pemancar sinyal marabahaya</b>						
	IKSK.6.2.1.a Persentase pemenuhan dukungan sistem komunikasi dalam pelaksanaan kegiatan pencarian dan pertolongan				100%	100%	100%
	Latihan Gelar Komunikasi Basarnas	396,084,000	389,197,553	98.26%			
	Profisiensi Teknisi Peralatan Komunikasi	419,166,000	416,667,910	99.40%			
	Asistensi Dukungan komunikasi	214,996,000	209,936,186	97.64%			
	Pendistribusian Peralatan Komunikasi	100,000,000	91,578,070	91.57%			
	Optimalisasi system komunikasi basarnas	263,487,000	263,383,572	99.96%			
	Workshop Sistem Komunikasi Basarnas	221,045,000	219,556,640	99.32%			
	Bimbingan Teknis Sosdet	332,900,000	33,2804,551	99.97%			
	Pembinaan Inventarisasi Peralatan Komunikasi SAR	321,000,000	317,767,769	98.99%			
	Penyelenggaraan Cospas-Sarsat Meeting	308,206,000	306,583,267	99.47%			
	IKSK.6.2.1.b Persentase nilai false alert berdasarkan hasil pendeteksian LUT MCC				3	1.34	224%
	Nilai False Alert	Non Anggaran	Non Anggaran	Non Anggaran			
	IKSK.6.2.1.c Jumlah data registrasi dan sertifikasi sinyal marabahaya				700	1068	153%

NO	URAIAN	BELANJA			CAPAIAN KINERJA		
		ANGGARAN	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
	Registrasi Alat Pemancar Sinyal Mara Bahaya	71,107,000	70,415,000	99.02%			
	Sosialisasi Sistem Deteksi Dini	301,850,000	299,955,376	99.37%			
	IKSS.5 Tingkat kesiapan sarana prasarana serta sistem komunikasi Pencarian dan Pertolongan						
	<b>SP.5 Meningkatnya keandalan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan</b>						
	IKSP.5.3 Persentase kesiapan sarana dan prasarana dalam menunjang keberhasilan tugas Pencarian dan Pertolongan				92,82%	95,33%	102,7%
	<b>SK.5.3.1 Meningkatnya keakuratan data inventarisasi dan kualitas pemeliharaan</b>						
	IKSK.5.3.1.a Persentase kesiapan sarana pencarian dan pertolongan darat				96,16%	98,20%	102%
	RO .....						
	RO .....						
	IKSK.5.3.1.b Persentase kesiapan sarana pencarian dan pertolongan laut				89,04%	91,78%	103%
	RO .....						
	RO .....						
	IKSK.5.3.1.c Persentase kesiapan sarana pencarian dan pertolongan udara				82,74%	88,49%	107%
	RO .....						
	RO .....						
	IKSK.5.3.1.d Persentase kesiapan peralatan pencarian dan pertolongan				96,16%	98,2%	102%
	RO .....						
	RO .....						
	IKSK.5.3.1.e Persentase kesiapan prasarana pencarian dan pertolongan				100%	100%	100%

NO	URAIAN	BELANJA			CAPAIAN KINERJA		
		ANGGARAN	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
	RO .....						
	RO .....						
	IKSK.5.3.1.f Persentase pemutakhiran data inventarisasi sarana dan prasarana						
	RO .....						
	RO .....						
	<b>SP.6 Meningkatnya keandalan sistem komunikasi Pencarian dan Pertolongan</b>						
	IKSP.6.3 Persentase kesiapan perangkat dan peralatan komunikasi dalam menunjang keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan				92%	92.2%	101%
	<b>SK.6.3.1 Tercapainya kesiapan dan akurasi inventarisasi peralatan komunikasi</b>						
	IKSK. 6.3.1.a Persentase kualitas pemeliharaan peralatan komunikasi				92%	92.2%	101%
	Pemeliharaan Peralatan komunikasi Basarnas	10,262,368,000	10,258,732,368	99.96%			
	Pemeliharaan Peralatan Deteksi Dini (LUT)	6,973,719,000	6,973,718,109	99.99%			
	Pemeliharaan Communication SAR Mobile	2,330,582,000	2,330,552,249	99.99%			
	Layanan GPRS Connection	8,126,331,000	7,927,299,044	97.55%			
	Communication Supporting Equipment	9,448,000,000	9,,436,368,161	99.87%			
	IKSK. 6.3.1.b Persentase keakuratan data peralatan komunikasi				80%	94.71%	118%
	Ijin Frekuensi Radio Komunikasi Basarnas	746,000,000	745,830,739	99.97%			
	Sewa Tower Penempatan Peralatan Repeater Basarnas	6,663,000,000	6,662,059,953	99.98%			
	IKSS.6 Persentase SDM Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan Potensi yang bersertifikat				100%	96,29%	96,26%

NO	URAIAN	BELANJA			CAPAIAN KINERJA		
		ANGGARAN	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
	<b>SP.3 Meningkatnya kualitas SDM Tenaga Pencarian dan Pertolongan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan</b>						
	IKSP.3.1 Persentase peningkatan pembinaan tenaga, sertifikasi, dan pengelolaan jabatan fungsional						
	<b>SK.3.1.1 Terwujudnya peningkatan pembinaan tenaga, sertifikasi dan pengelolaan jabatan fungsional</b>				95 %	95 %	100 %
	IKSK.3.1.1.a Persentase Tenaga Pencarian dan Pertolongan yang terbina						
	Pembinaan Tenaga Pencarian dan Pertolongan	1.189.327.000	1.181.438.203	99,34 %			
	Pembinaan Awak Sarana Air	1.932.620.000	1.929.187.575	99,82 %			
	Uji Periodik Tenaga SAR	541.256.000	532.867.826	98,45 %			
	Training Crew Helicopter	1.000.000.000	813.621.500	81,36 %			
	Penyediaan Jasa Pengawakan Kapal SAR	16.477.089.000	16.425.844.805	99,69 %			
	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Pencarian dan Pertolongan	8.224.209.000	8.175.799.102	99,41 %			
	Raker Pengelolaan Tenaga Teknis Pencarian dan Pertolongan	181.900.000	-	-			
	Pembinaan Awak Sarana Udara melalui Simulator	4.414.204.000	4.403.460.000	99,76 %			
	Pembinaan Kompetensi Petugas Pencarian dan Pertolongan	165.925.000	70.840.755	42,69 %			
	Pemantauan Pembinaan Kompetensi Tenaga Teknis SAR	496.000.000	494.224.522	99,64 %			
	Pembinaan Tenaga Instruktur	-	-	-			
	IKSK.3.1.1.b Persentase Petugas Pencarian dan Pertolongan yang kompeten dan tersertifikasi				95 %	95 %	100 %
	Sertifikasi ARO	645.000.000	639.992.655	99,22 %			

NO	URAIAN	BELANJA			CAPAIAN KINERJA		
		ANGGARAN	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
	Uji Kompetensi Pranata Pencarian dan Pertolongan	912.494.000	911.207.597	99,86 %			
	Pengelolaan LSP	896.942.000	894.379.920	99,71 %			
	Pengelolaan Sertifikasi Tenaga Pencarian dan Pertolongan	188.600.000	176.669.858	93,67 %			
	Uji Kompetensi Penata Keloja Pencarian dan Pertolongan	275.000.000	262.463.446	95,44 %			
	Sertifikasi K3	447.067.000	442.085.850	98,89 %			
	Sertifikasi Pasca Pelatihan Teknis Tenaga SAR	-					
	IKSK.3.1.1.c Indeks Kepuasan Layanan Pengelolaan Jabatan Fungsional Pencarian dan Pertolongan				90	97,5	107,83
	Sosialisasi Jabatan Fungsional	187.825.000	187.823.918	100 %			
	Pengelolaan administrasi Jabatan Fungsional Basarnas	429.839.000	428.928.550	99,79 %			
	Sosialisasi Jabatan Fungsional	-	-	-			
	Forum Koordinasi Jabatan Fungsional	256.360.000	255.269.000	99,57 %			
	<b>SK.3.2.1 Terwujudnya peningkatan pengembangan dan standardisasi tenaga teknis pencarian dan pertolongan</b>						
	IKSK.3.2.1.a Persentase norma, standar, prosedur dan kriteria tenaga yang ditetapkan				75 %	90 %	100 %
	Penyusunan Materi Mikro Pembinaan Kompetensi Tenaga	219.912.000	207.073.740	94,16 %			
	Penyusunan Pedoman Uji Periodik Tenaga SAR	199.067.000	182.823.520	91,82 %			
	IKSK.3.2.1.b Persentase dokumen rencana, pengembangan dan evaluasi tenaga pencarian dan pertolongan yang disahkan				75 %	90 %	100 %

NO	URAIAN	BELANJA			CAPAIAN KINERJA		
		ANGGARAN	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
	Penyusunan Pedoman Pembinaan Kompetensi Tenaga SAR	243.133.000	221.106.213	99,12 %			
	Penyusunan Pedoman Pemeliharaan Kesehatan Tenaga SAR	67.350.000	67.231.550	99,82 %			
	Penyusunan Pedoman Pembinaan Tenaga Komunikasi	-	-	-			
	<b>SP.4 Meningkatnya kualitas SDM potensi Pencarian dan Pertolongan</b>						
	IKSP.4.1 Persentase kenaikan jumlah potensi pencarian dan pertolongan yang terlibat dalam operasi pencarian dan pertolongan						
	<b>SK.4.1.1 Meningkatnya peran serta SDM Potensi dalam penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan</b>				<b>100%</b>	<b>95%</b>	<b>95%</b>
	IKSK.4.1.1.b Persentase kenaikan jumlah potensi yang terlibat dalam operasi pencarian dan pertolongan						
	Penyiapan Dukungan Pelibatan Potensi	120.000.000	118.978.505	99,1%			
	Pengelolaan Sistem Informasi Bina Potensi	656.770.000	636.970.648	97%			
	<b>SK.4.2.1 Meningkatnya kualitas norma, standar, kriteria, dan prosedur pemberdayaan masyarakat pencarian dan pertolongan</b>						
	IKSK.4.2.1.a Persentase norma, standar, prosedur dan kriteria rencana dan pengembangan potensi yang tersusun						
	Penyusunan Petunjuk Teknis Pemberdayaan Masyarakat bidang PP	255.235.000	240.926.915	94,4%			
	Penyusunan Pedoman Sistem Informasi Bina Potensi	268.942.000	264.472.534	98,3%			

NO	URAIAN	BELANJA			CAPAIAN KINERJA		
		ANGGARAN	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
	<b>SK.4.3.1 Meningkatnya jumlah masyarakat yang antusias terhadap keselamatan diri</b>						
	IKSK.4.3.1.a Tingkat partisipasi masyarakat yang mengikuti penyuluhan, pemberdayaan masyarakat pencarian dan pertolongan				100%	100%	100%
	Penyusunan Petunjuk Teknis Pemberdayaan Masyarakat bidang PP	255.235.000	240.926.915	94,4%			
	Penyusunan Pedoman Sistem Informasi Bina Potensi	268.942.000	264.472.534	98,3%			
	Reviu SOP Pelayanan Publik Bidang Pembinaan Potensi	100.000.000	86.545.700	86,5%			
	Pemantauan Pemeliharaan Kompetensi Potensi PP	249.635.000	223.462.885	89,5%			
	Pencetakan Buku Saku Penyuluhan Pencarian dan Pertolongan	200.000.000	194.472.000	97,2%			
	Pencetakan Buku SAR Goes to School TK/SD	150.000.000	146.300.000	97,5%			
	Pencetakan Buku SAR Goes to School SMP	150.000.000	147.900.000	98,6%			
	Pencetakan Buku SAR Goes to School SMA	150.000.000	147.900.000	98,6%			
	<b>SK.3.3.1. Meningkatnya kompetensi teknis potensi Pencarian dan Pertolongan</b>						
	IKSK. 3.3.1.a Persentase peserta yang lulus pelatihan peningkatan kompetensi teknis potensi pencarian dan pertolongan				2184	2107	96,47%
	RO 6931.BDC.001.Pelatihan dasar potensi sar dipermukaan air	198.600.000	198.503.400	99,95			
	RO 6931.BDC.004.Pelatihan dasar potensi sar diketinggian	198.600.000	198.482.430	99,94			

NO	URAIAN	BELANJA			CAPAIAN KINERJA		
		ANGGARAN	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
	RO 6931.BDC.007.Pelatihan dasar potensi sar digunung hutan	198.600.000	198.482.430	99,96			
	RO 6931.BDC.010.Pelatihan dasar potensi sar pertolongan pertama	198.600.000	117.992.250	59,41			
	IKSK. 3.3.1.b Indeks kepuasan peserta pelatihan terhadap layanan pengelolaan pelatihan peningkatan kompetensi teknis potensi pencarian dan pertolongan				5	5	100%
	Program SAR Goes to School	450.000.000	401.821.661	89,3%			
	Pemberdayaan Kelompok Masyarakat di Bidang PP	2.300.000.000	2.280.323.811	99,1%			
	<b>SK.3.3.2. Tersedianya norma, standar, prosedur dan kriteria bidang pelatihan kompetensi teknis dan Manajerial ASN serta kompetensi teknis potensi pencarian dan pertolongan</b>				2 NSPK	2 NSPK	100%
	IKSK. 3.3.2.a Persentase dokumen norma, standar, prosedur dan kriteria bidang pelatihan kompetensi teknis dan Manajerial ASN serta kompetensi teknis potensi pencarian dan pertolongan						
	RO 6932.EBA.962.161.Layanan Umum	103.899.000	103.785.802	99,89			
	RO 6931.AFA.001.Perencanaan dan Standardisasi diklat SAR	3.358.766.000	3.147.326.862	93,70			
<b>4.</b>	<b>SS 4 Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)</b>						
	IKSS.7 Nilai Indeks Reformasi Birokrasi				76	N/A	N/A
	<b>SP.7 Meningkatnya profesionalitas ASN Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan</b>						
	IKSP.7.1 Indeks Sistem Merit Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan				0,71	0,79	111,26%
	<b>SK.7.1.1 Meningkatnya kualitas dan kinerja pegawai</b>						
	IKSK.7.1.1.a Indeks Sistem Merit	5.511.353.000	4.175.963.405	75,77%	0,71	0,79	111,26%

NO	URAIAN	BELANJA			CAPAIAN KINERJA		
		ANGGARAN	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
	RO 960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal						
	960.052.B Evaluasi dan Penyusunan Analisa Jabatan	101.696.000	101.695.085	100,00 %	2 kegiatan	1 kegiatan	50%
	960.052.C. Evaluasi dan Penyusunan Analisa Beban Kerja	109.609.000	109.607.670	100,00 %	2 kegiatan	1 kegiatan	50%
	RO 954 Layanan Manajemen SDM						
	954.121.A. Pengadaan CASN	4.550.323.000	3.230.628.180	71,00 %	4 kegiatan	7 kegiatan	175%
	954.121.B. Assessment Pegawai	421.947.000	406.855.920	96,42 %	4 kegiatan	7 kegiatan	175%
	954.122.C. Pembinaan Bidang Kepegawaian	244.506.000	244.505.410	100,00 %	4 kegiatan	7 kegiatan	175%
	954.122.D. Pengelolaan Penilaian Kinerja Pegawai	83.272.000	82.671.140	99,28 %	2 kegiatan	1 kegiatan	50%
	IKSK.7.1.1.b Persentase kepuasan pegawai terhadap layanan kepegawaian	1.526.402.000	1.469.312.595	96,26%	90.00%	97.75%	108.61%
	RO 954 Layanan Manajemen SDM 954.122.A. Pelaksanaan Ujian Dinas Pegawai	189.600.000	189.592.920	100,00 %	1 kegiatan	1 kegiatan	100%
	954.122.B. Kegiatan SIASN	319.577.000	317.627.200	99,39 %	2 kegiatan	2 kegiatan	100%
	954.122.E. Penggantian Biaya Mutasi Pegawai	119.698.000	118.215.355	98,76 %	2 kegiatan	1 kegiatan	50%
	954.123.A. Sumpah Jabatan Pegawai Negeri Sipil	368.589.000	367.018.620	99,57 %	8 kegiatan	5 kegiatan	62,50%
	954.123.B. Pengelolaan Kesejahteraan Pegawai	438.231.000	430.324.770	98,20 %	4 kegiatan	4 kegiatan	100%
	954.123.C. Pengelolaan Data Base Kepegawaian	42.300.000	0	0,00 %	2 kegiatan	0 kegiatan	0%
	954.123.D. Pengelolaan Jabatan Fungsional	43.685.000	43.683.500	100,00 %	2 kegiatan	1 kegiatan	50%
	954.123.G. Pengiriman Surat Dinas	4.722.000	2.850.230	60,36 %	2 kegiatan	2 kegiatan	100%

NO	URAIAN	BELANJA			CAPAIAN KINERJA		
		ANGGARAN	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
	<b>SK.7.1.1. Meningkatnya kompetensi manajerial dan teknis ASN Pencarian dan Pertolongan</b>						
	IKSK. 7.1.1.a Persentase peserta yang lulus pelatihan peningkatan kompetensi manajerial dan teknis ASN pencarian dan pertolongan				500	413	82,60%
	RO 6932.EBC.968 Layanan Pendidikan Kedinasan	352.822.000	329.321.825	93,34			
	RO 6932.EBC.996.Layanan pendidikan dan pelatihan	669.739.000	665.630.000	99,39			
	RO 6931.DCK.001.Diklat SAR	8.354.753.000	7.600.990.319	90,98			
	IKSK. 7.1.1.b Indeks kepuasan peserta pelatihan terhadap layanan pengelolaan pelatihan peningkatan kompetensi manajerial dan teknis ASN pencarian dan pertolongan				5	5	100%
	<b>SP.8 Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan</b>						
	IKSP.8.1 Tingkat pemenuhan BMN sesuai RKBMN (%)				100%	95,50%	95,50%
	<b>SK.8.1.1 Terwujudnya pengelolaan BMN dan pengelolaan kerumahtanggaan yang akuntabel</b>						
	IKSK.8.1.1.a Persentase kepuasan layanan kesehatan dan layanan umum				90%	100%	111%
	Peningkatan Kompetensi Poliklinik	66.500.000	65.608.305	98,66 %			
	Pengelolaan Limbah Medis	33.500.000	33.051.000	98,66 %			
	Poliklinik	377.100.000	367.246.299	97,39 %			
	Outsourcing Satpam, Pramubakti, Pengemudi dan Petugas ME	14.562.626.000	14.561.151.000	99,99 %			
	IKSK.8.1.1.b Persentase pengelolaan Barang Milik Negara sesuai peraturan				95%	100%	105%

NO	URAIAN	BELANJA			CAPAIAN KINERJA		
		ANGGARAN	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
	Penghapusan dan Pemindahtanganan Asset	85.218.000	84.737.722	99,44 %			
	Pembinaan Pengelolaan BMN	112.357.000	112.255.924	99,91 %			
	Penyusunan dan Reviu Laporan BMN	98.278.000	97.484.797	99,19 %			
	Penilaian BMN	67.020.000	66.964.747	92,67 %			
	Penyusunan RKBMN	60.361.000	57.143.950	99,67 %			
	Sensus BMN	324.214.00	322.737.771	99,54%			
	Penyusunan Pedoman Standarisasi Penamaan BMN	79.144.000	78.265.200	98,89%			
	IKSK.8.1.1.c Persentase realisasi layanan operasional dan pemeliharaan kantor				100%	100%	100%
	Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai/ Tenaga Teknis lainnya	561.460.000	561.460.000	100 %			
	Pemeliharaan Gedung/ Halaman Kantor	9.174.697.000	9.164.807.037	98,89 %			
	Pemeliharaan Sarana Kantor	7.505.197.000	7.236.772.672	96,42 %			
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	2.945.260.000	2.943.210.895	99,93 %			
	Langganan Daya dan Jasa	9.228.500.000	8.824.533.481	95,62 %			
	Operasional Perkantoran dan Pimpinan	1.189.504.000	1.176.526.203	98,91 %			
	Sewa Kendaraan Operasional Perkantoran Pimpinan	1.165.680.000	1.161.600.000	99,65 %			
	Pengadaan Plakat	200.000.000	197.590.000	98,80 %			
	IKSK.8.1.1.d Persentase kepuasan layanan keprotokoleran dan tata usaha pimpinan				90%	96,50%	107%
	Layanan Keprotokolan	350.000.000	349.951.500	99,99 %			
	Perjalanan Dinas Dalam Negeri	639.974.000	604.026.471	94,38 %			
	Perjalanan Dinas Luar Negeri	1.460.000.000	1.459.650.820	99,98 %			

NO	URAIAN	BELANJA			CAPAIAN KINERJA		
		ANGGARAN	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
	Peningkatan Kompetensi Keprotokolan	64.846.000	64.678.320	99,74 %			
	Perlengkapan Keprotokolan Pimpinan dan UPT	400.000	0	0%			
	Penyusunan Pedoman Standarisasi Keprotokolan	90.399.000	87.246.073	96,51 %			
	Pelayanan TU Pimpinan	800.000.000	796.372.275	99,55 %			
	<b>SK.8.2.1 Terwujudnya kualitas layanan pengadaan barang/jasa yang profesional</b>						
	IKSK.8.2.1.a Persentase penyelesaian proses pengadaan barang/jasa sesuai peraturan				90%	100%	111%
	Pembinaan Personil UKPBJ dan Kelembagaan Pengadaan Barang/ Jasa	297.864.000	295.730.562	99,28 %			
	Peningkatan Kemampuan Personil Pengadaan Barang dan Jasa	11.000.000	10.315.127	99,37 %			
	Optimalisasi Pelayanan Pengadaan Barang/ Jasa	120.797.000	119.849.400	99,22 %			
	Penyusunan Peraturan Pengadaan Barang/ Jasa	73.909.000	73.882.100	99,96 %			
	Optimalisasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik	15.889.000	15.490.000	97,49 %			
	<b>SK.8.1.1 Terwujudnya pengelolaan BMN dan pengelolaan kerumahtanggaan yang akuntabel</b>						
	IKSK.8.1.1.e Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur				95%	100%	105%
	Pengembangan Fasilitas Layanan Pengadaan Secara Elektronik	384.823.000	384.460.684	99,91 %			
	Pengadaan Perlengkapan Fasilitas Prasarana Gedung	500.000.000	494.840.500	98,97%			
	IKSP.8.2 Opini BPK-RI atas laporan keuangan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan				WTP	WTP	100%

NO	URAIAN	BELANJA			CAPAIAN KINERJA		
		ANGGARAN	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
	<b>SK.8.2.2 Terwujudnya pengelolaan keuangan yang akuntabel</b>						
	IKSK.8.2.2.a Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK-RI dan hasil Audit APIP				80%	85,46%	106,8%
	EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan	3,433,612,000	3,395,571,937	98.89%			
	IKSK.8.2.2.b Nilai IKPA Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan				85	92,31	108,6%
	EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan	3,433,612,000	3,395,571,937	98.89%			
	IKSK.8.2.2.c Persentase Penerimaan Negara sesuai dengan peraturan PNPB				100%	816,58%	816,58%
	EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan	3,433,612,000	3,395,571,937	98.89%			
	IKSK.8.2.2.d Opini BPK RI atas laporan keuangan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan				WTP	WTP	100%
	EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan	3,433,612,000	3,395,571,937	98.89%			
	<b>SP.9 Meningkatnya kualitas teknologi informasi, pengelolaan data, dan informasi publik Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan</b>						
	IKSP.9.1 Skor Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan				Informatif (90)	Informatif (94,67)	105,18%
	<b>SK.9.1.1 Meningkatnya kualitas layanan informasi Pencarian dan Pertolongan</b>						
	IKSK.9.1.1.a Persentase pelaksanaan kegiatan kehumasan				100%	100%	100%
	Penerbitan Buletin Rescue News	57.022.000	57.000.000	99,96 %			
	Peliputan Berita Kegiatan dan Operasi SAR	347.515.000	347.122.035	99,89 %			
	Pameran / visualisasi dan Publikasi	188.768.000	188.678.950	99,95 %			

NO	URAIAN	BELANJA			CAPAIAN KINERJA		
		ANGGARAN	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
	Pembuatan Souvenir	300.000.000	293.565.000	97,86 %			
	Percetakan Leaflet/ Agenda/ Kalender	350.000.000	348.300.000	99,51 %			
	Penyusunan Pedoman Kehumasan di Lingkungan Basarnas	32.760.000	32.760.000	100%			
	Rapat Kerja Basarnas	500.000.000	499.875.000	99,98 %			
	IKSK.9.1.1.b Persentase kepuasan terhadap layanan publikasi informasi Pencarian dan Pertolongan				90%	100%	111%
	Pengelolaan SPAN LAPOR Basarnas	101.013.000	100.663.370	99,65 %			
	Pengelolaan Website dan Media Sosial	150.000.000	149.223.000	99,48 %			
	Media monitoring	200.000.000	198.000.000	99 %			
	Peningkatan Kompetensi Digital Content Creator	66.000.000	61.180.000	92,70 %			
	Media Gathering dan Media Visit	150.000.000	148.877.000	99,25 %			
	Iklan Layanan Masyarakat	3.800.000.000	3.800.000.000	100 %			
	IKSK.9.1.1.c Skor Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan				92,6	94,67	102
	Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (PPID)	109.065.000	108.349.890	99,34%			
	IKSP.9.2 Indeks SPBE Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan				Baik (2,65)	Sangat Baik (3,63)	136,98%
	<b>SK.9.2.1 Tersedianya data dan informasi yang akurat</b>						
	IKSK.9.2.1.a Persentase pemenuhan data sesuai kesepakatan Forum satu data				100%	100%	100%
	Layanan Data dan Informasi	646.518.000	636.835.422	98,50%			

NO	URAIAN	BELANJA			CAPAIAN KINERJA		
		ANGGARAN	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
	IKSK.9.2.1.b Persentase tersedianya data hasil survei kepuasan masyarakat atas layanan yang akurat				80%	73,34%	91,68%
	Layanan Data dan Informasi	145.703.000	138.467.910	95,03%			
	<b>SK.9.2.2. Meningkatnya ketersediaan teknologi informasi untuk mendukung operasi Pencarian dan Pertolongan</b>						
	IKSK. 9.2.2.a Nilai Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan				2,6	3,63	140%
	Layanan Data dan Informasi	1.000.775.000	989.772.135	98,90%			
	IKSK. 9.2.2.b Persentase kesiapan teknologi informasi dalam mendukung kegiatan operasional				98%	100%	102%
	Pemeliharaan Peralatan Teknologi Informasi (Prioritas Nasional)	14.932.858.000	14.511.127.315	97,18%			
	Peralatan Teknologi Informasi	1.200.000.000	1.191.538.290	99,29%			
	Peralatan Teknologi Informasi (Prioritas Nasional)	2.000.000.000	1.998.600.000	99,93%			
	IKSK. 9.2.2.c Persentase pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung kegiatan operasional				90%	106,78%	118,64%
	Layanan Data dan Informasi	371.711.000	368.483.582	99,13%			
	IKSK. 9.2.2.d Persentase terpenuhinya SDM yang berkualitas				90%	100%	111%
	Layanan Data dan Informasi	451.615.000	445.043.400	98,54%			
	<b>SK.9.2.3 Meningkatkan kualitas Ketatausahaan Pusdatin</b>						
	IKSK. 9.2.3.a Persentase pelaksanaan ketatausahaan yang efisien dan akuntabel				88%	94,94%	107,89%

NO	URAIAN	BELANJA			CAPAIAN KINERJA		
		ANGGARAN	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
	Layanan Umum	209.009.000	206.950.986	99,02%			
	<b>SP.10 Meningkatnya efektivitas regulasi di bidang Pencarian dan Pertolongan</b>						
	IKSP.10.1 Persentase Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) bidang Pencarian dan Pertolongan yang ditetapkan				100%	188,88%	188,88%
	<b>SK.10.1.1 Terwujudnya produk hukum yang berkualitas</b>						
	IKSK10.1.1.a Persentase NSPK yang ditetapkan				70%	100%	100%
	RO Layanan Hukum	1.347.640.000	1.342.792.107	99,64%			
	IKSK10.1.1.b Indeks Kepuasan terhadap layanan produk hukum				4	4.9	100%
	RO Layanan Bantuan Hukum	151.799.000	151.664.481	99,91%			
	IKSP.10.2 Persentase koordinasi dan perjanjian kerja sama dalam negeri dan luar negeri di bidang pencarian dan pertolongan				100%	100%	100%
	<b>SK10.2.1 Meningkatnya kerja sama di bidang Pencarian dan Pertolongan</b>						
	IKSK.10.2.1.a Persentase kerja sama di bidang pencarian dan pertolongan				70%	100%	100%
	RO Kerja Sama Dalam Negeri	675.547.000	671.610.917	99,42%			
	RO Kerja Sama Luar Negeri	928.994.000	928.168.081	99,91%			
	IKSK.10.2.1.b Persentase kerja sama di bidang pencarian dan pertolongan yang ditindaklanjuti				70%	100%	100%
	RO Kerja Sama Dalam Negeri	675.547.000	671.610.917	99,42%			
	RO Kerja Sama Luar Negeri	928.994.000	928.168.081	99,91%			
	<b>SP.11 Meningkatnya kualitas kelembagaan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan</b>						
	IKSP.11.1 Nilai SAKIP Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan				BB (73)	BB (74,01)	101,38%

NO	URAIAN	BELANJA			CAPAIAN KINERJA		
		ANGGARAN	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
	<b>SK.11.1.1 Meningkatnya evaluasi kelembagaan dalam pengelolaan kinerja dan keuangan</b>						
	IKSK.11.1.1.a Persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan program dan anggaran pada seluruh Unit Kerja dan UPT di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan				100%	100%	100%
	EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1,627,355,000	1,626,050,596	99.92%			
	IKSK.11.1.1.b Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan untuk komponen perencanaan kinerja, pengukuran dan pelaporan kinerja				73	74,01	100%
	EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1,627,355,000	1,626,050,596	99.92%			
	IKSK.11.1.1.c Nilai atas evaluasi kinerja anggaran				95	88,77	93,44
	EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1,627,355,000	1,626,050,596	99.92%			
	<b>SK.11.2.1 Meningkatnya kualitas perencanaan lembaga</b>						
	IKSK.11.2.1.a Persentase anggaran yang masih tercantum dalam catatan halaman IV DIPA (blokir)				<5%	<5%	100%
	EBD.952 Layanan Perencanaan dan Penganggaran	2,558,409,000	2,549,791,361	99.66%			
	IKSK.11.2.1.b Persentase ketepatan waktu pada seluruh Unit Kerja dan UPT dalam menyampaikan dokumen usulan rencana dan program				100%	100%	100%
	EBD.952 Layanan Perencanaan dan Penganggaran	2,558,409,000	2,549,791,361	99.66%			

NO	URAIAN	BELANJA			CAPAIAN KINERJA		
		ANGGARAN	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
	IKSP.11.2 Nilai Indeks Reformasi Birokrasi				76	73,43	96,61%
	<b>SK.8.2.1 Terwujudnya organisasi dan tata laksana yang efektif dan efisien</b>						
	IKSK8.2.1.a Indeks Kesesuaian Organisasi yang tepat struktur	543.461.000	539.312.684	99,24 %	2.50	3.08	123.20%
	RO 960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal						
	960.051.A. Penataan dan Pengembangan Kelembagaan/organisasi	278.673.000	274.749.989	98,59 %	4 dok	5 dok	100%
	960.051.B. Evaluasi Nomenklatur Jabatan dan Uraian Tugas	264.788.000	264.562.695	99,91 %	4 dok	1 dok	25%
	IKSK8.2.1.b Persentase Peta Proses Bisnis dengan SOP yang disahkan	19.217.000	19.185.240	99,83 %	65%	135.00%	207.69%
	RO 960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal						
	960.052.A. Evaluasi dan Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)	19.217.000	19.185.240	99,83 %	4 dok	2 dok	50%
	IKSK8.2.1.c Indeks Kepuasan Layanan Fasilitas Reformasi Birokrasi	463.961.000	463.460.380	99,89 %	2	3.43	171.50%
	RO 961 Layanan Reformasi Kinerja						
	961.051.A. Fasilitasi Reformasi Birokrasi	340.841.000	340.626.895	99,94 %	3 Kegiatan	7 kegiatan	166.5%
	961.051.B. Pengembangan Implementasi Core Value ASN Berakhlak	123.120.000	122.833.485	99,77 %	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100%
	IKSP.11.3 Indeks Audit Kearsipan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan				75	92,43	123,66%
	<b>SK.11.3.1 Terwujudnya administrasi dan kearsipan yang handal</b>						
	IKSK.11.3.1.a Persentase unit kerja berpredikat "Baik" dalam pengawasan kearsipan internal				85%	98,25	115,58%

NO	URAIAN	BELANJA			CAPAIAN KINERJA		
		ANGGARAN	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
	Pengelolaan Kearsipan dan Persuratan	250.000.000	244.474.500	97,79 %			
	Bimbingan Teknis Aplikasi Srikandi	117.094.000	117.092.300	100 %			
	Sosialisasi Aplikasi Persuratan	100.000.000	98.529.369	98,53 %			
	Pengawasan Kearsipan	100.000.000	98.860.000	98,86%			
	Pengiriman Surat	80.000.000	6.211.000	7,76 %			
	<b>SP.12 Meningkatnya kualitas pengawasan intern</b>						
	IKSP.12.1 Tingkat Kapabilitas APIP				Level 3	Level 3	100%
	<b>SK.12.1.1 Meningkatnya kualitas pengawasan intern</b>						
	<b>KRO EBD.965. Layanan Audit Internal</b>	<b>4.356.075.000</b>	<b>4.311.544.977</b>	<b>98,98%</b>			
	IKSK.12.1.1.a Tingkat kapabilitas APIP						
	RO 151.Audit Kinerja	2.193.266.000	2.162.545.827	98,60%			
	RO 152.0A .Reviu Laporan Keuangan	199.740.000	199.111.766	99,69%			
	RO 152.0B Reviu RKA-K/L	199.740.000	199.111.766	99,69%			
	RO 153.0A Evaluasi SAKIP	244.996.000	244.938.000	99,98%			
	RO 153.0B Evaluasi RB	149.665.000	149.335.250	99,78%			
	RO 156. Peningkatan Kompetensi APIP	473.755.000	473.579.362	99,96%			
	IKSK.12.1.1.b Tingkat kepuasan layanan terhadap pengawasan internal				Memuaskan	Sangat Memuaskan	113,08%
	<b>SK.13.1.1 Meningkatnya sistem pengawasan internal dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif, dan efisien</b>						
	IKSK.13.1.1.a Persentase rekomendasi APIP yang ditindaklanjuti				70%	70%	100%
	IKSK.13.1.1. b Persentase pendampingan tindak lanjut BPK-RI				80%	85,12%	106,4%

NO	URAIAN	BELANJA			CAPAIAN KINERJA		
		ANGGARAN	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
	RO.151.0B Pendampingan pemeriksaan BPK RI	170.000.000	160.781.043	94,58%			
	IKSK.13.1.1.c Persentase unit kerja dalam mengidentifikasi risiko				20%	20%	100%
	RO 156.0B Bimtek Manajemen Risiko	123.755.000	123.656.950	99,92%			
	IKSK.13.1.1.d Pendampingan unit kerja dalam pembangunan zona integritas				5 unit kerja	5 unit kerja	100%
	RO 153.0C Penilaian WBK/WBBM	238.203.000	237.336.220	99,64%			
	IKSK.13.1.1.e Persentase pelaporan wajib lapor LHKPN dan LHKASN				90%	100%	111,11%
	<b>SK.14.1.1 Meningkatnya dukungan pengawasan intern</b>						
	<b>KRO EBA.962. Layanan Umum</b>						
	IKSK.14.1.1.a Nilai hasil pengawasan kearsipan Inspektorat				Sangat Baik	Sangat Memuaskan	150%
	RO 151.0A Pengelolaan Dokumen Pengawasan	96.625.000	96.153.240	99,51%			
	RO.155.0A Penyusunan PKPT 2025	100.000.000	97.941.675	97,94%			